

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi suatu negara memerlukan dana yang relatif besar. Secara umum upaya untuk pengerahan modal dari masyarakat untuk membiayai pembangunan ekonomi tersebut dapat berupa pengerahan modal dari dalam negeri maupun pengerahan modal yang bersumber dari luar negeri. Pengklasifikasian ini didasarkan pada sumber modal yang dapat digunakan dalam pembangunan. Pengerahan modal yang bersumber dari dalam negeri dapat berasal dari 3 (tiga) sumber utama. *Pertama*, berupa tabungan sukarela masyarakat. *Kedua*, tabungan dari pemerintah. *Ketiga*, tabungan secara paksa.¹

Pada awalnya strategi pembangunan yang ditempuh oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia berpijak pada Teori Dorongan Kuat (*Big Push Theory*) dari tesis Rosenstein-Rodan (1961) serta Konsep Pertumbuhan Tidak Berimbang yang diperkenalkan oleh Singer (1961), Kindleberger (1956) dan Streeten (1950).² Pada prinsipnya strategi pembangunan tersebut menginginkan adanya pembangunan saran dan prasarana, proyek-proyek yang besar dan membutuhkan teknologi serta modal yang tinggi, yang kemudian diharapkan akan dengan sendirinya menciptakan *trickle down efek* perekonomian dalam negeri, seperti termanfaatnya sumber daya alam, terserapnya tenaga kerja, terbukanya pasar dalam dan luar negeri, yang muaranya akan meningkatkan nilai tambah dan

¹ Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta : LPFE-UI, 1985, h.234.

² Bjorn Hettne, *Ironi Pembangunan di Negara Berkembang*. Jakarta : Sinar Harapan, 1985, hal.23-36.

produktivitas perekonomian dalam negeri, yang pada dasarnya kaya bahkan melebihi apa yang dimiliki oleh negara-negara maju dalam bentuk kekayaan alam. Penekanan strategi pada kedua konsep pembangunan diatas adalah dilakukannya investasi secara besar-besaran disejumlah proyek terpilih, yang justru persyaratan mutlak untuk bisa diterapkannya kedua konsep pembangunan tersebut dalam hal ini modal tidak dapat dipenuhi oleh negara-negara berkembang. Persoalannya di sini adalah faktor kekayaan alam tersebut belum bisa dimanfaatkan secara baik dan maksimal oleh karena sejumlah keterbatasan yang dimiliki oleh negara-negara berkembang.

Usaha pengerahan dana untuk membiayai berbagai program pembangunan tersebut sering kali menghadapi kendala. Pokok persoalannya adalah adanya kesulitan dalam pembentukan modal baik yang bersumber dari penerimaan pemerintah yang berasal dari ekspor barang ke luar negeri maupun dari masyarakat melalui instrumen pajak dan instrumen lembaga-lembaga keuangan. Fenomena ketidakmampuan negara berkembang dan miskin untuk mengakumulasi modal ini oleh Nurkse (1953)³ digambarkan dalam teorinya tentang lingkaran perangkap kemiskinan (*The Vicious Circles*). Menurut Nurkse sesuatu negara adalah miskin karena ia merupakan negara miskin (*a country is poor because it is poor*). Dasar dari pendapat tersebut bahwasanya di negara-negara berkembang dan miskin terdapat keadaan-keadaan yang menyebabkan timbulnya hambatan untuk terciptanya pembentukan modal yang tinggi.

³ *Ibid.*

Kebutuhan akan ketersediaan modal untuk pembangunan ekonomi semakin memperbesar peluang pemanfaatan sumber modal yang berasal dari luar negeri. Utang luar negeri dianggap sebagai suatu alternatif pemecahan permasalahan penyediaan dana pembangunan. Untuk itu, pengambilan kebijakan akan pentingnya kebutuhan sumber dana yang berasal dari luar negeri pun dijadikan agenda dalam pembahasan perencanaan ekonomi Indonesia semenjak tahun 1947 melalui Perencanaan Hatta. Dalam Perencanaan ini disebutkan bahwa pinjaman luar negeri beserta penanaman modal asing (PMA) dijadikan sebagai unsur-unsur untuk membiayai perekonomian Indonesia. Perkembangan kebijakan selanjutnya dalam ketetapan MPR RI No.IV/MPR/1978, masih menganggap utang sebagai pelengkap pembangunan saja, sebagaimana yang tercantum:

Pembangunan nasional memerlukan investasi dalam jumlah yang besar, yang pelaksanaannya harus berlandaskan kemampuan sendiri, sedangkan bantuan luar negeri merupakan pelengkap.

Oleh karena itu diperlukan usaha yang sungguh-sungguh untuk mengerahkan dana-dana investasi yang bersumber pada tabungan masyarakat, tabungan pemerintah serta penerimaan devisa yang berasal dari ekspor dan jasa-jasa.

Pengaliran dana dari dana investasi tersebut harus ditingkatkan dengan cepat sehingga peranan bantuan luar negeri yang merupakan pelengkap tersebut pada akhirnya mampu membiayai sendiri seluruh pembangunan.

Akan tetapi, dilihat dari kumulatif perkembangan utang luar negeri dari tahun ke tahun dapatlah disimpulkan bahwa peranan utang luar negeri adalah sebagai pelengkap yang utama dalam pembiayaan pembangunan di Indonesia. Sebagai gambaran, selama Pembangunan Jangka Panjang Tahap I (PJPT I), perkembangan utang luar negeri Indonesia semakin menunjukkan peningkatan

⁴ *Garis-garis Besar Haluan Negara dan Ketetapan-Ketetapan MPR*, Jakarta : Sekretariat Negara, 1978, h.34.

hingga mencapai sekitar 83,3 miliar US dolar. Sedangkan rasio utang luar negeri terhadap PDB (*Debt:GDP*) meningkat dari 29,2 persen menjadi 58,4 persen.⁵

Faktor dalam negeri yang menjadi sumber utama yang mempengaruhi pertumbuhan utang luar negeri adalah defisit anggaran pemerintah yang dibiayai oleh pemasukan modal dari luar melalui instrumen utang luar negeri. Utang luar negeri inilah yang sebenarnya di dalam sistem anggaran berimbang pemerintah dipergunakan untuk menutup selisih antara pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Sedangkan faktor ekstem yang paling dominan mempengaruhi pertumbuhan utang luar negeri ini adalah sensitivitas komponen utang luar negeri terhadap fluktuasi nilai tukar internasional. Hal ini disebabkan oleh karena sebagian besar utang luar negeri dalam bentuk mata uang asing.

Pada tahun 2000 pembayaran utang luar negeri merupakan masalah besar bagi Indonesia. Menurut *Asian Development Bank* (ADB), pada tahun itu utang pemerintah mencapai 95 persen dari PDB, meningkat empat kali dari posisi tahun 1998. Pembayaran utang menghabiskan separuh penghasilan pemerintah. Kondisi ini menurut ADB akan berlangsung beberapa tahun ke depan. Sejak 2003 semakin banyak utang-utang yang dijadwal ulang melalui Paris Club 1 (September 1998) dan Paris Club 2 (April 2000) yang habis masa jeda bayar utangnya (*grace period*). Pada tahun 2005, utang yang dijadwal ulang melalui Paris Club 3 juga mulai habis masa *grace period*-nya. Konsekuensinya, beban pembayaran pokok utang pada tahun-tahun mendatang akan meningkat. Dengan demikian, tanpa

⁵ *Laporan Bank Indonesia Tahun 1993-1994*. Jakarta : BI, 1994, h.75.

perubahan manajemen pinjaman luar negeri secara radikal, sulit mengharapkan rasio di atas akan membaik secara signifikan (Lihat Tabel I.1).

Tabel I.1
Beban Pembayaran Utang (Debt Service) Sebagai Rasio Terhadap Penerimaan Dalam Negeri

Komponen	2001	2002	2003
A. Bunga Utang Luar Negeri	28,9	29,0	25,8
B. Pembayaran Netto*	10,2	16,7	16,7
C. Total A+B	39,1	45,7	42,5
D. Penerimaan Dalam Negeri	300,5	301,9	327,8
E. PPh + PPN	176,0	174,6	206,8
Rasio C/D	13,0 %	15,1 %	13,0 %
Rasio C/E	22,2 %	26,2 %	20,5 %

Sumber : www.depkeu.go.id, diakses 15 Sept 2005.

Kesalahan manajemen pinjaman pada masa sekarang membuat dua generasi bangsa Indonesia harus menanggungnya. Mungkin kita dapat mengandalkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) untuk mengurangi beban rasio pembayaran utang di atas. Namun, yang sering dilupakan adalah, dengan beban rasio pembayaran utang yang tinggi, APBN tidak lagi optimal sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi. Bahkan, tingkat penyedotan dana yang besar dari masyarakat, baik melalui kenaikan pajak maupun pengurangan subsidi, justru ikut menekan potensi pertumbuhan ekonomi.

Tingkat utang luar negeri Pemerintah yang tinggi tersebut mengharuskan perlu diupayakannya optimalisasi manajemen utang. Secara makro dapat dilihat dari, *pertama* adalah dari sisi tingkat utang. Tolok ukurnya dengan melihat pengurangan tingkat utang sedemikian rupa, sehingga utang luar negeri Indonesia menjadi lebih terkendali. *Kedua*, dari sisi distribusi manfaat dan biaya ekonomi APBN. Maksudnya tingkat utang dan *term* pembayarannya sudah diupayakan

sedemikian rupa sehingga beban pembayaran utang (*debt service*) tidak menimbulkan ketimpangan distribusi sosial dalam APBN. Ketiga, dari sisi efektivitas pemanfaatan utang. Artinya utang luar negeri memang benar-benar dimanfaatkan untuk pembangunan sektor-sektor yang mempunyai *multiplier output*, pendapatan dan kesempatan kerja yang terbesar dan kebocoran utang sudah ditekan semaksimal mungkin.⁶

Rentannya ekonomi dalam negeri terhadap berbagai gejolak seperti merosotnya nilai tukar rupiah dan naiknya tingkat suku bunga tidak menghentikan program utang luar negeri Pemerintah. Bahkan yang terakhir, Pemerintah Pusat telah merancang skema pengajuan program Pemerintah Daerah yang dibiayai utang luar negeri. Suntikan dana asing yang akan diteruskan ke daerah itu dipastikan berasal dari CGI. Kepastian tersebut disepakati setelah CGI menyepakati pengucuran utang tahun ini USD 3,7 miliar.⁷ Rinciannya, USD 200 juta akan dikucurkan dalam bentuk hibah. Berikut akan disajikan tabel utang Pemerintah pada tahun 2006.

Tabel I.2
Utang Pemerintah Indonesia

Utang	Jumlah
Utang Program:	USD 1 M
- ADB	USD 500 Juta
- World Bank	USD 400 Juta
- Jepang	USD 100 Juta
Utang Proyek:	USD 2,546 M
- Regular Pledge	USD 2,446 M
- CGI	USD 1,531 Juta
- WB	USD 300 Juta
- ADB	USD 317,6 Juta

⁶ *Perkembangan Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2004*, <http://www.fiskal.depkeu.go.id/>, diakses 15 September 2005.

⁷ *Risiko Tinggi. Daerah Bisa Berbelit Bunga Utang*, Jawa Pos 4 Agustus 2006.

- Jepang	USD 610,1 Juta
- Other Bilateral	USD 193,3 Juta
- Other Multilateral	USD 110 Juta
- Non CGI	USD 915 Juta
- Tsunami Pledge	USD 100,7 Juta
- WB/IBRD	USD 73 Juta
- ADB	USD 27,7 Juta
Total	USD 3,547 M

Sumber : Jawa Pos 4 Agustus 2006

Dari dana tersebut Pemerintah Daerah diperkirakan mendapatkan jatah 10-15 %. Dengan persentase ini, Pemerintah Daerah bisa menikmati dana CGI sekitar USD 370 juta hingga USD 555 juta. Walaupun jatah yang akan dipinjamkan tidak begitu banyak saat ini sudah banyak Pemerintah Daerah yang mengajukan penerusan dana pinjaman tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa di daerah-daerah banyak program pembangunan yang membutuhkan dana yang relatif cukup besar namun disisi lainnya Pemerintah Daerah kekurangan dana untuk membiayai program-program tersebut.

Penambahan utang ke Pemerintah Daerah berarti memperlebar risiko. Jika selama ini bunga utang ditanggung pusat, bila utang diberikan ke daerah, tentu saja Pemerintah Daerah akan ikut menanggung beban bunga utang tersebut. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ekonom Econit Advisory Hendry Sapirini⁸ yang menyatakan bahwa dengan program tersebut Pemerintah akan mengalihkan beban ke Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah harus menyiapkan membayar cicilan utang tersebut. Permasalahan lainnya Pemerintah Daerah harus memiliki perhitungan yang jelas bila meminjam dana asing, bagaimana dan kapan harus melunasinya. Hal ini berkaitan dengan kewajiban suatu daerah yang dapat

⁸ *Ibid.*

melebihi kemampuannya membayar angsuran. Bila hal tersebut terjadi tentunya akan terkendala dalam hal pembangunan proyek yang akan didanai pinjaman tersebut.

Pengalaman beberapa negara menunjukkan ketidakstabilan keuangan nasional terjadi akibat utang daerah yang terlalu banyak dan diluar kemampuannya untuk membayar. Kasus Argentina dan Brasil⁹, dua negara yang menerapkan desentralisasi secara luas, dapat dijadikan pelajaran bagi Indonesia. Adanya desentralisasi yang luas tersebut memberikan pula kebebasan pada daerah untuk meminjam dari dalam maupun luar negeri. Daerah-daerah meminjam melampaui kemampuan keuangannya, sehingga defisit yang besar pun terjadi. Akibatnya, karena kesulitan untuk membayar kembali utang-utang tersebut, yang kemudian meluas menjadi krisis ekonomi secara keseluruhan.

Dalam praktiknya selama ini, ternyata pengelolaan pinjaman daerah juga tidak terlepas dari beberapa kelemahan, seperti:

1. Koordinasi antara pusat-daerah maupun antar daerah dalam pelaksanaan pinjaman daerah masih kurang baik. Hal tersebut berakibat pada sulitnya mempertemukan *supply* yang disediakan oleh *lender* dengan *demand* (sektor/program/daerah) yang diusulkan Pemerintah Daerah.
2. Kemampuan Pemerintah Daerah untuk mengelola pinjaman daerah untuk menjaga pembayaran kembali masih diragukan. Hal ini karena selama lebih dari tiga puluh tahun penyelenggaraan pemerintahan dilakukan secara sentralistik dimana tugas pengelolaan pinjaman luar negeri

⁹ Edy Suandi Hamid, *Sistem Ekonomi Utang Luar Negeri dan Isu-Isu Ekonomi Politik Indonesia*, Yogyakarta : UII Press, 2004, hal.150.

dilakukan oleh pusat. Sebelum era reformasi, jumlah *outstanding* pinjaman Pemerintah Daerah pada 31 Desember 2000 mencapai Rp 4.180 miliar yang disalurkan melalui Rekening Dana Investasi (RDI), Rekening Pembangunan Daerah (RPD) dan penerusan pinjaman (*Subsidiary Loan*). Namun pada sisi pengembalian pinjaman Pemerintah Daerah selama periode tahun 1997 sampai dengan 1999 presentase tunggakan pinjaman (*default*) telah terjadi peningkatan dari 38 persen menjadi 42 persen.¹⁰

3. Mekanisme penerusan pinjaman pemerintah yang diteruskan kepada Pemerintah Daerah yang tercantum dalam KMK 35/KMK.07/2003 masih memerlukan klasifikasi lebih lanjut antara lain mengenai mekanisme pencairan (*disbursement*) pinjaman, ketentuan mengenai klasifikasi proyek, daerah dan penggunaan mata uang dalam penerusan pinjaman.¹¹

Sebenarnya, ide pemanfaatan dana pinjaman dapat dipertimbangkan dari dua hal, yaitu menyikapi implikasi pinjaman luar negeri terhadap kemakmuran publik dan mengevaluasi praktik pemanfaatan pinjaman di masa lampau. Menyangkut efek pinjaman terhadap kesejahteraan publik, studi yang dilakukan Gomane (2005), menunjukkan bahwa pinjaman bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melihat dari peningkatan indeks pembangunan manusia dan penurunan tingkat kematian bayi. Efek kenaikan kesejahteraan bisa melalui pengaruh langsung atau tidak langsung. Namun, efek positif pinjaman hanya bisa terjadi jika ada mekanisme transmisi melalui belanja pemerintah yang memihak

¹⁰ *Pinjaman Daerah Yang Bersumber Dari Luar Negeri : Peluang dan Tantangan*, Jakarta : Direktorat Luar Negeri Bank Indonesia, 2003, hal.3.

¹¹ *Ibid.*

kepentingan publik. Sedangkan mengenai evaluasi terhadap praktik pinjaman, studi Kosack (2003) menggambarkan bahwa pinjaman hanya akan bekerja dengan baik di negara yang demokratis dan menimbulkan efek negatif bila negara penerimanya tergolong otoriter. Argumentasinya, di negara demokratis pemanfaatan pinjaman akan dikontrol penuh masyarakat sehingga setiap ada penyimpangan bisa segera diketahui.¹²

Seiring dengan bergulirnya era reformasi, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan pemenuhan kebutuhan atau kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Kebijakan desentralisasi pada dasarnya menekankan pada optimalisasi peran Pemerintah Daerah dalam mengelola kewenangan yang didelegasikan oleh Pemerintah Pusat untuk menjalankan mekanisme pemerintahannya berikut pembiayaan atas kinerja yang diselenggarakannya. Efektivitas penyelenggaraan asas ini akan terwujud apabila didukung dengan kemampuan keuangan daerah yang kuat. Dengan demikian, daerah harus mampu memaksimalkan potensi sumber daya yang dimilikinya guna meningkatkan penerimaan daerah

Kesiapan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah dapat diketahui dengan berpijak pada beberapa indikator. Indikator tersebut meliputi; *Pertama*, kemampuan keuangan daerah yaitu daerah memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan; *Kedua*, daerah mampu mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai

¹² *Utang, Paskah dan Anggaran Publik*, Kompas 16 Pebruari 2006.

penyelenggaraan pemerintahannya; *Ketiga*, meminimalisasi ketergantungan daerah terhadap pusat dengan tujuan agar Pendapatan Asli Daerah menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah.¹³

Penyelenggaraan pemenuhan kebutuhan daerah tersebut dapat tergambarkan berdasarkan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur. Total penerimaan terjadi penurunan yaitu dari Rp 3,95 trilyun (2004) menjadi Rp 3,48 trilyun (2005). Terjadinya penurunan penerimaan ini juga tidak lepas dari turunnya beberapa komponen penerimaan disejumlah daerah. Realisasi penerimaan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tersebut dapat digambarkan dalam tabel berikut.

Tabel I.3
Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur

Komponen	2004b	2005b
Pendapatan Asli Daerah	2.860.561,59	2.499.422,73
Dana Perimbangan	862.509,97	747.890,00
Lain-2 Penerimaan Yang Sah	230.643,00	235.480,00
Total Penerimaan	3.953.714,57	3.482.792,73

Sumber : www.depkeu.go.id diakses 1 Juli 2006.

Berdasarkan tabel I.3 tersebut dapat diketahui bahwa beberapa komponen penerimaan di sejumlah daerah terjadi peningkatan maupun penurunan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Rp 2,86 triliun (2004b) mengalami penurunan menjadi Rp 2,49 triliun (2005b). Sedangkan pada sisi Dana Perimbangan dari Rp 862,5 miliar (2004b) mengalami peningkatan menjadi 747,89 miliar (2005b) dan lain-lain penerimaan yang sah dari Rp 230,64 miliar

¹³ Abdul Halim, *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2001, hal.167.

(2004b) juga mengalami peningkatan menjadi Rp 235,48 miliar (2005b). Dengan berbagai kecenderungan tersebut dapat disimpulkan bahwa di beberapa daerah Jawa Timur, pemerintah kabupaten/kota mengalami keterhambatan dalam menggali potensi pendapatan didaerahnya masing-masing.

Untuk Surabaya, kondisi keuangan daerah Kota Surabaya sendiri selama 5 tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan, yaitu dari Rp 764,48 milyar (2001) menjadi Rp 1,36 triliun (2005), atau rata-rata setiap tahunnya mengalami peningkatan sekitar 15,76 %. Komponen PAD, meskipun selama lima tahun terakhir peranannya masih pada posisi ke-2 setelah dana perimbangan namun memiliki perkembangan yang terus meningkat dari tahun ke tahun, yaitu dari 27,21 % (2001) menjadi 34,45 % (2005), dan kenaikan tersebut lebih didorong oleh adanya kenaikan yang dialami oleh hampir seluruh sub-sub komponen yang ada dalam PAD. Untuk komponen Dana Perimbangan, peranannya selama lima tahun terakhir dalam ikut membentuk total Pendapatan Daerah cenderung menunjukkan penurunan, yaitu dari 72,78 % (2001) menjadi 62,48 % (2005), dan penurunan tersebut lebih disebabkan oleh adanya penurunan peranan DAU (dari 43,35 % pada tahun 2001 menjadi 26,41 % pada tahun 2005) dan peranan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (dari 0,73 % pada tahun 2001 menjadi 0,09 % pada tahun 2005), sedangkan untuk peranan Dana Bagi Hasil Pajak dan peranan Dana Bagi Hasil dari Provinsi cenderung meningkat, yaitu masing-masing dari 22,68 % (2001) menjadi 23,50 % (2005) dan dari 6,03 % (2001) menjadi 12,48 % (2005). Selanjutnya untuk komponen Lain-Lain Pendapatan yang Sah yang dalam hal ini dikelola melalui Bantuan Dana Kontijensi/Penyeimbang dari Pemerintah,

meskipun dalam lima tahun terakhir menunjukkan adanya perkembangan peranan yang semakin meningkat (dari 0,01 % pada tahun 2001 menjadi 3,06 % pada tahun 2005), namun peranan tersebut masih relatif kecil dalam ikut menyumbang pembentukan total pendapatan daerah. Gambaran realisasi dan komposisi pendapatan daerah selengkapny dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel I.4
Realisasi dan Komposisi Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Surabaya
(Dalam Ribuan Rupiah)

Komponen	Realisasi APBD ¹				APBD s.dh PAK ²
	2001	2002	2003	2004	2005
1. Pendapatan Asli Daerah	207.993,33	277.863,17	348.310,01	417.377,01	469.056,14
1.1 Pajak Daerah	116.042,92	151.482,94	200.141,17	237.206,40	260.671,20
1.2 Retribusi Daerah	76.056,67	96.580,00	115.900,03	135.137,94	146.492,02
1.3 Hasil Perusahaan Daerah & Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.022,09	11.392,40	12.619,24	14.253,96	33.081,26
1.4 Lain-2 Pendapatan Asli	9.871,65	18.407,83	19.649,57	30.778,72	28.811,66
2. Dana Perimbangan	556.406,31	642.327,64	765.175,29	877.432,59	850.676,40
2.1 Bagi Hasil Pajak	173.357,27	201.665,65	280.933,04	360.413,85	320.000,00
2.2 Bagi Hasil Bukan Pajak	5.592,55	5.612,33	1.391,91	748,21	1.267,09
2.3 Dana Alokasi Umum	331.374,60	334.343,35	331.570,00	342.168,00	359.520,00
2.4 Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Bagi Hasil Pajak & Bantuan Keuangan Provinsi	46.081,89	100.706,31	151.280,35	184.102,53	169.889,31
3. Lain-2 Pendapatan Yang Sah	77,85	75,00	37.490,79	35.541,14	41.690,41
3.1 Bantuan Dana Kantiijensi/Penyeimbang dari Pemerintah	77,85	75,00	37.490,79	35.541,14	41.690,41
Pendapatan Daerah	764.477,49	920.265,82	1.150.976,10	1.330.350,74	1.381.422,95

Sumber : Bapeko Surabaya (2006)

Berdasarkan tabel I.4 diatas dapat diketahui bahwa PAD, meskipun mengalami peningkatan perananan tidak begitu besar namun peningkatan peranan tersebut tampaknya memperlihatkan adanya suatu kecenderungan yang konsisten dari tahun ke tahun. Dana Perimbangan, dalam lima tahun terakhir cenderung

mengalami penurunan peranan, penurunan ini tampaknya tidak bisa dilepaskan dari fenomena yang telah diuraikan sebelumnya dan sangat mungkin terus berlanjut untuk masa-masa yang akan datang yaitu semakin terbatasnya keuangan negara yang didorong oleh semakin besarnya beban keuangan negara untuk melunasi utang negara yang jatuh tempo dan pembiayaan berbagai subsidi dalam meringankan beban masyarakat, serta tuntutan untuk lebih memelihara pelestarian lingkungan (konservasi SDA).

Dengan efektifnya Undang-Undang No.22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang telah direvisi melalui Undang-undang No.32 tahun 2004 dan Undang-Undang No.25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagaimana telah direvisi melalui Undang-undang No.33 tahun 2004, maka pemanfaatan dana pinjaman lebih diprioritaskan untuk membiayai proyek-proyek investasi yang menghasilkan penerimaan di daerah. Dana pinjaman daerah ini merupakan pelengkap dari sumber-sumber penerimaan daerah yang ada dan ditujukan untuk membiayai pengadaan prasarana daerah atau harta tetap yang lain berkaitan dengan kegiatan yang bersifat meningkatkan penerimaan yang dapat digunakan untuk mengembalikan pinjaman serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat.

Gambaran pinjaman daerah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya selama ini akan tergambar dalam tabel berikut.

Tabel I.5
Pinjaman Daerah Kota Surabaya (Dalam Miliar Rupiah)

Jenis Pinjaman	Total Pinjaman	Keterangan
1. RCUTP (IBRD)	Rp 17.062.574.798,09	LA : 2817-IND, 27 Mei 1987 SLA : 311/DDI/1987, 10 Juni 1987
2. KIP URBAN V (IBRD)	Rp 38.039.543.720,85	LA : 2408-IND, 20 Juni 1984 SLA : 160/DDI/1984, 17 Nop 1984
3. SUDP (IBRD)	Rp 370.238.196.532,15	LA : 3726-IND, 17 Mei 1994 SLA : 764/DP3/1994, 14 Sep 1994
4. SUDP (OEFC)	Rp 17.355.458.153,53	LA : IP-400, 26 Feb 1993 SLA : 739/DP3/1994, 9 Feb 1994
5. INPRES PASAR	Rp 1.663.954.230,00	Inpres Pasar No.6 Tahun 1977 Inpres Pasar No.15 Tahun 1979
Jumlah	Rp 444.359.727.434,62	

Sumber : Bapeko Surabaya (2006)

Berdasarkan tabel I.5 diatas dapat diketahui bahwa Pemerintah Kota Surabaya sampai dengan tahun 1994 telah melakukan lima jenis pinjaman daerah. Untuk jenis pinjaman RCUTP (IBRD) kewajiban pembayaran pinjaman sampai dengan tahun 2007. Untuk jenis pinjaman KIP URBAN V (IBRD) dan SUDP (OEFC) sampai dengan tahun 2004 lalu. Sedangkan untuk jenis pinjaman SUDP (IBRD) kewajiban pembayaran pinjaman sampai dengan tahun 2014. Kewajiban pembayaran pinjaman daerah tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel I.6
Kewajiban Pembayaran Pinjaman Daerah Kota Surabaya (Dalam Miliar Rupiah)

No	Jenis Pinjaman	Jumlah Kewajiban Pembayaran				
		2004	2005	2006	2007	2008
1	RCUTP (IBRD)	922.355.173,07	866.173.963,48	810.526.361,02	754.878.758,56	-
2	KIP URBAN V (IBRD)	781.543.732,67	-	-	-	-
3	SUDP (IBRD)	28.028.916.958,73	26.397.592.248,61	24.813.992.464,48	23.230.392.680,37	21.677.163.303,07
4	SUDP (OEFC)	827.695.708,38	-	-	-	-
	Jumlah	30.578.511.572,85	27.263.766.212,09	25.624.518.825,50	23.965.271.438,93	21.677.163.303,07

Sumber : Bagian Keuangan Surabaya (2003)

Berdasarkan tabel I.6 diatas dapat diketahui bahwa jumlah kewajiban pembayaran pinjaman mencapai Rp 30,578 miliar (2004) dan Rp 27,263 miliar (2005) yang sebagian besar merupakan kewajiban atas SUDP (IBRD) sebesar Rp

28,028 miliar (2004) dan Rp 26,397 miliar (2005). Berdasarkan tabel 1.4 pendapatan daerah Kota Surabaya sebesar Rp 1,33 triliun (2004) dan Rp 1,36 triliun (2005). Besarnya jumlah kewajiban pembayaran pinjaman daerah yang menyerap 2,3 % (2004) dan 2 % (2005) penerimaan daerah tentunya memiliki beban tersendiri bagi keberlangsungan fiskal.

Fokus penelitian ini adalah untuk melihat efektivitas manajemen pinjaman daerah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Efektivitas manajemen pinjaman daerah disini adalah seperti yang diungkapkan oleh *World Bank* yaitu dalam rangka menyediakan jumlah dana yang disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah dengan tingkat biaya dan risiko yang serendah mungkin, serta mencapai berbagai sasaran lain yang ingin dicapai oleh pemerintah.¹⁴ Untuk itu, peneliti mengambil *Loan Agreement* No.3726-IND tanggal 14 Mei 1994 antara Pemerintah Republik Indonesia dengan *International Bank of Reconstruction And Development* (IBRD) yang telah diteruskan kepada Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan SLA No.764/DP3/1994 tanggal 14 September 1994 sebagai objek kajian. Pinjaman ini dalam rangka membiayai *Surabaya Urban Development Project* (SUDP).

Tujuan utama pemanfaatan dana pinjaman daerah adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan melakukan pembangunan yang terus-menerus. Agar tujuan pemanfaatan dana pinjaman tersebut terwujud, terdapat setidaknya tiga persyaratan yang harus dipenuhi. *Pertama*, pemerintah daerah harus siap melakukan restrukturisasi organisasi dan peningkatan kualitas SDM.

¹⁴ *Guidelines for Public Debt Management*. <http://www.info.worldbank.org/>, diakses 15 September 2005.

Kedua, pemerintah daerah harus mampu merubah sikap atau tindakan yang konsumtif menjadi produktif. *Ketiga*, struktur ekonomi yang dikembangkan oleh daerah otonomi perlu dilandasi oleh strategi pembangunan *basic resource economic*.¹⁵

Melihat tujuan yang pertama bahwa pemerintah daerah harus meningkatkan kualitas sumber daya manusianya menunjukkan bahwa peran aparat sangat menentukan keberhasilan pengelolaan dana pinjaman. Sumber daya manusia oleh birokrasi yaitu seseorang yang bekerja untuk melaksanakan tugas-tugas negara sehingga sumber daya aparatur negara disebut sebagai aparatur birokrasi karena personifikasi pemerintah. Besar kecilnya satuan kerja pengelola sumber daya manusia tentunya tergantung antara lain pada besar kecilnya organisasi yang dilayani. Sedangkan kesuksesan juga ditentukan oleh banyak faktor, tidak hanya dilihat dari peran dalam pengelolaan, tetapi kemampuan yang dimiliki dan disertai dengan adaptasi pada perubahan lingkungan.¹⁶ Sumber daya manusia yang dimaksud tentunya adalah orang yang terkait secara langsung dalam pengelolaan pinjaman tersebut yaitu aparatur pemerintah daerah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bintoro bahwa keberhasilan pembangunan amat ditentukan oleh keberhasilan aparatur negara dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Aparatur negara, terutama segi kepegawaian, merekalah yang menjadi pelaksana-pelaksana kegiatan usaha pemerintahan.¹⁷ Untuk itu peneliti mengambil

¹⁵ *Hutang Sebagai Salah Satu Sumber Pembiayaan Pembangunan Daerah Otonomi*, <http://www.fiskal.depkeu.go.id/>, diakses 14 Mei 2005.

¹⁶ Ambar Teguh Sulistiyani, *Memahami Good Governance dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : Gaya Media, 2004, hal.270.

¹⁷ Bintoro Tjokroamidjojo, *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta : LP3ES, 1981, hal.122.

kemampuan aparat sebagai salah satu variabel yang mempengaruhi efektivitas manajemen pinjaman daerah.

Pencapaian tujuan sebuah organisasi tentunya juga memerlukan manajemen yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Dewasa ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terus dikembangkan dengan tujuan untuk memaksimalkan kinerja manajemen yang membutuhkan adanya dukungan informasi. Mengingat seringnya terjadi disharmonisasi, untuk itu berdasarkan Peraturan Pemerintah No.56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, Pemerintah menyelenggarakan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) secara nasional yang bertujuan untuk (a) perumusan kebijakan dan pengendalian fiskal nasional; (b) penyajian informasi keuangan daerah secara nasional; (c) perumusan kebijakan keuangan daerah; serta (d) sebagai pemantauan, pengendalian dan evaluasi pendanaan desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan, pinjaman daerah dan defisit anggaran daerah. Informasi keuangan tersebut dapat digunakan dalam pengambilan keputusan yang dalam hal pemenuhan kewajiban pembayaran pinjaman daerah sebagai besaran dana yang harus disediakan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Terry bahwa sistem informasi tersebut akan menyediakan semua informasi yang perlu kepada organisasi agar dapat memberikan bantuan maksimum dalam pencapaian tujuan.¹⁸ Untuk itu peneliti mengambil SIKD tersebut sebagai variabel pengaruh kedua untuk mengetahui bagaimana penerapan SIKD tersebut mempengaruhi efektivitas manajemen pinjaman daerah

¹⁸ The Liang Gie, *Administrasi Perkantoran Modern*. Yogyakarta : Yayasan Studi Ilmu dan Teknologi, 1988, hal.55.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa anggaran daerah menduduki posisi yang sentral. Kemampuan daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya dapat dilihat dari kemampuan dalam bidang keuangan yaitu untuk menggali sumber-sumber keuangan yang ada yang tercermin dalam APBD. Menurut Jones dan Pendlebury anggaran daerah harus mampu secara optimal difungsikan yang salah satunya sebagai otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang.¹⁹ Dengan demikian dalam kaitannya dengan efektivitas manajemen pinjaman daerah yang bertujuan akan penyediaan sejumlah dana untuk memenuhi kewajiban pembayaran tentunya kemampuan keuangan daerah memiliki peranan yang penting juga. Kemampuan daerah menggali potensi yang ada akan mewujudkan penyediaan sejumlah dana yang dapat dialokasikan dalam pemenuhan kewajiban. Kemampuan keuangan daerah ini selanjutnya oleh peneliti digunakan sebagai variabel ketiga untuk mengetahui besaran pengaruhnya terhadap efektifitas manajemen pinjaman daerah.

Penelitian ini juga dilakukan untuk memenuhi adanya kesenjangan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Deniey Adi Purwanto (2005) dengan judul "Manajemen Utang Luar Negeri Dalam Rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi".²⁰ Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa utang luar negeri yang sejatinya menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi namun dengan timbulnya sejumlah permasalahan menjadikan satu beban dan jebakan ketergantungan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Untuk dapat mengembalikan peran utang luar negeri dalam mendorong

¹⁹ Mardiasmo. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi Offset, 2002, hal.177.

²⁰ Jurnal Bisnis & Ekonomi Politik, Vol.6(1) April 2005. hal 11-22.



pertumbuhan ekonomi diperlukan manajemen utang luar negeri khususnya dan anggaran pemerintah umumnya dengan lebih baik.

Penelitian lainnya yaitu yang dilakukan oleh Bachrul Elmi (2002) dengan judul “Kebijakan Desentralisasi Fiskal Kaitannya dengan Hutang Luar Negeri Pemerintah Daerah Otonom.”²¹ Dalam penelitian itu disimpulkan bahwa sebagian proyek-proyek yang dibiayai dari utang luar negeri seperti sarana dan prasarana air bersih, terminal angkutan darat, kebersihan dan drainase kota telah memberikan manfaat kepada masyarakat daerah, namun dalam pengelolaan utang luar negeri dan dalam negeri, daerah belum menunjukkan kinerja yang lebih baik dilihat dari tingginya jumlah tunggakan utang (*default*) dan *outstanding* yang semestinya dapat dimanfaatkan oleh daerah, telah menimbulkan *dispute* dan beban denda oleh pihak *lender*.

Penelitian-penelitian diatas memfokuskan penelitian manajemen pinjaman yang dilakukan dalam objek kajian yang luas. Untuk itu penelitian ini berupaya memperoleh kajian yang lebih untuk mencari jawaban apakah kemampuan aparat, sistem informasi keuangan daerah dan kemampuan keuangan daerah memiliki hubungan yang linier dengan efektivitas manajemen pinjaman daerah serta bagaimana pengaruhnya.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan atas permasalahan yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui:

²¹ Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan, Vol.6, No.4 Desember 2002, hal.49-69.

1. Apakah ada pengaruh kemampuan aparat, sistem informasi keuangan daerah dan kemampuan keuangan daerah terhadap efektivitas manajemen pinjaman daerah
2. Seberapa besar pengaruh kemampuan aparat, sistem informasi keuangan daerah dan kemampuan keuangan daerah terhadap efektivitas manajemen pinjaman daerah

I.3. Tujuan dan manfaat penelitian

I.3.1. Tujuan penelitian

Secara akademis penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Menjawab permasalahan yang telah dirumuskan yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh kemampuan aparat, sistem informasi keuangan daerah dan kemampuan keuangan daerah terhadap efektivitas manajemen pinjaman daerah
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kemampuan aparat, sistem informasi keuangan daerah dan kemampuan keuangan daerah terhadap efektivitas manajemen pinjaman daerah
3. Secara praktis penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan solusi atas permasalahan manajemen pinjaman daerah Pemerintah Daerah

I.3.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, meliputi:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang obyektif yang dapat dipergunakan sebagai bahan pengembangan Ilmu Administrasi Negara dan sebagai informasi bagi peneliti serupa dimasa yang akan datang.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang cukup bermanfaat bagi Pemerintahan Kota Surabaya
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban/kontribusi dari penelitian serupa yang mempunyai sejumlah pertanyaan yang belum bisa terjawab

I.4. Kerangka Pemikiran Teoritik

I.4.1. Desentralisasi Fiskal

Secara harfiah kata desentralisasi adalah lawan dari kata sentralisasi yang dapat diartikan sebagai suatu pemusatan berkaitan dengan suatu kewenangan pemerintahan. Desentralisasi tidaklah mudah untuk didefinisikan, karena menyangkut berbagai bentuk dan dimensi yang beragam, terutama menyangkut aspek fiskal, politik, perubahan administrasi dan sistem pemerintahan dan pembangunan sosial dan ekonomi. Desentralisasi mengenai kewenangan pemerintahan menyangkut berbagai aspek, seperti bidang politik, urusan pemerintahan, sosial dan pembangunan ekonomi dan aspek fiskal. Dengan demikian secara umum konsep dari desentralisasi tersebut terdiri atas:

- *Administrative decentralization*
- *Political decentralization*

- *Economic or market decentralization*
- *Fiscal decentralization*²²

Beberapa argumen yang mendukung pelaksanaan desentralisasi antara lain seperti yang diungkapkan oleh Litvack *et al* (1998) bahwa pelayanan publik yang paling efisien seharusnya diselenggarakan oleh wilayah yang memiliki kontrol geografis yang paling minimum karena:

- a. Pemerintah lokal sangat menghayati kebutuhan masyarakatnya
- b. Keputusan pemerintah lokal sangat responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga mendorong pemerintah lokal untuk melakukan efisiensi dalam penggunaan dana yang berasal dari masyarakat
- c. Persaingan antar daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya akan mendorong pemerintah lokal untuk meningkatkan inovasinya.²³

Selanjutnya Tiebout (1956) menekankan bahwa tingkat dan kombinasi pembiayaan barang publik bertaraf lokal dan pajak dibayar oleh masyarakat merupakan kepentingan politisi masyarakat lokal dengan Pemerintah Daerahnya. Masyarakat akan memilih untuk tinggal di lingkungan yang anggaran daerahnya memenuhi preferensi yang paling tinggi antara pelayanan publik dari Pemerintah Daerahnya dengan pajak yang dibayar oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat potensi untuk mencapai efisiensi ekonomi dalam penyediaan barang publik pada tingkat lokal.²⁴

²² Machfud Sidik dalam makalah seminar : *Perimbangan Keuangan Pusat & Daerah Sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal, 2002.*

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

Pelaksanaan desentralisasi akan sangat bergantung pada desain, proses implimentasi, dukungan politis baik pada tingkat pengambilan keputusan di masing-masing tingkat pemerintahan, maupun masyarakat secara keseluruhan, kesiapan administrasi pemerintahan, pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia, mekanisme koordinasi untuk meningkatkan kinerja aparat birokrasi, perubahan sistem nilai dan perilaku birokrasi dalam memenuhi keinginan masyarakat khususnya dalam pelayanan sektor publik.

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu mekanisme transfer dana dari APBN dalam kaitan dengan kebijakan keuangan negara yaitu untuk mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan dan memberikan stimulus terhadap aktifitas perekonomian masyarakat, maka dengan desentralisasi fiskal diharapkan akan menciptakan kemampuan keuangan antar daerah yang sepadan dengan besarnya kewenangan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah otonom.

Sebagai salah satu pilar dalam memelihara kestabilan kondisi ekonomi nasional, desentralisasi fiskal dikelompokkan kepada:

- b. Dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan maksud menciptakan keadilan dan pemerataan serta memperkecil kesenjangan fiskal antar daerah. Dana perimbangan itu berasal dari penerimaan dalam negeri yang diperoleh dari pendapatan perpajakan, royalti dan bagi hasil SDA;
- c. Dana yang bersumber dari pinjaman dalam negeri dan luar negeri yang disalurkan ke daerah (*subsidiary loan*) baik dari pinjaman bilateral maupun multilateral;

Penerapan desentralisasi fiskal melalui UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah semakin membuka peluang bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan serta membiayai sendiri kemajuan pembangunan di daerahnya masing-masing. Untuk itu, supaya Pemerintah Daerah dapat melaksanakan fungsinya secara efektif, dan diberi kebebasan dalam pengambilan keputusan penyediaan pelayanan di sektor publik, maka harus didukung sumber-sumber keuangan yang memadai. Sumber-sumber utama dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel I.7
Sumber-Sumber Penerimaan Pemerintah Daerah

Sebelum UU No.25/1999	UU No.25/1999	UU No.33/2004
1. Transfer fiskal dari Pemerintah Pusat, yaitu: a. <i>Regional Autonomous Subsidy</i> b. Dana <i>Inpres</i> c. Bagi Hasil Pajak (terhadap tanah & bangunan)	1. Transfer fiskal dari Pemerintah Pusat, yaitu: a. Dana Alokasi Umum b. Dana Alokasi Khusus c. Bagian Daerah dari PBB, Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan serta Penerimaan dari SDA	1. Transfer fiskal dari Pemerintah Pusat, yaitu: a. Dana Alokasi Umum b. Dana Alokasi Khusus c. Dana Bagi Hasil Pajak & SDA
2. Pendapatan Daerah, yaitu: a. Pajak & Retribusi Daerah b. Hasil Perusahaan Daerah	2. Pendapatan Daerah, yaitu: a. Pajak & Retribusi Daerah b. Hasil perusahaan milik Daerah & hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan	2. Pendapatan Daerah, yaitu: a. Pajak & Retribusi Daerah b. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan
3. Pinjaman Daerah	3. Pinjaman Daerah	3. Pembiayaan, yaitu: a. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah b. Penerimaan Pinjaman Daerah c. Dana Cadangan Daerah d. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan

Sumber : UU 5/1974, UU 25/1999, UU No.33/1999

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa pada UU 33/2004, sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terbagi atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan. Pinjaman daerah bertujuan memperoleh sumber pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah. Sebagai

salah satu sumber pembiayaan, pinjaman daerah diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan pada masyarakat.

1.4.2. Pinjaman Daerah

Menurut Humes IV (1991) pinjaman merupakan sumber dana yang ketiga bagi Pemerintah Daerah dan merupakan cara alternatif untuk membiayai investasi modal daerah.²⁵

Menurut Norton (1994) beberapa metode yang digunakan di Eropa dan dapat diadopsi di negara-negara berkembang, sumber pinjaman yaitu pinjaman dari sumber dana interval (*interval funds*), pinjaman berjangka (*temporary borrowing*) dan pasar uang (*money market*), obligasi (*bond issues*), pengeluaran saham (*stock issues*), sewa-menyewa (*lease arrangements*).²⁶

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.²⁷

Pinjaman daerah ini berasal dari berbagai sumber, seperti pinjaman luar negeri (melalui lembaga keuangan internasional, pemerintahan asing, atau komersial) yang diteruskan ke Pemerintah Daerah melalui perjanjian *subsidiary loan* (SLA), maupun pinjaman dalam negeri.

²⁵ Antonius Tarigan. *Urgensi Penguatan Keuangan Daerah*. Majalah Perencanaan Pembangunan Edisi 04/th.x/Jul-Sep 2005, hal. 50.

²⁶ *Ibid*

²⁷ Peraturan Pemerintah No.54/2005 tentang Pinjaman Daerah, Undang-Undang No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.

Pinjaman daerah merupakan bagian dari APBD yang mencerminkan anggaran sektor publik. Sebagai anggaran sektor publik maka APBD berfungsi sebagai: (1) alat perencanaan, (2) alat pengendalian, (3) alat kebijakan fiskal, (4) alat politik, (5) alat koordinasi dan komunikasi serta (6) alat penilaian kinerja.²⁸ Dari fungsi ini maka sebagai bagian dari APBD, berarti pula pinjaman daerah merupakan bagian dari kebijakan fiskal daerah. Sebagai bagian dari kebijakan fiskal, maka kebijakan pinjaman daerah harus mengarah pada upaya perwujudan dari fungsi fiskal tersebut. Secara garis besar fungsi dari kebijakan fiskal adalah:

1. Fungsi alokasi, yakni mengalokasikan sumber daya yang ada agar kebutuhan masyarakat atas barang publik bisa terpenuhi.
2. Fungsi distribusi, yakni mewujudkan pembagian pendapatan yang adil dan merata di masyarakat.
3. Fungsi stabilisasi, yaitu bertujuan untuk mewujudkan stabilitas dan menghindari gejolak dalam perekonomian, termasuk stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi yang memadai, dan tersedianya kesempatan kerja.

Dengan mengacu pada fungsi tersebut, perhitungan yang teliti dan cermat harus dilakukan sebelum mengambil keputusan untuk membuat pinjaman bagi Pemerintah Daerah. Artinya, pinjaman daerah yang akan dibuat betul-betul dapat mendukung tersedianya barang publik yang lebih banyak bagi masyarakat, memberi peluang untuk meningkatkan pendapatan masyarakat secara lebih adil dan merata, dan juga mewujudkan stabilitas ekonomi daerah.

²⁸ Mardiasmo, *Op Cit*, hal. 122-123.

Latar belakang pemikiran pemberian pinjaman kepada Pemerintah Daerah muncul sekitar tahun 1980-an dengan maksud memberikan bantuan untuk pemerataan dan percepatan pembangunan daerah. Bagi Pemerintah Daerah, sumber pembiayaan terutama berasal dari usaha yang dilakukan daerah sendiri, yang mencerminkan kapasitas fiskal daerah yang diperoleh, juga berasal dari Pemerintah Pusat. Namun demikian, tidak jarang penerimaan dari kedua sumber utama tersebut masih belum mencukupi, sehingga daerah melaksanakan anggaran defisit dengan meminjam dana dari berbagai sumber yang ada.

Sementara itu ada yang berpendapat bahwa pinjaman adalah pengalihan sumber daya masa depan yang mungkin akan menjadi warisan generasi mendatang namun dapat dimanfaatkan untuk kepentingan saat ini. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan Hyman dalam Hamid bahwa penggunaan pinjaman untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah di satu sisi menurunkan pajak-pajak yang harus dibayar masyarakat saat ini, namun demikian akan meningkatkan pajak yang harus ditanggung publik pada masa yang akan datang.²⁹ Oleh karena itu penggunaan dana yang berasal dari pinjaman oleh generasi sekarang harus dilakukan dengan penuh pertanggungjawaban.

Pada prinsipnya pinjaman Pemerintah Daerah tidak beda dengan pinjaman perusahaan atau bahkan individu. Dalam setiap unit ekonomi, pinjaman dilakukan apabila ada kebutuhan dana yang tidak mencukupi untuk membiayai aktivitas ekonominya, dan diprediksikan adanya kemampuan untuk membayar kembali pinjaman tersebut pada masa yang akan datang. Jadi yang pertama harus dilihat

²⁹ Edy Suandi Hamid, *Op Cit.* hal.147.

adalah urgensi dan kebutuhan riil dari dana yang akan dipinjamkan tersebut, dan sumber-sumber pendapatan apa yang dapat digunakan untuk membayar kembali.

Menurut Davey ada beberapa alasan Pemerintah Daerah melakukan pinjaman dana seperti:

- a. Untuk menutup defisit keuangan jangka pendek.
- b. Untuk membiayai kekurangan belanja rutin dan penghasilan retribusi dalam anggaran tahunan (*annual budget*).
- c. Membiayai pembelian perlengkapan dan mesin-mesin.
- d. Membiayai investasi yang akan menghasilkan pendapatan.
- e. Membiayai pembentukan modal jangka panjang (*long term capital development*).³⁰

Adanya desentralisasi yang luas akan memberi kebebasan pada daerah untuk meminjam. Apabila pinjaman yang dilakukan melampaui kemampuan keuangannya sehingga terjadi defisit akan mengakibatkan kesulitan untuk membayar kembali pinjaman tersebut yang tentunya akan mempengaruhi stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Untuk itu perlu ada kehati-hatian dan pengendalian dalam pinjaman tersebut. Menurut Ter-Minassian (1996) dan Ter-Minassian dan Craig (1997) terdapat empat pendekatan dalam mengendalikan pinjaman Pemerintah Daerah:

1. Pendekatan disiplin pasar, dalam pendekatan ini campur tangan Pemerintah Pusat sejauh mungkin dihindarkan, mekanisme pasar finansial

³⁰ *Hutang Sebagai Salah Satu Sumber Pembiayaan Pembangunan Daerah Otonomi, Op Cit.*

bekerja penuh, artinya mekanisme pasarlah yang menentukan permintaan dan penawaran atas pinjaman tersebut.

2. Pendekatan kerja sama atau koordinasi, dalam pendekatan ini pembatasan terhadap pinjaman daerah tidak ditetapkan melalui undang-undang atau diputuskan secara sepihak oleh Pemerintah Pusat, tetapi ditetapkan melalui perundingan antara pusat dan daerah.
3. Pendekatan berbasis aturan, dalam pendekatan ini diatur secara tegas dalam konstitusi batasan mengenai besaran pinjaman yang bisa dilakukan. Batasan ini bisa secara absolut atau relatif dengan menggunakan rasio-rasio tertentu.
4. Pendekatan pengendalian langsung, dalam pendekatan ini disamping adanya pembatasan atas jumlah atau nilai pinjaman, baik dari dalam maupun luar negeri, penarikan pinjaman juga dilakukan Pusat dengan suatu mekanisme penyaluran semacam *two step loan* kepada Pemerintah Daerah.³¹

Penggunaan pengendalian pinjaman Pemerintah Daerah berdasarkan pendekatan disiplin pasar dan pendekatan pengendalian langsung akan sulit untuk diterapkan di negara berkembang yang menerapkan sistem desentralisasi seperti Indonesia. Pendekatan disiplin pasar akan menempatkan kebebasan penuh bagi daerah yang dapat mengakibatkan daerah tidak terkendali dalam melakukan pinjaman, terlebih bila daerah yang tingkat disiplinnya rendah. Sedangkan pendekatan pengendalian langsung menerapkan pengendalian yang sangat ketat

³¹ Edy Suandi Hamid. *Op Cit.* hal.151-153.

dan mengarah pada pola sentralistik. Untuk itu, Indonesia menerapkan pendekatan berbasis aturan dengan dasar hukum pelaksanaannya sebagai berikut:

- Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah
- Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
- Peraturan Menteri Keuangan No.3/PMK.010/2006 tentang Tata Cara Pemberian Pinjaman Daerah dari Pemerintah Yang Dananya Bersumber dari Pinjaman Luar Negeri

I.4.3. Kemampuan Aparat Daerah

Dalam penjelasan PP No.54 Tahun 2005 dikatakan bahwa pinjaman daerah perlu disesuaikan dengan kemampuan daerah, karena dapat menimbulkan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun-tahun berikutnya yang cukup berat sehingga perlu didukung dengan keterampilan perangkat daerah dalam mengelola pinjaman.

Kemampuan aparat memang memiliki peranan yang penting dalam mencapai tujuan sebuah organisasi. Sebagaimana yang dikatakan Sondang bahwa:

Memang harus diakui bahwa pada umumnya organisasi dihadapkan pada situasi kelangkaan sepanjang menyangkut sarana dan prasarana kerja. Akan tetapi situasi kelangkaan itu tidak boleh mengurangi tekad dan kemampuan untuk bekerja keras, malahan salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan yang mungkin disediakan oleh organisasi.³²

³² Sondang P.Siagian, *Sistem Informasi Untuk Pengambilan Keputusan*, Jakarta : Gunung Agung, 1982, hal. 72.

Steers juga menyatakan hal yang sama bahwa “tanpa prestasi yang baik di tingkat organisasi, pencapaian tujuan dan keberhasilan organisasi menjadi sesuatu yang sulit atau bahkan mustahil.”³³ Sehingga untuk meningkatkan kemampuan objektif dan disiplin Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengelolaan pinjaman diperlukan adanya kecermatan dan kehati-hatian oleh aparat Pemerintah Daerah. Selanjutnya akan dijabarkan beberapa pengertian mengenai kemampuan aparat itu sendiri.

Menurut Miftah Toha “kemampuan merupakan salah satu unsur kematangan, berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan yang dapat diperoleh dari pendidikan, latihan atau pengalaman.”³⁴ Selanjutnya James H. Donnelly mengartikan “kemampuan adalah sifat bawaan (bawaan sejak lahir atau dipelajari) yang memungkinkan seseorang melakukan sesuatu yang bersifat mental dan fisik.”³⁵ Sedangkan Moenir mengatakan bahwa “yang dimaksud dengan kemampuan dalam hubungan dengan pekerjaan ialah suatu keadaan pada seseorang yang secara penuh kesungguhan, berdaya guna dan berhasil guna melaksanakan pekerjaan sehingga menghasilkan sesuatu yang optimal.”³⁶ Kemampuan menurut konsep *Capacity Building* dari Jerry Van Sant adalah sebagai berikut:

“.....*capacity it self is the ability to:*

- *Anticipate and influence change*

³³ Richard M. Steers, *Efektivitas Organisasi Kaidah Tingkah Laku*, Jakarta : Erlangga, 1985, hal. 146.

³⁴ Miftah Toha, *Perilaku Organisasi*, Yogyakarta : Rajawali, 1983, hal. 54.

³⁵ James L. Gibson et al, *Organisasi & Manajemen : Prilaku, Struktur, Proses*, Jakarta : Erlangga, 1987, hal. 55.

³⁶ AS Moenir, *Pendekatan Manusiawi dan Organisasi Terhadap Pembinaan Kepegawaian*, Jakarta : Gunung Agung, 1983, hal. 57.

- *Make informal decision*
- *Abstract and absorb resources, and*
- *Manage resource to achieve objectives*³⁷

Pada intinya yang dimaksud dengan kemampuan adalah potensi dan keahlian seseorang, baik secara fisik maupun mental berkaitan dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperolehnya dari pendidikan, latihan dan pengalaman untuk melakukan tugas dan pekerjaannya serta memanfaatkan dan mengolah sumber-sumber yang ada.

Dengan demikian dalam melaksanakan tugas yang dibebankan, hasil yang diperoleh akan tergantung pada tinggi rendahnya tingkat kemampuan yang melekat pada dirinya seperti yang dikemukakan oleh Miftah Toha "...karena perbedaan kemampuan ini maka dapat kiranya dipergunakan untuk memprediksi pelaksanaan dari hasil kerja seseorang yang bekerja sama di dalam organisasi tertentu."³⁸

Pengertian aparat menurut Purwadarminta adalah alat, aparatur berarti alat-alat negara (pegawai-pegawai dan sebagainya).³⁹ Sedangkan yang dimaksud aparat yang notabenehnya pegawai negeri menurut UU No.8/1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian "adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau

³⁷ Jerry Van Sant, *Organizations and Administration of Integrated Rural Development : Supporting Capacity Building in the Indonesia PDP*, Washington DC : Research Triangle Institute, 1981, hal. 1.

³⁸ Miftah Toha, *Op Cit*, hal.38.

³⁹ WJS Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1976, hal.628.

diserahi tugas Negara lainnya...". Sedangkan Menurut Mariun, aparat diartikan sebagai berikut:

- a. *Pemerintahan dalam arti luas, menunjuk pada aparatur negara, alat-alat perlengkapan negara (aparatur seluruh aparat) sebagai kesatuan yang melaksanakan seluruh tugas/kekuasaan negara atau pemerintahan dalam arti luas.*
- b. *Pemerintahan dalam arti sempit, menunjuk pada aparatur organisasi atau alat perlengkapan negara atau pemerintahan dalam arti sempit.*⁴⁰

Berdasarkan uraian diatas maka untuk dapat menilai sejauh mana tingkat kemampuan aparat berkenaan dengan manajemen pinjaman daerah dapat dilihat dari aktif tidaknya mengikuti berbagai program pendidikan dan latihan, tingkat pengetahuan dan pemahaman mengenai masalah pinjaman daerah, kemampuan dalam penguasaan peraturan serta metode dan prosedur kerja, kemampuan untuk mengatasi persoalan yang berhubungan dengan pekerjaannya. Serta dapat dilihat dari sejauh mana aparat mampu menggunakan sarana-sarana yang ada untuk dapat mencapai tujuannya. Dan sejauh mana aparat dapat bekerja sama dalam melaksanakan tugasnya.

1.4.4. Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)

World Bank (1997) dalam Mardiasmo menyatakan bahwa:

*Anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas Pemerintah Daerah. Pengembangan kapabilitas diartikan sebagai upaya untuk memperbaiki kemampuan Pemerintah Daerah menjalankan fungsi dan perannya secara efisien, sedangkan peningkatan efektivitas diartikan sebagai upaya untuk menyelaraskan kapabilitasnya dengan tuntutan dan kebutuhan publik.*⁴¹

⁴⁰ Mariun, *Azas-Azas Ilmu Pemerintahan*. Yogyakarta : Seksi Penerbitan Fakultas Sospo UGM, 1970, hal.3.

⁴¹ Mardiasmo, *Op Cit*, hal.177.

Untuk kehidupan bernegara yang semakin terbuka, Pemerintah berkewajiban untuk terbuka dan bertanggung jawab terhadap seluruh hasil pembangunan. Salah satu bentuk tanggung jawab tersebut diwujudkan dengan menyediakan informasi keuangan yang komprehensif. Dengan kemajuan teknologi informasi serta potensi pemanfaatannya secara luas membuka peluang berbagai pihak untuk mengakses, mengelola dan mendayagunakan informasi secara cepat dan akurat untuk mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan serta mampu menjawab tuntutan perubahan. Pengelolaan sistem informasi didukung dengan jaringan koneksi intranet dan internet, perangkat keras dan lunak termasuk program aplikasi, komunikasi data keuangan dan penyajian informasi melalui *website*. Informasi yang ditampilkan secara umum meliputi informasi umum yaitu informasi yang dapat diakses secara penuh oleh seluruh lapisan masyarakat serta informasi khusus yaitu informasi yang disediakan untuk pengambil kebijakan. Untuk mengetahui bagaimana penerapannya selama ini maka selanjutnya terlebih dahulu akan dijelaskan satu per satu pengertian dari sistem informasi keuangan itu sendiri.

Menurut Mcleod sistem diartikan sebagai: "*A system is a group of element that are integrated with the common purpose of achieving objective.*"⁴² Selanjutnya Burch dan Strater mendefinisikan sistem sebagai: "Suatu sistem dapat dirumuskan sebagai setiap kumpulan bagian-bagian atau sub-sub sistem yang disatukan, yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu."⁴³ Sistem mempunyai tiga komponen, yaitu: *input*, transformasi dan *output*. *Input* merupakan elemen

⁴² Raymond Mcleod & Goerge Schell, *Management Information System*, New Jersey : Prentice Hall, 2001, hal.9.

⁴³ Moekijat, *Pengantar Sistem Informasi Manajemen*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1991, hal.3.

sumber daya yang menjadi masukan dalam sebuah sistem yang kemudian diproses lebih lanjut. Proses merupakan transformasi yang merubah input menjadi *output*. *Output* merupakan hasil dari elemen yang telah diproses melalui sistem transformasi. Konsep sistem akan lebih berguna dengan adanya dua konsep tambahan yaitu umpan balik (*feedback*) dan mekanisme kontrol. Umpan balik merupakan tampilan data dari suatu sistem, sedangkan mekanisme kontrol meliputi kegiatan memantau, mengevaluasi umpan balik terhadap sistem yang telah dijalankan guna mencapai tujuan.

Sedangkan berbicara mengenai informasi tidak terlepas dari bahasan mengenai data. Menurut Murdick "informasi adalah terdiri dari data yang telah diambil kembali, diolah atau sebaliknya digunakan untuk tujuan informatif atau kesimpulan, argumentasi atau sebagai dasar untuk peramalan atau pengambilan keputusan."⁴⁴ Suatu informasi bagi seseorang, mungkin merupakan data bagi orang lain yang diolah lagi menjadi informasi. Hubungan antara data dan informasi tersebut menurut Mcleod adalah: "*data consist of facts and figures that are relatively meaningless to the user. Information is processed data or meaningful data.*"⁴⁵

Informasi memiliki peranan yang sangat penting sebagai dasar pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Informasi akan berguna bagi *manager* bila memiliki kualitas atau memenuhi dimensi dasar atas informasi, yaitu:

⁴⁴ Robert G.Murdick, *Sistem Informasi Untuk Manajemen*, Jakarta : Erlangga, 1986, hal.6.

⁴⁵ Raymond Mcleod & Goerge Schell, *Op Cit*, hal.12.

- a. *Relevan; informasi dikatakan relevan bila informasi yang didapat berkaitan dengan permasalahan yang ada.*
- b. *Akurat; informasi harus akurat karena dapat mengarahkan pada keputusan yang benar juga sebaliknya.*
- c. *Tepat waktu; informasi berguna bila tersedia pada saat yang tepat, yaitu pada saat dibutuhkan.*
- d. *Lengkap; informasi atas suatu permasalahan harus lengkap karena jika hanya sebagian informasi yang diperoleh maka manager akan memandang suatu permasalahan tidak dari semua sudut pandang.⁴⁶*

Aktivitas dalam sistem informasi menurut O'Brien terbagi:

1. *Input of data resources. Umumnya input dilakukan dalam bentuk aktivitas entry data seperti recording dan editing. Dalam aktivitas ini recording dan editing harus dipastikan bahwa telah dilakukan dengan tepat.*
2. *Processing of data into information. Aktivitas ini mengorganisir, menganalisa, memanipulasi dan menjadikan data menjadi informasi yang dibutuhkan end users.*
3. *Output for information process. Yang dimaksud dalam aktivitas output disini adalah informasi dalam berbagai bentuk yang dapat didistribusikan dan tersedia bagi end users.*
4. *Storage of data resources. Storage adalah suatu aktivitas sistem informasi dimana data dan informasi disimpan untuk menggunakan dikemudian hari.⁴⁷*

McLeod menyatakan bahwa sumber daya informasi perusahaan terdiri dari *computer hardware, computer software, information specialist, users, facilities, database dan information.⁴⁸* Sedangkan menurut O'Brien sumber daya sistem informasi terdiri dari:

1. *People resource. Sumber daya terpenting yang dibutuhkan dalam setiap sistem informasi adalah manusia. Sumber daya yang dimaksud adalah end users dan information system specialist. End users adalah sumber daya manusia yang digunakan sistem informasi atau informasi yang digunakan sistem tersebut. Sedangkan information system specialist adalah sumber daya manusia yang mengembangkan dan mengoperasikan sistem informasi.*

⁴⁶ *Ibid.*, hal.32.

⁴⁷ James O'Brien. *Managing Information System : Managing Information Technology in the Internetworked Enterprise*. New York : The McGraw Hill, 1999, hal. 48.

⁴⁸ Raymond McLeod & Goerge Schell, *Op Cit*, hal.32.

2. *Hardware resource.* Konsep *hardware resources* meliputi secara fisik dan materi yang digunakan dalam proses informasi. Sumber daya ini tidak hanya berhubungan dengan mesin tetapi juga dengan segala macam bentuk media yang digunakan untuk menyimpan data yang tampak secara fisik.
3. *Software resource.* Konsep dari *software resources* ini adalah keseluruhan instruksi proses pengolahan informasi. Sumber daya ini tidak hanya berupa keseluruhan instruksi dari proses pengolahan informasi yang diarahkan dan mengendalikan *hardware komputer*, yang dinamakan program, tetapi juga meliputi keseluruhan instruksi proses pengolahan informasi yang dibutuhkan oleh *users*, yang dinamakan prosedur.
4. *Data resource.* *Data resources* pada sistem informasi pada umumnya dikelompokkan menjadi *database* dan *knowledge base*. *Database* melakukan proses dan mengorganisasikan data. Sedangkan *knowledge base* menyimpan pengetahuan dalam berbagai bentuk.
5. *Network resource.* Konsep ini meliputi *communication media* dan *network support*.⁴⁹

Berdasarkan pengertian-pengertian yang telah diuraikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa sistem informasi adalah suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian sub informasi yang terdiri dari data untuk kemudian diolah menghasilkan suatu informasi untuk tujuan tertentu.

Pengertian sistem informasi keuangan daerah itu sendiri menurut Peraturan Pemerintah No.56/2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah.

Tingkat keefektifan sistem informasi menurut Davis dapat dilihat dari: (1) informasi dan nilai informasi, (2) manusia sebagai pengelola informasi, dan (3)

⁴⁹ *Ibid.*, hal.44.

mesin atau peralatan yang dipakai dalam sistem.⁵⁰ Sedangkan menurut Anthony dan Scott sistem informasi yang efektif adalah sistem informasi organisasi yang dapat memberikan berbagai jenis informasi yang dibutuhkan oleh para pengambil keputusan yang mempunyai tingkat tanggung jawab yang berlainan; pengendalian informasi, pengendalian manajemen dan perencanaan strategis.⁵¹

Selanjutnya Weber mengemukakan faktor-faktor yang dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan efektivitas sistem tersebut, diantaranya:

1. *Evaluasi kegunaan sistem yang dirasakan (perceived usefulness). Evaluasi yang dilakukan adalah untuk mengetahui seberapa jauh kegunaan sistem dari sudut pandang users, apakah mereka merasakan kegunaan dari sistem dalam menyelesaikan pekerjaannya. Beberapa ukuran yang dipakai:*
 - a. *Users merasakan bahwa sistem informasi membantu mereka dalam menyelesaikan tugas-tugas yang berkaitan dengan pekerjaan mereka secara lebih cepat*
 - b. *Users merasakan bahwa sistem informasi memungkinkan mereka untuk meningkatkan prestasi kerja mereka*
 - c. *Users merasa bahwa sistem informasi memberi kemampuan bagi mereka untuk bekerja lebih efektif*
2. *Evaluasi Kualitas Informasi. Evaluasi ini dimaksudkan untuk menilai apakah informasi yang dihasilkan oleh sistem dapat membantu user dapat membantu users dalam menyelesaikan tugasnya dengan lebih baik. Berikut beberapa atribut sistem yang memiliki kualitas informasi;*
 - a. *Accuracy, yaitu jika users merasakan bahwa informasi yang dihasilkan memiliki tingkat akurasi yang cukup tinggi*
 - b. *Timeless, informasi harus tepat waktu, artinya tidak daluarsa dan dapat diperoleh setiap saat pada saat users membutuhkan informasi*
 - c. *Relevance, informasi yang dihasilkan sesuai (relevan) dengan kebutuhan manajemen berdasarkan fungsi dari sistem informasi tersebut.*
 - d. *Comprehensibility, informasi yang dihasilkan dapat dimengeti oleh users.*
 - e. *Informativeness, informasi yang disajikan didesain sesuai dengan kebutuhan users sehingga mudah dalam menjalankan fungsinya.*

⁵⁰ Davis Gordon, *Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta : Pustaka Binaan Presindo, 1983, hal.73.

⁵¹ James A.F Stoner, *Manajemen II*. Jakarta : Erlangga, 1994, hal.113.

3. *Evaluasi kemudahan penggunaan sistem yang dirasakan (perceived ease of use). Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui apakah sistem yang ada mudah digunakan users. Beberapa elemen yang digunakan:*
 - a. *Users merasakan kemudahan dalam mempelajari cara mengoperasikan sistem informasi*
 - b. *Users merasakan kemudahan dalam membuat memerintahkan sistem informasi memerintahkan apa yang diinginkannya*
 - c. *Users merasa dapat dengan cepat menjadi terampil (skillfull) dengan adanya sistem informasi*
4. *Evaluasi kemampuan menggunakan komputer (computer self efficacy). Merupakan evaluasi atas kemampuan users dalam mengoperasikan komputer. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui apakah implementasi sistem informasi dapat membantu users dalam menyelesaikan tugas mereka dengan baik dan apakah users yakin dengan keputusan yang diambil dalam menyelesaikan tugasnya dengan sistem informasi tersebut.*⁵²

1.4.5. Kemampuan Keuangan Daerah

Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan *self supporting* dalam bidang keuangan. Hal ini sesuai dengan pendapat Kaho yang menyatakan bahwa faktor keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya.⁵³ Pamudji juga menegaskan bahwa: "Pemerintah Daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan ... Dan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri."⁵⁴ Ini berarti, dalam penyelenggaraan rumah tangganya, daerah membutuhkan dana.

⁵² Ron Weber, *Information System Control and Audit*. New Jersey : Prentice Hall, 1999, hal.893.

⁵³ *Problem of The Implementation of Fiscal Decentralization In Regional Autonomy*.

<http://www.pdf.dec.org/>, diakses 14 Mei 2005.

⁵⁴ *Ibid.*

Selanjutnya Jones dan Pendlebury mengatakan bahwa:

Anggaran daerah harus mampu secara optimal difungsikan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja.⁵⁵

Dengan kata lain anggaran daerah harus dapat menjaga keberlangsungan fiskalnya. Menurut Halim (2001), ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi adalah: (1) kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan; (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin.⁵⁶ Kedua ciri tersebut akan mempengaruhi pola hubungan antar Pemerintah Pusat dan daerah. Secara konseptual, pola hubungan keuangan antar Pemerintah Pusat dan daerah harus sesuai dengan kemampuan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan.

Menurut Hikmah (1999) dalam Halim, kinerja keuangan daerah dapat dilihat dari desentralisasi fiskal, kebutuhan fiskal, kapasitas fiskal, upaya fiskal.⁵⁷ Sedangkan untuk melihat seberapa besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam meminjam telah diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah.⁵⁸

⁵⁵ Mardiasmo, *Op Cit*, hal.177.

⁵⁶ *Kinerja Keuangan dan Strategi Pembangunan Kota di Era Otonomi Daerah*, <http://www.ideas.repecc.org/>, diakses 14 Mei 2005.

⁵⁷ Abdul Halim, *Op Cit*, hal.24-25.

⁵⁸ HAW Widjaja, *Otonomi Dearah Dan Daerah Otonom*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001, hal.177-178.

I.4.5.1. Derajat Desentralisasi Fiskal

Untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, salah satunya dapat diukur melalui kinerja keuangan daerah. Menurut Musgrave dan Musgrave (1991) dalam mengukur kinerja keuangan dapat digunakan derajat desentralisasi fiskal.⁵⁹ Derajat desentralisasi fiskal dihitung dapat dilihat berdasarkan:

1. $\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (=PAD)}}{\text{Total Penerimaan Daerah (=TPD)}} \times 100\%$ 1
2. $\frac{\text{Bagi Hasil Pajak \& Bukan Pajak (=BHPBP)}}{\text{Total Penerimaan Daerah (=TPD)}}$ 2
3. $\frac{\text{Sumbangan Bantuan (=SB)}}{\text{Total Penerimaan Daerah (=TPD)}}$ 3

Berkenaan dengan hubungan antar Pemerintah Pusat dan Daerah tersebut, Paul Harsey dan Kenneth Blanchard dalam Abdul Halim membagi empat pola hubungan antar Pemerintah Pusat dan daerah:

1. Pola hubungan konstruktif, peran Pemerintah Pusat lebih dominan daripada kemandirian Pemerintah Daerah (daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah)
2. Pola hubungan konsultatif, campur tangan pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi
3. Pola hubungan partisipatif, peran Pemerintah Pusat semakin berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi
4. Pola hubungan delegatif, campur tangan pusat sudah tidak ada, karena daerah sudah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.⁶⁰

⁵⁹ Kinerja Keuangan dan Strategi Pembangunan Kota di Era Otonomi Daerah, Loc Cit.

⁶⁰ Abdul Halim, Op Cit, hal.168-169.

Tabel I.8
Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 – 25	Instruktif
Rendah	25 – 50	Konsultatif
Sedang	50 – 75	Partisipatif
Tinggi	75 – 100	Delegatif

Sumber : Abdul Halim (2001 : 169)

Berdasarkan tabel tersebut, persentase kemandirian 0 – 25 % merupakan pola hubungan instruktif yang menunjukkan kemampuan keuangan daerah yang rendah sekali. Persentase kemandirian 25 – 50 % merupakan pola hubungan konsultatif yang menunjukkan kemampuan keuangan daerah rendah. Sedangkan dalam pola hubungan delegatif persentase kemandirian 75 – 100 % menunjukkan kemampuan kemandirian yang tinggi.

I.4.5.2. Posisi Fiskal

Salah satu dasar untuk menentukan besarnya transfer dana dari Pemerintah Pusat ke daerah adalah kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) yang dialami oleh daerah-daerah. *Fiscal gap* merupakan selisih dari kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal pada daerah tersebut.

I.4.5.2.1. Kebutuhan Fiskal

Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu: (1) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan

publik dan kesejahteraan masyarakat, (2) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah dan (3) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Otonomi daerah yang dititikberatkan pada daerah kabupaten dan kota diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat (*public participation*), pemerataan dan keadilan (*equity & equality*), serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dengan dilaksanakannya otonomi daerah, diharapkan pemerintah daerah memiliki keleluasaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan daerah melalui usaha-usaha yang sejauh mungkin melibatkan peran DPRD dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat.

Masyarakat dewasa ini, semakin banyak menuntut (*demanding*) kepada pemerintah daerah. Di pihak lain, pemerintah daerah diharapkan lebih responsif dan bijaksana terhadap berbagai kebutuhan (fiskal) masyarakat tersebut. Untuk merespon tuntutan masyarakat yang semakin beragam tersebut, pemerintah daerah perlu memiliki sistem manajemen keuangan publik yang handal.

Kebutuhan fiskal adalah kebutuhan daerah untuk membiayai semua pengeluarannya dalam rangka menjalankan fungsi/kewenangan daerah dalam menyediakan pelayanan publik. Kebutuhan fiskal suatu daerah diperhitungkan berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, keadaan wilayah serta jumlah

penduduk miskin.⁶¹ Derajat kebutuhan fiskal suatu daerah dapat diketahui dengan melihat Indeks Pelayanan Publik per Kapita (IPPP), yaitu:

$$IPPP = \frac{\text{Pengeluaran aktual per kapita untuk jasa-jasa publik} \dots\dots\dots 4}{\text{Standar Kebutuhan Fiskal Daerah (SKF)}}$$

PPP = Jumlah Pengeluaran Rutin dan Pembangunan per Kapita

$$SKF = \frac{\text{Jumlah Pengeluaran Daerah / Jumlah Penduduk} \dots\dots\dots 5}{\text{Jumlah Kecamatan}}$$

Semakin tinggi IPPP maka semakin tinggi pula kebutuhan daerah.

I.4.5.2.2. Kapasitas Fiskal

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal secara langsung akan berpengaruh terhadap sistem pembiayaan, pengelolaan, dan pengawasan keuangan daerah. Sistem pembiayaan daerah dalam konteks otonomi daerah merupakan salah satu aspek yang sangat penting, karena daerah diharapkan dapat meningkatkan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*), agar mampu mencukupi kebutuhan fiskal daerah (*fiscal needs*) sehingga tidak mengalami defisit fiskal (*fiscal gap*). Peningkatan kapasitas fiskal pada dasarnya adalah optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah. Hal tersebut penting dipahami, karena sampai saat ini masih ada yang mendikotomikan antara Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan. Terhadap Pendapatan Asli Daerah, pemerintah daerah merasa bebas menggunakan, sementara untuk Dana Perimbangan masih takut menggunakan dan

⁶¹ Robert Simanjuntak, *Kebijakan Keuangan Daerah dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta : Prosiding Rountable Discussion YIPD/CLGI, 2003, hal.9.

harus menunggu arahan dari pemerintah pusat. Pada dasarnya pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh untuk menggunakan kedua sumber pendapatan tersebut, sehingga tidak perlu dibuat dikotomi antara Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber penerimaan daerah yang dimilikinya sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah.

Yang dimaksud dengan kapasitas fiskal adalah kemampuan Pemerintah Daerah untuk menghimpun keuangan berdasarkan sumber-sumber yang dimiliki. Sumber-sumber tersebut diantaranya adalah potensi industri, potensi sumber daya manusia, potensi sumber daya alam serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dengan demikian kapasitas fiskal dapat dilihat melalui:

$$C_j = \frac{PDRB / \text{Jumlah Penduduk} \times 100}{KFs} \dots\dots\dots 6$$

$$Kfs = (\text{PDRB} / \text{Penduduk}) / \text{Kecamatan}$$

Jika C_j lebih besar dari 100 maka kapasitas daerah j tinggi. Juga sebaliknya, jika lebih kecil dari 100 berarti kapasitas fiskal rendah.

1.4.5.2.3. Kapasitas Pemerintah Daerah Untuk Meminjam

Daerah dilarang melakukan pinjaman daerah yang menyebabkan terlampauinya batas jumlah pinjaman yang ditetapkan. Batas jumlah pinjaman daerah adalah jumlah pinjaman maksimum yang dapat diterima oleh daerah dengan memperhatikan indikator kemampuan daerah untuk meminjam maupun

dalam pengembalian pinjaman, yaitu rasio yang menunjukkan tersedianya sejumlah dana dalam periode tertentu untuk menutup kewajiban pembayaran pinjaman.

Batas maksimum jumlah pinjaman ini bertujuan memberikan pedoman kepada daerah agar dalam menentukan jumlah pinjaman dalam jangka panjang perlu memperhatikan kemampuan daerah untuk memenuhi semua kewajiban daerah atas pinjaman daerah.

Dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah No.54/2005 tentang Pinjaman Daerah, untuk melakukan pinjaman jangka panjang (jangka waktu untuk lebih dari satu tahun anggaran) Daerah harus memenuhi ketentuan yaitu jumlah kumulatif pokok pinjaman daerah yang wajib dibayar tidak melebihi 75 % dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya. Ketentuan ini merupakan batas paling tinggi jumlah pinjaman daerah yang dianggap layak menjadi beban APBD. Jumlah kumulatif pokok pinjaman daerah yang wajib dibayar adalah jumlah pokok pinjaman lama yang belum dibayar (termasuk akumulasi bunga yang sudah dikapitalisasi), ditambah dengan jumlah pokok pinjaman yang akan diterima dalam tahun tersebut

Sedangkan yang dimaksud dengan penerimaan umum APBD adalah seluruh penerimaan APBD tidak termasuk Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu, atau:

$$PU = PD - (DAK + DD + DP + PL) \dots\dots\dots 7$$

Keterangan:

PU	=	Penerimaan Umum
PD	=	Jumlah Penerimaan Daerah
DAK	=	Dana Alokasi Khusus
DD	=	Dana Darurat
DP	=	Dana Pinjaman
PL	=	Penerimaan Lain

1.4.5.2.4. Rasio Kemampuan Membayar Pinjaman

Ditentukan bahwa dalam persyaratan membayar utang, kemampuan daerah harus paling sedikit 2,5 kali jumlah seluruh pendapatan dikurangi dengan belanja dan biaya-biaya yang wajib dikeluarkan atau diprioritaskan oleh Pemerintah Daerah, misalnya gaji pegawai, cicilan utang dan bunganya. Kemampuan daerah dimaksud adalah rasio kemampuan membayar utang (DSCR).

DSCR merupakan perbandingan antara penjumlahan Pendapatan Asli Daerah; Bagian Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan sumber daya alam dan bagian daerah lainnya seperti Pajak Penghasilan, serta Dana Alokasi Umum setelah dikurangi Belanja Wajib, dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga dan biaya pinjaman lain yang jatuh tempo, atau:

$$DSCR = \frac{\{PAD + (DBH - DBHDR) + DAU\} - Belanja Wajib}{\geq 2,5 \dots\dots 8}$$

Angsuran Pokok Pinjaman + Bunga + Biaya Lain

Keterangan:

DSCR = *Debt Service Coverage Ratio* atau Rasio Kemampuan

Membayar Kembali Pinjaman

PAD = Pendapatan Asli Daerah

DAU = Dana Alokasi Umum

DBH = Dana Bagi Hasil

DBHDR = Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi

1.4.6. Efektivitas Manajemen Pinjaman Daerah

Menurut Newman dan Summer *"management is a process as it comprises a series of actions that lend to the accomplishment of objectives. It is a social process because these actions are principally concerned with relations between people."*⁶² Selanjutnya Stanely Vance menyatakan *"management is simply process of decision making and control over the actions human beings for the express purpose of attaining predetermined goals."*⁶³ Sedangkan menurut George R.Terry *"management is the process of planing, organizing, actuating and controlling, performed to determine and accomplish common goals by the use of human and other resources."*⁶⁴

Inti dari pendapat-pendapat di atas adalah bahwa manajemen merupakan kegiatan pimpinan dengan menggunakan segala sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasinya.

Manajemen pinjaman luar negeri pemerintah tidak terlepas dari manajemen pinjaman publik secara umum. Dian Ediana dan Sari Nadia⁶⁵ dalam Kompas 13 Mei 2004, mengatakan bahwa "mengelola pinjaman luar negeri

⁶² Ibnu Syamsi, *Pokok-Pokok Organisasi & Manajemen*. Jakarta : Rineka Cipta, 1994, hal.58

⁶³ Ibnu Syamsi, *Op Cit*, hal.59.

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Dian Ediana adalah kepala bagian pinjaman luar negeri Bank Indonesia sedangkan Sari Nadia adalah asisten peneliti ekonomi bagian pinjaman luar negeri Bank Indonesia.

membutuhkan landasan yang kuat untuk mengupayakan agar kebutuhan pembiayaan pemerintah dan kewajiban pembayarannya berada pada biaya yang seminimal mungkin dalam jangka panjang dan menengah, serta dengan mempertimbangkan tingkat risiko dalam batas toleransi pemerintah.”

Menurut Deniey Adi Purwanto pengertian manajemen pinjaman pemerintah adalah:

Suatu proses pengembangan dan pelaksanaan strategi dan administrasi utang pemerintah dalam rangka menyediakan jumlah dana yang disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah dengan tingkat biaya dan risiko yang serendah mungkin, serta mencapai berbagai sasaran lain yang ingin dicapai oleh pemerintah seperti menjaga likuiditas keuangan pemerintah dan meningkatkan efisiensi pasar obligasi domestik.⁶⁶

Selanjutnya IMF dan World Bank (2003) dalam “*Guidelines for Public Debt Management*” mengartikan manajemen pinjaman pemerintah sebagai: “

The process of establishing a strategy for managing the government's debt in order to raise the required amount of funding, achieve its risk and cost objectives, and to meet any other sovereign debt management goals the government may have set, such as developing and maintaining an efficient market for government securities.⁶⁷

Sedangkan efektivitas menurut The Liang Gie dalam Abdul Halim adalah ”suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat yang dikehendaki. Kalau seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendakinya, maka orang itu dikatakan efektif bila menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendakinya.⁶⁸ Selanjutnya Richard M.Steers menyatakan “efektivitas harus dinilai atas tujuan yang bisa dilaksanakan

⁶⁶ Jurnal Bisnis & Ekonomi Politik, Vol.6 (1) April 2005, INDEF, hal.12.

⁶⁷ *Guidelines for Public Debt Management, Op Cit.*

⁶⁸ Abdul Halim, *Op Cit.*, hal.158.

dan bukan atas konsep tujuan yang maksimum. Jadi efektivitas menurut ukuran seberapa jauh organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai.⁶⁹

Apabila konsep efektivitas dikaitkan dengan manajemen pinjaman, maka efektivitas yang dimaksud adalah seberapa besar proses pengembangan dan pelaksanaan strategi dan administrasi pinjaman pemerintah dalam rangka menyediakan jumlah dana yang disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah dengan tingkat biaya dan risiko yang serendah mungkin, serta mencapai berbagai sasaran lain yang ingin dicapai oleh pemerintah.

Menurut Bangura (2000)⁷⁰ manajemen pinjaman pemerintah yang efektif memerlukan beberapa prinsip penerapan yang perlu diperhatikan. *Pertama*, adanya koordinasi dan kerjasama yang erat antara instansi pokok yang menangani dan terlibat dalam manajemen pinjaman pemerintah. Disamping itu, tanggung jawab pengelola utang BUMD biasanya terletak pada masing-masing BUMD dengan pengawasan dari instansi terkait dan persetujuan dari Kementerian Keuangan apabila utang tersebut melibatkan jaminan dari Pemerintah. Lemahnya koordinasi utang Pemerintah dan utang BUMD tidak saja akan menyulitkan manajemen pinjaman, termasuk pengawasannya, tetapi juga dapat menimbulkan masalah dalam kebijakan makroekonomi secara keseluruhan.

Kedua, sistem manajemen pinjaman yang efektif harus didasarkan pada kerangka hukum yang jelas. Didalamnya diatur secara jelas mengenai tanggung jawab terhadap fungsi-fungsi pengelolaan utang juga mengenai tanggung jawab terhadap fungsi-fungsi manajemen pinjaman dan pengambilan keputusan dari

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ Dikutip dari artikel *Praktek Manajemen pinjaman daerah Luar Negeri : Konvensional dan Syariah* yang diterbitkan oleh Direktorat Luar Negeri Bank Indonesia, 2004, hal.255-259.

berbagai instansi yang terlibat. Perlunya kerangka hukum dan persetujuan parlemen ini terutama mengingat bahwa pengelolaan utang pemerintah tersebut merupakan kebijakan publik yang tertuang dalam APBD yang berimplikasi pada kondisi keuangan daerah yang bersangkutan.

Ketiga, meskipun detail dari peraturan tersebut berbeda dari satu negara dengan negara lainnya, akan tetapi aktivitas manajemen tersebut mencakup beberapa aspek, yaitu: (i) perumusan kebijakan dan strategi manajemen pinjaman, (ii) penyusunan proyeksi dan analisis makroekonomi sebagai dasar pengambilan keputusan, dan (iii) pelaksanaan operasional untuk implementasi persyaratan utang (penarikan dan pembayaran kembali utang baik pokok maupun bunganya) serta pemantauan data utang.

Dalam tataran implementasinya pedoman untuk manajemen pinjaman Pemerintah secara rinci telah dirumuskan oleh IMF dan World Bank (2003).⁷¹ Meskipun pedoman ini ditujukan baik pinjaman pemerintah domestik maupun luar negeri, namun esensi dari pokok-pokok aspek yang dirumuskan didalamnya dapat dipergunakan sebagai acuan dalam penguatan manajemen pinjaman pemerintah. Beberapa aspek penting dari pedoman tersebut diantaranya adalah menyangkut koordinasi manajemen pinjaman, transparansi serta akuntabilitas kebijakan. Untuk mendapat gambaran yang lebih jelas berikut akan diuraikan masing-masing aspek tersebut.

⁷¹ *Guidelines for Public Debt Management. Op Cit.*

I.4.5.1. Koordinasi

Berkaitan dengan koordinasi Neumen mengemukakan: “dalam administrasi koordinasi berkaitan dengan sinkronisasi dan penyatupaduan tindakan dari sekelompok orang. Suatu pekerjaan yang dikoordinasikan adalah suatu pekerjaan yang berbagai aktivitas didalamnya dikerjakan secara harmonis, berkesinambungan dan diintegrasikan ke arah tujuan bersama.”⁷² Sedangkan menurut Stoner koordinasi diartikan sebagai: “proses penyatupaduan sasaran dan kegiatan-kegiatan dari unit-unit yang terpisah (bagian atau bidang fungsional) dari suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.”⁷³

Dengan demikian dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa koordinasi merupakan suatu proses penyatupaduan sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan antar badan, instansi, unit dalam mencapai tujuan bersama.

Dari beberapa pengertian koordinasi diatas terkandung unsur penyatupaduan atau integrasi. Philip Sadler mendefinisikan integrasi sebagai: “proses untuk menyatukan orang atau kelompok dalam yang telah terpisah.”⁷⁴ Sedangkan Samodra Wibawa memberikan pengertian tentang integrasi sebagai: “tersatukannya berbagai departemen fungsi didalam organisasi.”⁷⁵

Dengan demikian yang dimaksud dengan integrasi yaitu pertautan atau hubungan dan tersatukannya beberapa unit-unit antar instansi. Integrasi atau penyatupaduan tindakan mempunyai konotasi dengan adanya kemampuan kepemimpinan (koordinator) dalam memberikan perintah dan arahan. Tanpa

⁷² Dann Suganda, *Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Administrasi*, Jakarta : Intermedia, 1991, hal.40.

⁷³ James A.Stoner dan Charles Wonkel, *Manajemen I*. Jakarta : Intermedia, 1988, hal.140.

⁷⁴ Philip Sadler, *Mendesain Organisasi*, Jakarta : Pustaka Binaman Pressindo, 1991, hal.67.

⁷⁵ Samodra Wibawa, *Beberapa Konsep Admoinistrasi Negara*. Yogyakarta : Liberty, 1992, hal.67

adanya kemampuan tersebut instansi yang terlibat akan mempunyai tujuan yang berlawanan. Adanya tujuan-tujuan yang saling berlawanan tersebut akan mengganggu proses penyatupaduan tindakan yang pada akhirnya akan menghasilkan koordinasi yang tidak efektif.⁷⁶

Menurut Harry S. Truman integrasi juga bergantung pada bagaimana hal tersebut diterima dan didukung oleh mereka yang terlibat dalam proses kerjasama.⁷⁷ Artinya untuk mengukur koordinasi disamping kemampuan koordinator sebagai hal utama, dukungan dari mereka yang dikoordinasikan merupakan hal yang tidak kalah penting.

Soewarno Handayaniingat mengatakan salah satu metode dan teknik yang dapat dipakai dalam melakukan kegiatan koordinasi adalah melalui konferensi, selain melalui kewenangan. Koordinasi melalui konferensi dengan rapat-rapat atau sidang-sidang yang dilakukan baik pada tingkat pimpinan maupun pada tingkat pelaksana dalam lingkup kerjasama antar organisasi.⁷⁸

Soewarno Handayaniingat juga mengemukakan bahwa koordinasi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. koordinasi adalah kewenangan dan tanggung jawab pimpinan
- b. adanya pengaturan usaha kelompok secara teratur
- c. konsep kesatuan tindakan
- d. tujuan koordinasi adalah tujuan bersama
- e. koordinasi adalah usaha bersama

⁷⁶ Dimack, *Administrasi Negara*, Jakarta : Erlangga, 1989, hal.31.

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ Soewarno Handayaniingat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta : Gunung Agung, 1985, hal.127.

Dengan demikian dalam koordinasi tersebut terkait juga dengan adanya kewenangan. The Liang Gie mendefinisikan wewenang sebagai: "*legal a rightful. Rightful to command or to act*" (kekuasaan yang sah atau berdasarkan peraturan, suatu hak untuk memerintah atau bertindak).⁷⁹ Kekuasaan yang sah untuk memerintah mengisyaratkan adanya hak berdasarkan peraturan, hak untuk bertindak dan mengambil keputusan. Penyerahan tugas kepada pejabat berarti pemberian wewenang yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas tersebut.

Berdasarkan beberapa definisi diatas maka yang dimaksud dengan koordinasi adalah suatu usaha kerjasama antar badan atau instansi melalui penyatupaduan dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan dalam melaksanakan tugas-tugas yang menyangkut manajemen pinjaman daerah, sehingga dapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi untuk mencapai tujuan bersama.

Menurut Dann Suganda terdapat beberapa jenis koordinasi menurut lingkup dan arahnya, antara lain:

(A) Menurut lingkupnya:

1. *Koordinasi intern, yaitu koordinasi antar pejabat atau antar unit dalam suatu organisasi.*
2. *Koordinasi ekstern, yaitu koordinasi antar pejabat dari berbagai organisasi atau antar organisasi*

(B) Menurut arahnya:

1. *Koordinasi horisontal, yaitu koordinasi antar pejabat atau antar unit yang mempunyai hirarki sama dalam suatu organisasi, antar pejabat dari organisasi-organisasi yang sederajat atau antar organisasi yang setingkat.*
2. *Koordinasi vertikal, yaitu koordinasi antar pejabat-pejabat dan unit-unit tingkat bawah oleh pejabat atasannya, unit tingkat atasnya langsung juga suatu organisasi oleh organisasi induknya.*
3. *Koordinasi fungsional, yaitu koordinasi antar pejabat, antar unit atau antar organisasi yang didasarkan atas kesamaan fungsi atau koordinasinya mempunyai fungsi-fungsi tertentu.*

⁷⁹ The Liang Gie, *Op Cit*, hal.82.

4. *Koordinasi diagonal, yaitu koordinasi antar pejabat atau unit yang berbeda tingkat hirarkinya.*⁸⁰

Dalam konteks penelitian ini, berdasarkan jenis koordinasi yang telah diuraikan oleh Dann Suganda tersebut, koordinasi yang dimaksud menurut lingkupnya adalah koordinasi ekstern yaitu koordinasi yang terjadi antar pejabat dari berbagai organisasi atau antar organisasi. Sedangkan menurut arahnya adalah koordinasi fungsional.

Dengan demikian untuk dapat menilai sejauh mana tingkat koordinasi dapat dilihat dari ada tidaknya integarsi yang diukur dengan kemampuan koordinator dalam memberi arahan, dukungan dari unit-unit yang terkait, frekuensi rapat koordinasi antar unit; kewenangan yang diukur dengan adanya tingkat kejelasan kekuasaan yang didukung oleh peraturan, tingkat kesesuaian antar tanggung jawab dengan kewenangan tersebut; dan sinkronisasi yang diukur dengan ada tidaknya sistematika pekerjaan, kesesuaian antara tujuan dan sasaran.

1.4.5.2. Transparansi

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.⁸¹

Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan

⁸⁰ Dann Suganda, *Op Cit*, hal.25-26.

⁸¹ Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional & Departemen Dalam Negeri, 2002, hal.18.

informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan preferensi publik.⁸²

Prinsip ini mempunyai dua aspek, yaitu komunikasi publik oleh pemerintah, dan hak masyarakat terhadap akses informasi.⁸³ Keduanya akan sangat sulit dilakukan jika pemerintah tidak menangani dengan baik kinerjanya. Manajemen kinerja yang baik adalah titik awal dari transparansi.

Komunikasi publik menuntut usaha afirmatif dari pemerintah untuk membuka dan mendiseminasi informasi maupun aktivitasnya yang relevan. Transparansi harus seimbang, juga dengan kebutuhan akan kerahasiaan lembaga maupun informasi-informasi yang mempengaruhi hak privasi individu. Karena pemerintahan menghasilkan data dalam jumlah besar, maka dibutuhkan petugas informasi profesional, bukan untuk membuat dalih atas keputusan pemerintah, tetapi untuk menyebarluaskan keputusan-keputusan yang penting kepada masyarakat serta menjelaskan alasan dari setiap kebijakan tersebut. Peran media juga sangat penting bagi transparansi pemerintah, baik sebagai sebuah kesempatan untuk berkomunikasi pada publik maupun menjelaskan berbagai informasi yang relevan, juga sebagai pengawas atas berbagai aksi pemerintah dan perilaku menyimpang dari para aparat birokrasi. Keterbukaan membawa konsekuensi adanya kontrol yang berlebih-lebihan dari masyarakat dan bahkan oleh media massa. Karena itu, kewajiban akan keterbukaan harus diimbangi dengan nilai pembatasan, yang mencakup kriteria yang jelas dari para aparat publik tentang

⁸² Meuthia Ganie-Rochman, *Good Governance : Prinsip, Komponen dan Penerapannya dalam HAM : Penyelenggaraan Negara Yang Baik dan Masyarakat Warga*, Jakarta : KOMNAS HAM, 2000, hal. 151.

⁸³ Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah, **Badan Perencanaan Pembangunan Nasional & Departemen Dalam Negeri**, 2002, hal. 60.

jenis informasi apa saja yang mereka berikan dan pada siapa informasi tersebut mereka berikan.

Martin Minogue menyatakan: "*Holders of public office should be as open as possible about all the decisions and action that they take. They should give reasons for their decisions and restrict information only when the wider public interest clearly demands.*"⁸⁴ Lebih lanjut Minogue menerangkan bahwa informasi dan keterbukaan itu mencakup:

(a) memberikan fakta dan analisis tentang keputusan-keputusan kebijakan, (b) menjelaskan alasan-alasan dari keputusan-keputusan administratif, (c) membuka informasi guidelines internal tentang cara-cara bagian tersebut berhubungan dengan publik, (d) menyediakan informasi tentang biaya, target dan performansi dari pelayanan publik, dan prosedur-prosedur untuk mengeluh dan mengadu, (e) memenuhi permintaan informasi khusus.

Fletcher menyatakan bahwa:

*One of the requirements of corporate transparency is that a company disclose whether it has a code of conduct containing specific rules designed to combat bribery what the contents of that code are and evaluations of internal controls and its performance in implementing the code. Doing so allows a company to be held to account if it does not meet its self imposed standards.*⁸⁵

Transparansi merujuk pada ketersediaan informasi pada masyarakat umum dan kejelasan tentang peraturan, undang-undang, dan keputusan pemerintah, dapat dilihat dari: (a) akses pada informasi yang akurat dan tepat waktu tentang kebijakan ekonomi dan pemerintahan yang sangat penting bagi pengambilan keputusan ekonomi oleh para pelaku swasta. Data tersebut harus bebas di dapat

⁸⁴ *The Management of Public Change : From Old Public Administration to New Public Management.* <http://www.goodgovernance-bappenas.go.id/>, diakses 14 Mei 2005.

⁸⁵ *Corporate Transparency in the Fight Gainst Corruption,* <http://www.goodgovernance-bappenas.go.id/>, diakses 14 Mei 2005.

dan siap tersedia, (b) aturan dan prosedur yang *simple, straightforward and easy to apply* untuk mengurangi perbedaan dalam interpretasi.⁸⁶

Menurut buku pedoman penguatan pengamanan program pembangunan daerah, transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.⁸⁷

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah prinsip yang menjamin adanya keterbukaan informasi yang dalam hal ini kaitannya dengan manajemen pinjaman daerah, baik yang mencakup kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Dengan demikian transparansi paling tidak dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti: penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur-prosedur, tugas dan tanggung jawab, ketersediaan informasi bagi publik mengenai kebijakan manajemen pinjaman daerah, proses yang terbuka dalam perumusan dan pelaporan kebijakan dalam manajemen pinjaman daerah.

1.4.5.3. Akuntabilitas

Miriam Budiardjo mendefinisikan akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada mereka yang memberi mandat itu.⁸⁸ Akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga

⁸⁶ Asian Development Bank, *Governance : Sound Development Management*. 1999, hal. 7-13.

⁸⁷ Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah, *Op Cit*, hal. 18.

⁸⁸ Miriam Budiardjo, *Menggapai Kedaulatan Untuk Rakyat*, Bandung : Mizan, 1998, hal. 107-120.

pemerintah sehingga mengurangi penumpukkan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi (*checks and balances system*).

Sedangkan dalam bidang politik, yang juga berhubungan dengan masyarakat secara umum, akuntabilitas didefinisikan sebagai mekanisme penggantian pejabat atau penguasa, tidak ada usaha untuk membangun monoloyalitas secara sistematis, serta ada definisi dan penanganan yang jelas terhadap pelanggaran kekuasaan dibawah *rule of law*. Sedangkan akuntabilitas publik didefinisikan sebagai adanya pembatasan tugas yang jelas dan efisien.⁸⁹

Shafritz mendefinisikan akuntabilitas sebagai: "*The extent to which one must answer to higher authority, legal or organizational, for one's actions in society at large or within one's particular organizational position.*"⁹⁰

Bintoro Tjokroamidjojo membagi akuntabilitas dalam:

- (1) akuntabilitas politik dari pemerintah melalui lembaga perwakilan
- (2) akuntabilitas keuangan melalui pelembagaan budget dan pengawasan bank
- (3) akuntabilitas hukum, dalam bentuk aturan hukum, reformasi hukum dan pengembangan perangkat hukum, dan
- (4) akuntabilitas ekonomi (efisiensi). dalam bentuk likuiditas dan kepastian dalam suatu pemerintahan yang demokratis, tanggung gugat rakyat melalui sistem perwakilan.⁹¹

Guy Peter menyebutkan adanya tiga tipe akuntabilitas, yaitu: (1) akuntabilitas keuangan, (2) akuntabilitas administratif, dan (3) akuntabilitas kebijakan publik.⁹² Akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan

⁸⁹ Meuthia Ganie-Rochman, *Op Cit*, hal.141.

⁹⁰ Jay M. Shafritz & E.W. Russell. *Introducing Public Administration*. USA : Longman, 1997. hal.376.

⁹¹ Bintoro Tjokroamidjojo, *Reformasi Administrasi Publik*, Jakarta : MIA-UNKRIS, 2001, hal.45-49.

⁹² B.Guy Peters, *The Politics of Bureaucracy*, London : Routledge, 2000, hal.299-381.

secara terbuka oleh pelaku kepada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan. Pengambilan keputusan didalam organisasi-organisasi publik melibatkan banyak pihak. Oleh sebab itu wajar apabila rumusan kebijakan merupakan hasil kesepakatan antara warga pemilih para pemimpin politik, teknokrat, birokrat atau administrator, serta para pelaksana dilapangan.

Menurut buku pedoman penguatan pengamanan program pembangunan daerah, akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan.⁹³

Menurut Asian Development Bank akuntabilitas diperoleh melalui: (a) usaha imperatif untuk membuat para aparat pemerintahan mampu bertanggung jawab untuk setiap perilaku pemerintahan dan responsif kepada entitas darimana mereka memperoleh kewenangan, dan (b) penetapan kriteria untuk mengukur performansi aparat pemerintahan serta penetapan mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi.⁹⁴

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah suatu proses yang dilakukan oleh perseorangan atau kelompok atau organisasi untuk memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan suatu kegiatan kepada pihak yang memberikan tanggung jawab.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa prinsip akuntabilitas publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma-norma eksternal

⁹³ Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah, *Op Cit.* hal.19.

⁹⁴ Asian Development Bank, *Loc Cit.*

yang dimiliki oleh para *stakeholders* yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut.

Berdasarkan tahapan sebuah program, akuntabilitas dari setiap tahapan adalah:

1. Pada tahap proses pembuatan sebuah keputusan, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas publik adalah:
 - a. pembuatan sebuah keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan
 - b. pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, artinya sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar maupun nilai-nilai yang berlaku di *stakeholders*
 - c. adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil, dan sudah sesuai dengan visi dan misi organisasi, serta standar yang berlaku
 - d. adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi, dengan konsekuensi mekanisme pertanggungjawaban jika standar tersebut tidak terpenuhi
 - e. konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut
2. Pada tahap sosialisasi kebijakan, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas publik adalah:
 - a. penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan, melalui media massa, media nirmassa, maupun media komunikasi personal
 - b. akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program
 - c. akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat
 - d. ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah dicapai oleh pemerintah.⁹⁵

1.4.7. Pengaruh Kemampuan Aparat Terhadap Efektivitas Manajemen Pinjaman Daerah

Richard M.Steers menyatakan: “tanpa prestasi yang baik ditingkat organisasi, pencapaian tujuan dan keberhasilan organisasi menjadi sesuatu yang

⁹⁵ Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi, <http://www.goodgovernance-bappenas.go.id/>, diakses 14 Mei 2005.

sulit atau bahkan mustahil.”⁹⁶ Selanjutnya Nainggolan mengatakan “pada umumnya, pelaksanaan tugas seorang pegawai negeri antara lain dipengaruhi oleh kecakapan, keterampilan, pengalaman dan kesungguhan pegawai negeri yang bersangkutan.”⁹⁷ Sondang mengatakan:

*Memang harus diakui bahwa pada umumnya organisasi dihadapkan pada situasi kelangkaan sepanjang menyangkut sarana dan prasarana kerja. Akan tetapi situasi kelangkaan itu tidak boleh mengurangi tekad dan kemampuan untuk bekerja keras, malahan salah satu indikator efektifitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan yang mungkin disediakan oleh organisasi.*⁹⁸

Lebih lanjut lagi Sondang menyatakan bahwa:

*Keberhasilan pelaksanaan tugas, pada akhirnya tidak terletak pada sistematika pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab, juga tidak pula pada tersedianya anggaran, juga tidak terletak pada lengkapnya aturan permainan, dalam bentuk prosedur dan hubungan kerja, kesemuanya itu penting tetapi tidak cukup. Hal ini akan menjadi hidup dan bermakna operasional bila manusianya mempunyai pandangan yang tepat dan mempunyai kemampuan serta keunggulan kerja untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang diletakkan di atas pundaknya.*⁹⁹

Berdasarkan beberapa teori yang telah dikemukakan diatas dapat diketahui pentingnya peran kemampuan aparat dalam pencapaian tujuan organisasi. Menurut Summer dan Stanely Vance untuk mencapai tujuan organisasi tersebut, pimpinan menggunakan segala sumber yang ada dalam kegiatan manajemen. Dengan demikian antara efektivitas organisasi dengan manajemen mempunyai kesatuan makna yaitu pencapaian suatu tujuan organisasi. Karena itu, kemampuan aparat juga memiliki peran dalam efektivitas manajemen. Semakin besar tingkat

⁹⁶ Richard M Steers. *Op Cit*, hal.146.

⁹⁷ Nainggolan. *Pembinaan Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta : Depdagri, 1987, hal.123.

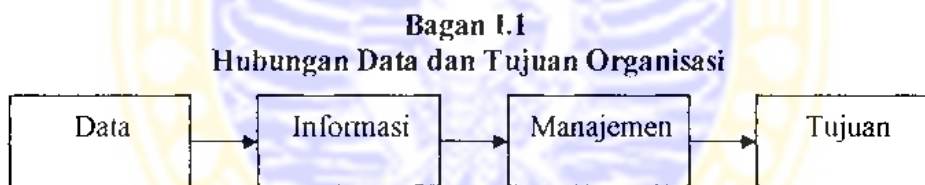
⁹⁸ Sondang P.Siagian. *Op Cit*, hal.72

⁹⁹ Sondang Siagian, *Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*. Jakarta : PT.Gunung Agung, 1983, hal.5

kemampuan aparat akan semakin membantu menyelesaikan tugas dan kewajibannya dalam pencapaian tujuan manajemen.

1.4.8. Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Daerah Terhadap Efektivitas Manajemen Pinjaman Daerah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini sangat berpengaruh terhadap kemajuan organisasi. Untuk mencapai tujuan organisasi memerlukan manajemen yang tepat dan dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. Kegiatan manajemen memerlukan dukungan informasi. Tanpa dukungan informasi, manajemen suatu organisasi tidak akan mencapai tujuan yang direncanakan, apalagi untuk mencapai sasaran secara efisien dan efektif (Lihat Gambar 1).¹⁰⁰



(Zulkifli Amsyah, 1997 : 5)

Informasi itu sendiri adalah data yang sudah diolah dengan cara tertentu sesuai dengan bentuk yang diperlukan. Dengan perkembangan teknologi alat pengolah data sampai komputer dewasa ini, maka data dapat diolah menjadi informasi sesuai keperluan tingkat manajemen organisasi. Dengan demikian unit organisasi dapat mencapai tujuannya masing-masing sehingga secara keseluruhan organisasi akan dapat mencapai tujuan secara efisien dan efektif.

¹⁰⁰ Zulkifli Amsyah, *Manajemen Sistem Informasi*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1997, hal.5

Lebih lanjut lagi Terry menyatakan: "sistem ini akan meliputi semua badan usaha dan melalui pengumpulan sistematis, pengolahan dan penyebaran data akan menyediakan semua informasi yang perlu kepada semua organisasi, agar supaya dapat memberikan bantuan maksimum dalam pencapaian tujuan..."¹⁰¹

Disisi lain, untuk dapat menjadi organisasi yang berkembang maka organisasi tersebut harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu perlu diciptakan suatu saluran informasi yang memungkinkan organisasi untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan tersebut.¹⁰²

Dengan memberikan sumbangan bagi pencapaian tujuan organisasi maka dengan demikian sistem informasi manajemen berpengaruh pula terhadap keefektifan organisasi. Karena semakin besar tingkat pencapaian tujuan, semakin tinggi pula tingkat keefektifan organisasi.

I.4.9. Pengaruh Kemampuan Keuangan Daerah Terhadap Efektivitas Manajemen Pinjaman Daerah

Implikasi atas kondisi penerapan desentralisasi dan otonomi daerah adalah pentingnya daerah untuk dapat segera mandiri, khususnya di bidang keuangan daerah guna keperluan pembiayaan pembangunan. Pinjaman daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah otonom, dapat dijadikan alternatif atas upaya daerah dalam mengurangi ketergantungan sumber pembiayaan pembangunan pada Pemerintah Pusat yang selama ini menjadi problematik tarik ulur antara keduanya.

¹⁰¹ The Liang Gie, *Op Cit*, hal. 55.

¹⁰² J.L. Gibson, *et al. Organisasi : Perilaku, Proses*. Jakarta : Erlangga, 1985, hal. 29.

Dalam kaitannya dengan kemampuan keuangan daerah, seperti apa yang sebelumnya telah diungkapkan oleh Kaho bahwa faktor keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya.¹⁰³ Selanjutnya Pamudji menegaskan bahwa “Pemerintah Daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan ... Dan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri.”¹⁰⁴ Kewajiban yang timbul dari adanya kesepakatan pinjaman daerah menuntut daerah untuk terus mampu memenuhinya. Pinjaman yang dilakukan dalam jangka waktu menengah maupun panjang membutuhkan beberapa periode pemerintahan untuk menyelesaikannya. Kemandirian daerah akan menunjang keberlangsungan fiskal dalam penyediaan sejumlah dana untuk membayar kewajiban pinjaman daerah (pembayaran hutang pokok, bunga, jasa bank maupun biaya komitmen). Sebagaimana yang diungkapkan Jones dan Pendlebury bahwa:

*Anggaran daerah harus mampu secara optimal difungsikan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja.*¹⁰⁵

Dengan demikian, kemampuan keuangan daerah yang tercermin dalam anggaran daerah akan mempengaruhi efektivitas manajemen pinjaman daerah dalam arti ketersediaan sejumlah dana bagi pemenuhan kewajiban pinjaman

¹⁰³ *Problem of The Implementation of Fiscal Decentralization In Regional Autonomy, Loc Cit.*

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ Mardiasmo, *Op Cit*, hal. 177.

daerah. Semakin kuat kondisi anggaran daerah akan semakin tinggi pula tingkat pemenuhan kewajiban pinjaman daerah.

I.5. Perumusan Hipotesa.

Hipotesa adalah pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan masih perlu dibuktikan kenyataannya. Jika suatu hipotesa telah dibuktikan kebenarannya, namanya bukan lagi hipotesa melainkan suatu tesa. Suatu hipotesa akan diterima kalau bahan-bahan penyelidikan membenarkan pernyataan tersebut. Dan akan ditolak bilamana kenyataan menyangkalnya. Pada gilirannya suatu tesa dapat dipandang sebagai suatu hipotesa kalau suatu alasan penyelidikan masih menginginkan mengujinya kembali.¹⁰⁶

1. Hipotesa Kerja (Hi)

Ada pengaruh antara kemampuan aparat, sistem informasi keuangan daerah dan kemampuan keuangan daerah terhadap efektivitas manajemen pinjaman daerah

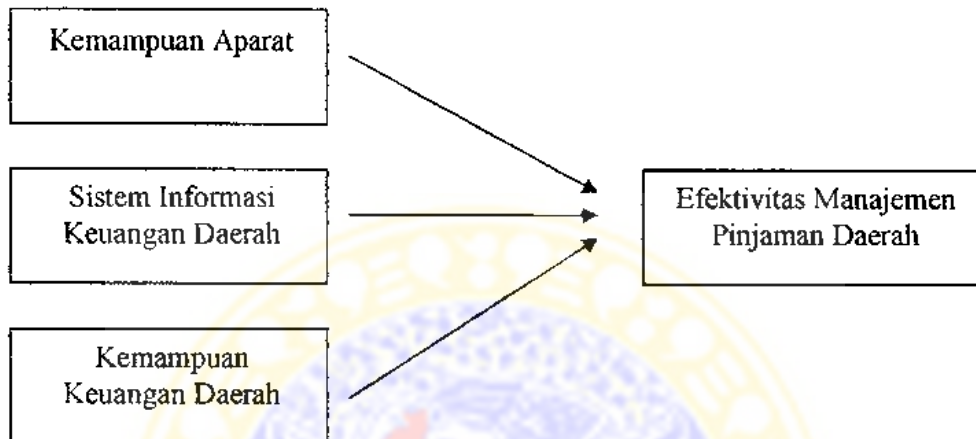
2. Hipotesa Nol (Ho)

Tidak ada pengaruh antara kemampuan aparat, sistem informasi keuangan daerah dan kemampuan keuangan daerah terhadap efektivitas manajemen pinjaman daerah

¹⁰⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta : Kencana, 2005, hal.75-76.

Bagan I.2

Korelasi Antara Kemampuan Aparat, Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Kemampuan Keuangan Daerah Terhadap Efektivitas Manajemen Pinjaman Daerah



I.6. Definisi Konsep dan Definisi Operasional

I.6.1. Definisi Konsep

- Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
- Kemampuan aparat adalah potensi dan keahlian aparatur negara, baik secara fisik maupun mental berkaitan dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperolehnya dari pendidikan, latihan dan pengalaman untuk melakukan tugas dan pekerjaannya serta memanfaatkan dan mengolah sumber-sumber yang ada.

- Sistem Informasi Keuangan Daerah adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah.
- Kemampuan keuangan daerah adalah kemampuan dan kewenangan yang dimiliki oleh daerah untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakannya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan.
- Efektivitas manajemen pinjaman daerah adalah seberapa besar proses pengembangan dan pelaksanaan strategi dan administrasi utang pemerintah dalam rangka menyediakan jumlah dana yang disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah dengan tingkat biaya dan risiko yang serendah mungkin, serta mencapai berbagai sasaran lain yang ingin dicapai oleh pemerintah.

1.6.2. Definisi Operasional

1. Kemampuan aparat, diukur dengan:

- a. **Tingkat pendidikan aparat pelaksana**
 - Tingkat kesesuaian pendidikan dengan kerja yang dijalani
- b. **Tingkat pendidikan non formal aparat pelaksana**
 - Frekuensi pendidikan non formal yang pernah diikuti
 - Tingkat kesesuaian pendidikan non formal dengan tugas pekerjaan

- c. Tingkat kesesuaian melaksanakan tugas dengan peraturan dan kebijaksanaan
 - d. Tingkat pemahaman pada standar kerja yang ditetapkan dan tugas yang harus diselesaikan
2. Sistem informasi keuangan daerah, diukur dengan:
- a. Tingkat evaluasi kegunaan sistem yang dirasakan (*perceived usefulness*)
 - b. Tingkat evaluasi kualitas informasi
 - *Accuracy*
 - *Timeliness*
 - *Relevance*
 - *Comprehensibility*
 - c. Tingkat evaluasi kemudahan penggunaan sistem yang dirasakan (*perceived ease of use*)
 - d. Tingkat evaluasi kemampuan menggunakan komputer (*computer self efficacy*)
3. Derajat kemampuan keuangan daerah, diukur dengan:
- a. Derajat desentralisasi fiskal
 - Kontibusi PAD dengan total penerimaan daerah
 - Rasio bagi hasil pajak dan bukan pajak (BHPBP) terhadap total penerimaan daerah
 - Rasio sumbangan dan bantuan terhadap total penerimaan daerah
 - b. Posisi fiskal:
 - 1) Kebutuhan fiskal

- Perbandingan antara jumlah pengeluaran daerah untuk barang dan jasa publik dengan kebutuhan daerah
 - 2) Kapasitas fiskal
 - Rasio PDRB dengan jumlah penduduk
 - 3) Kapasitas Pemerintah Daerah untuk meminjam
 - 4) Rasio kemampuan membayar pinjaman (DSCR)
4. Efektivitas manajemen pinjaman daerah, diukur dengan:
- a. Tingkat koordinasi
 - 1) Ada tidaknya integrasi:
 - Dukungan dari instansi-instansi yang terlibat
 - Frekuensi rapat koordinasi antar instansi
 - 2) Wewenang:
 - Tingkat kejelasan hak/kekuasaan yang didukung oleh peraturan
 - Tingkat kesesuaian antar tanggung jawab dengan wewenang
 - 3) Tingkat sinkronisasi:
 - Ada tidaknya urutan pekerjaan yang tersusun secara sistematis
 - Kesesuaian antara tujuan dan sasaran
 - b. Tingkat transparansi kebijakan
 - 1) Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur, tugas dan tanggung jawab
 - 2) Ketersediaan informasi publik mengenai kebijakan manajemen pinjaman daerah

- 3) Proses yang terbuka dalam perumusan dan pelaporan kebijakan dalam manajemen pinjaman daerah

c. Tingkat akuntabilitas kebijakan

1) Tahap pembuatan kebijakan

- pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, artinya sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar maupun nilai-nilai yang berlaku di *stakeholders*
- adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil, dan sudah sesuai dengan visi dan misi organisasi, serta standar yang berlaku
- konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut

2) Tahap sosialisasi kebijakan

- penyebaran informasi mengenai suatu keputusan, melalui media massa, media nirmassa, maupun media komunikasi personal
- akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program
- akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat
- ketersediaan sistem informasi manajemen dan *monitoring* hasil yang telah dicapai oleh pemerintah

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Tipe Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini, maka tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian *eksplanatif*. Penelitian eksplanatif dimaksud untuk menjelaskan suatu generalisasi sampel terhadap populasi atau menjelaskan hubungan, perbedaan atau pengaruh satu variabel dengan variabel lainnya.¹⁰⁷ Karena itu penelitian eksplanasi menggunakan sample dan hipotesis. Penelitian ini merupakan penelitian penjelasan (*Explanatory* atau *Confirmatory Research*) karena bertujuan untuk mengungkap atau menjelaskan hubungan antara variabel-variabel penelitian dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya.¹⁰⁸ Dalam penelitian ini akan dijelaskan pengaruh variabel bebas (kemampuan aparat, sistem informasi keuangan daerah serta kemampuan keuangan daerah) dengan variabel terpengaruh (efektivitas manajemen pinjaman daerah).

1.7.2. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian survai. Menurut Masri Singarimbun yang dimaksud dengan penelitian survai adalah “Penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok”.¹⁰⁹ Jadi dalam penelitian ini kuisioner berfungsi sebagai alat pengumpul data primer, namun tidak menutup kemungkinan terhadap informasi

¹⁰⁷ *Ibid.*, hal.38.

¹⁰⁸ Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survai*. Jakarta : LP3ES, 1989, hal.4-5.

¹⁰⁹ *Ibid.*, hal.3.

yang diperoleh diluar kuisioner (misalnya melalui data sekunder atau hasil observasi) serta item-item pertanyaan dalam kuisioner penelitian ini sifatnya tertutup.

1.7.3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Badan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Kota Surabaya. Adapun pertimbangan pengambilan lokasi penelitian tersebut adalah:

- Fokus dalam penelitian ini adalah efektivitas manajemen pinjaman daerah dalam pengertian yang telah dijabarkan di definisi konsep. Sesuai dengan Peraturan Walikota Surabaya No.5 Tahun 2006 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Surabaya maka terdapat kesesuaiannya antara permasalahan yang diteliti dengan lokasi yang akan dijadikan tempat penelitian serta variabel-variabel yang telah dikemukakan sebelumnya.
- Pemenuhan kewajiban pinjaman diprediksikan berlangsung sampai dengan tahun 2014.

1.7.4. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi penelitian merupakan keseluruhan (*universum*) dari objek penelitian, sehingga objek penelitian tersebut dapat menjadi sumber data penelitian.¹¹⁰ Populasi dibedakan pula antara populasi sampling dan populasi sasaran.¹¹¹ Sebagai populasi sasaran dalam penelitian ini adalah semua aparat di

¹¹⁰ Burhan Bungin, *Op Cit*, hal.99.

¹¹¹ Masri Singarimbun. *Op Cit*, hal.152.

Badan Pengelolaan Keuangan dengan pertimbangan bahwa lembaga tersebutlah yang memiliki peranan sesuai dengan maksud penelitian.

Dalam penelitian ini sampel yang diambil yakni sejumlah 30 orang. Pemilihan sejumlah responden tersebut didasarkan pada penarikan sampel non probabilitas dengan pertimbangan yang sifatnya subjektif sehingga setiap anggota populasi tidak mempunyai peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah *snowball* sampling yang pada awalnya responden dipilih secara random dengan metode probabilitas yang selanjutnya responden yang telah terpilih tersebut diminta untuk memberikan informasi mengenai responden-responden lainnya.¹¹² Responden tersebut tercakup dalam bagian-bagian sebagai berikut; bidang pengelolaan anggaran terdiri dari sub bidang penerimaan sebanyak 2 responden dan sub bidang pembelanjaan sebanyak 3 responden, bidang perbendaharaan dan verifikasi terdiri dari sub bidang perbendaharaan sebanyak 14 responden dan sub bidang verifikasi sebanyak 3 responden serta bidang kas dan akuntansi terdiri dari sub bidang kas sebanyak 5 responden dan sub bidang akuntansi sebanyak 3 responden.

1.7.5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

1. Akumulasi data primer yang dilakukan dengan penyebaran kuesioner terhadap responden yang dipilih sebagai sampel.

¹¹² Burhan Bungin, *Op Cit.* hal. 109.

2. Akumulasi data sekunder dan dokumentasi, yakni pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan terhadap data tertulis yang ada di lokasi penelitian.
3. Disamping teknik tersebut diatas, juga digunakan pengumpulan data dengan cara pengamatan atau observasi sebagai bahan pembanding dan penunjang data terdahulu.

I.7.6. Validitas dan Reliabilitas Alat ukur

Dalam suatu penelitian validitas dan reliabilitas yang tidak diketahui akan berakibat fatal dalam memberikan kesimpulan ataupun dalam memberi alasan terhadap hubungan-hubungan antar variabel. Bahkan secara luas reliabilitas dan validitas mencakup mutu seluruh proses pengumpulan data sejak konsep disiapkan sampai kepada data dianalisis.¹¹³

Validitas mempersoalkan apakah benar-benar kita mengukur apa yang kita pikirkan sedang kita ukur. Dalam penelitian ini validitas yang dipakai adalah validitas konstruk yaitu tipe validitas yang dilakukan dengan menganalisis unsur-unsur apa yang menjadi bagian dari konstruk tersebut, dimana yang dimaksud konstruk adalah suatu abstraksi dan generalisasi khusus dan merupakan suatu konsep yang diciptakan khusus untuk kebutuhan ilmiah dan mempunyai pengertian terbatas, konstruk tersebut diberi definisi sehingga dapat diamati dan diukur.¹¹⁴

¹¹³ M.Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia, 2003, hal.133.

¹¹⁴ *Ibid*, hal.148.

Perhitungan validitas ini dibantu dengan program SPSS dimana suatu butir pernyataan dikatakan valid atau tidak harus menggunakan patokan tertentu.

Berikut ini adalah patokan yang digunakan¹¹⁵

- r (korelasi antara skor butir dengan skor total seluruh butir) harus positif (+).
- r hitung harus lebih besar atau sama dengan r tabel.

Untuk $N = 30$, taraf signifikansi 5 %, *two tailed*, adalah 0,306. Berarti nilai α harus $\geq 0,306$. Oleh karena itu, pada pengukuran reliabilitas nilai α tiap variabel harus $> 0,306$. Dari hasil perhitungan validitas dengan bantuan SPSS versi 10.0 diperoleh hasil dari 51 butir item pertanyaan diperoleh 50 butir item valid dan 1 butir item tidak valid. Dengan rincian sebagai berikut:

- variabel x_1 (kemampuan aparat), dari 6 item pertanyaan diperoleh r korelasi tiap butir lebih besar dari 0,306. Sehingga 6 item pertanyaan tersebut dinyatakan valid. (lihat lampiran)
- variabel x_2 (sistem informasi keuangan daerah), dari 13 item pertanyaan diperoleh r korelasi tiap butir lebih besar dari 0,306. Sehingga 13 item pertanyaan tersebut dinyatakan valid. (lihat lampiran)
- variabel x_3 (kemampuan keuangan daerah), dari 14 item pertanyaan diperoleh r korelasi tiap butir pertanyaan lebih besar dari 0,306. Sehingga 14 item pertanyaan tersebut dinyatakan valid. (lihat lampiran)
- variabel y (efektivitas manajemen pinjaman daerah), dari 17 item pertanyaan diperoleh r korelasi tiap butir pertanyaan lebih besar dari 0,306

¹¹⁵ Sutrisno Hadi, *Paket SPSS Paket Mudi*. Yogyakarta : UGM Press, 2000. hal.89.

sedangkan 1 item pertanyaan tidak dilakukan korelasi. Sehingga 17 item pertanyaan tersebut dinyatakan valid. (lihat lampiran)

Sedangkan reliabilitas adalah menunjukkan sejauh mana pengukuran itu dapat memberikan hasil yang relatif tidak berbeda bila dilakukan pengukuran kembali terhadap subyek yang sama. Untuk mengukur reliabilitas dalam penelitian ini digunakan *internal criterion*, yaitu kriteria pembandingan yang dalam penelitian ini berasal dari alat ukur itu sendiri, dengan cara mengkorelasikan nilai-nilai tiap item dengan nilai total pada tiap individu (*internal consistency*). Teknik statistik yang digunakan adalah teknik korelasi *Product Moment* dari Pearson. Dengan teknik ini dapat ditemukan konsistensi internal item dalam suatu alat ukur dengan mengkorelasikan skor item dengan skor totalnya.

Rumus dari korelasi *Product Moment* ini adalah sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{\sum XY - \frac{(\sum X)(\sum Y)}{N}}{\sqrt{\left[\sum X^2 - \frac{(\sum X)^2}{N} \right] \left[\sum Y^2 - \frac{(\sum Y)^2}{N} \right]}}$$

Keterangan :

r : korelasi *product moment*

N : jumlah subyek penelitian

X : skor tiap item

Y : skor total item

Untuk mengetahui tingkat reliabilitas, maka alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik belah dua. Adapun langkah-langkah :

yang dilakukan dalam uji reliabilitas dengan menggunakan teknik belah dua adalah sebagai berikut:

- Menyajikan alat ukur kepada sejumlah responden, kemudian dihitung validitas itemnya. Item-item yang valid dikumpulkan jadi satu dan yang tidak valid dibuang;
- Membagi item-item yang valid tersebut menjadi dua belahan. Untuk membelah alat ukur menjadi dua dapat dilakukan dengan cara;
- Membagi item dengan cara acak (random), separuh masuk belahan pertama dan separuh masuk belahan kedua
- Membagi item berdasarkan nomor genap-ganjil. Item yang bernomor ganjil dimasukkan dalam belahan pertama, sedangkan yang bernomor genap dikelompokkan dalam belahan kedua atau sebaliknya.
- Skor untuk masing-masing item pada tiap belahan dijumlahkan. Langkah ini akan menghasilkan dua skor total untuk masing-masing responden, yakni skor total belahan pertama dan skor total belahan kedua
- Mengkorelasikan skor total belahan pertama dengan skor total belahan kedua dengan menggunakan teknik korelasi *product moment* yang telah dijelaskan sebelumnya.

Adapun rumus yang digunakan setelah dilakukan langkah-langkah yang telah disebutkan diatas, untuk mengetahui reliabilitas item-item yang ada adalah:

$$r_{.tot} = \frac{2(r_{.11})}{1 + r_{.11}}$$

Keterangan :

r_{tot} : Angka reliabilitas keseluruhan item

r_{ii} : Angka korelasi belahan pertama dan belahan kedua

Kemudian hasilnya dibandingkan dengan angka kritik nilai r , jika r total > nilai r kritik maka dapat dikatakan reliabel. Dan untuk pengujian reliabilitas ini dibantu dengan program SPSS versi 10, dimana hasil perhitungan akan dibandingkan dengan angka kritik nilai r ($df : N-2$ pada taraf signifikansi 5%). Untuk menentukan apakah suatu alat ukur reliabel atau tidak maka standar yang digunakan sama dengan pengujian validitas, yaitu :

- r (korelasi antara skor butir dengan skor total seluruh butir) harus positif (+).
- r hitung harus lebih besar atau sama dengan r tabel *product moment*

Untuk $N = 30$, taraf signifikansi 5 %, *one tail*, r_{tabel} adalah 0,306. Berarti nilai r_{hitung} harus $\geq 0,306$. Dari perhitungan yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa:

- Dari hasil penghitungan variabel x_1 (kemampuan aparat) diperoleh nilai α sebesar 0,745, sehingga variabel ini dinyatakan reliabel, karena $r_{\alpha} > r_{tabel}$ ($0,745 > 0,306$)
- Dari hasil penghitungan variabel x_2 (sistem informasi keuangan daerah) diperoleh nilai α sebesar 0,650, sehingga variabel ini dinyatakan reliabel, karena $r_{\alpha} > r_{tabel}$ ($0,650 > 0,306$)

- Dari hasil perhitungan variabel x_3 (kemampuan keuangan daerah) diperoleh nilai α sebesar 0,786, sehingga variabel ini dinyatakan reliabel, karena $r_\alpha > r_{tabel}$ ($0,786 > 0,306$)
- Dari hasil perhitungan variabel y (efektivitas manajemen pinjaman daerah) diperoleh nilai α sebesar 0,926, sehingga variabel ini dinyatakan reliabel, karena $r_\alpha > r_{tabel}$ ($0,926 > 0,306$)

Dari kedua uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa ada 50 item pertanyaan yang reliabel dan untuk seterusnya ke 50 item pertanyaan itulah yang akan dianalisis.

1.7.7. Teknik Analisa Data

Pada penelitian ini teknik statistik yang akan digunakan adalah teknik analisa regresi ganda dan korelasi parsial. Penelitian ini menggunakan analisis regresi ganda atau majemuk, sebab akan menguji signifikansi korelasi antara dua ubahan sebab prediktor (x) dengan sebuah ubahan tautan atau kriterium (y). sedangkan uji statistik korelasi parsial bermaksud untuk mengetahui murni atau tidaknya hubungan x_1 (kemampuan aparat) terhadap y (efektivitas manajemen pinjaman daerah) dengan dikontrol prediktor x_2 (sistem informasi keuangan daerah), untuk mengetahui murni tidaknya hubungan prediktor x_2 terhadap y dengan dikontrol x_3 (kemampuan keuangan daerah) dan yang ketiga adalah untuk mengetahui murni tidaknya hubungan prediktor x_3 terhadap y dengan dikontrol prediktor x_1 , karena korelasi parsial merupakan pengembangan dari korelasi

product moment, maka asumsi yang mendasari penggunaan teknik ini juga berasal dari asumsi korelasi *product moment*, adapun rumus penghitungan korelasi parsial antara variabel kriterium dengan variabel prediktor dengan dikontrol variabel prediktor adalah sebagai berikut:

$$r_{y_{1-2}} = \frac{r_{y_1} - (r_{y_2})(r_{12})}{\sqrt{(1-r_{y_2}^2)(1-r_{12}^2)}}$$

Keterangan:

- $r_{y_{1-2}}$: Koefisien korelasi parsial antara variabel kriterium (y) dan variabel prediktor x_1 dengan dikontrol variabel prediktor x_2
- r_{1-2} : Koefisien korelasi *product moment* antara variabel kriterium (y) dan variabel prediktor x_1 dengan dikontrol oleh variabel prediktor x_2
- r_{y_1} : Koefisien korelasi *product moment* antara variabel y dan variabel x_1
- r_{y_2} : Koefisien korelasi *product moment* antara variabel y dan variabel x_2 ¹¹⁶

$$r_{y_{2-3}} = \frac{r_{y_{2-1}} - (r_{y_3})(r_{23})}{\sqrt{(1-r_{y_3}^2)(1-r_{23}^2)}}$$

Keterangan:

- $r_{y_{2-3}}$: Koefisien korelasi parsial antara variabel kriterium (y) dan variabel prediktor x_2 dengan dikontrol variabel prediktor x_3
- r_{2-3} : Koefisien korelasi *product moment* antara variabel kriterium (y) dan variabel prediktor x_2 dengan dikontrol oleh variabel prediktor x_3
- r_{y_2} : Koefisien korelasi *product moment* antara variabel y dan variabel x_2
- r_{y_3} : Koefisien korelasi *product moment* antara variabel y dan variabel x_3

¹¹⁶ Burhan Nurgiyantoro *et al.*, *Statistik Terapan : Untuk Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2002, hal.150-151.

$$r_{y_{3-1}} = \frac{r_{y_3} - (r_{y_1})(r_{31})}{\sqrt{(1-r_{y_1}^2)(1-r_{31}^2)}}$$

Keterangan:

$r_{y_{3-1}}$: Koefisien korelasi parsial antara variabel kriterium (y) dan variabel prediktor x_3 dengan dikontrol variabel prediktor x_1

r_{3-1} : Koefisien korelasi *product moment* antara variabel kriterium (y) dan variabel prediktor x_3 dengan dikontrol oleh variabel prediktor x_1

r_{y_3} : Koefisien korelasi *product moment* antara variabel y dan variabel x_3

r_{y_1} : Koefisien korelasi *product moment* antara variabel y dan variabel x_1

Untuk menguji signifikansi koefisien korelasi parsial digunakan rumus sebagai berikut:

$$t = \frac{r_{y_{123}}}{\sqrt{(1-r_{y_{123}}^2) : (N-3)}}$$

Kemudian nilai t dicocokkan dengan nilai t tabel, dengan $df = (N-3)$, taraf signifikansi 5 % dan pada pengujian dua ekor. Menggunakan satu ekor karena hipotesis yang akan diuji telah menunjukkan arah¹¹⁷. Pada perhitungan uji korelasi parsial ini dibantu dengan komputer program SPSS.

Uji statistik analisis regresi ganda untuk menguji hipotesis. Pada umumnya pemakaian model-model analisis statistik untuk menguji data penelitian didasarkan pada asumsi-asumsi tertentu. Sedangkan asumsi-asumsi dari analisis regresi adalah:

¹¹⁷ Ferguson, *Statistical Analysis in Psychology and Education*, Tokyo : Mc Graw Hill, 1981, hal.485.

1. Asumsi *random sampling*, yaitu bahwa cuplikan dibentuk menurut prinsip pencuplikan rambang/acak/random atau secara universal
2. Asumsi *normal distribution of the dependent variables*, yaitu bahwa ubahan taut y mengikuti sebaran normal
3. Asumsi *linearity of correlation*, yaitu bahwa antara semua x dengan y adalah linear
4. Asumsi *non colinearity of the independent variables*, yaitu bahwa antara sesama ubahan bebas x adalah $r > 0,080$.¹¹⁸

Apabila asumsi-asumsi diatas telah terpenuhi, maka penggunaan model analisis regresi dapat dilakukan.

- I. Persamaan garis regresi tiga prediktor adalah:

$$y = a_1x + a_2x_2 + a_3x_3 + K$$

Dalam skor deviasi persamaan ini dapat dituliskan:

$$y = a_1x + a_2x_2 + a_3x_3$$

Persamaan simultan untuk menemukan a_1 , a_2 dan a_3 adalah sebagai berikut:

$$\sum xy_1 = a_1 \sum x_1^2 + a_2 \sum x_1x_2$$

$$\sum x_2y = a_1 \sum x_1x_2 + x_1x_2 + a_2 \sum x_2^2$$

¹¹⁸ Sutrisno Hadi, *Analisis Regresi*, Yogyakarta : Andi Offset, 1994, hal.26.

Dengan:

$$\sum X_1^2 = \sum X_1^2 - \frac{(\sum X_1)^2}{N}$$

$$\sum X_2^2 = \sum X_2^2 - \frac{(\sum X_2)^2}{N}$$

$$\sum X_3^2 = \sum X_3^2 - \frac{(\sum X_3)^2}{N}$$

$$\sum Y^2 = \sum Y^2 - \frac{(\sum Y)^2}{N}$$

$$\sum X_1 X_2 X_3^2 = \sum X_1 X_2 X_3^2 - \frac{(\sum X_1)(\sum X_2)(\sum X_3)}{N}$$

Persamaan garis regresi dalam skor deviasi yang kita cari adalah:

$$y = X_1 X_2 + a_2 X_2 + a_3 X_3$$

$$y - y = a_1 - (X_1 - X_1) + a_2 (X_2 - X_2) + a_3 (X_3 - X_3)$$

$$y = a_1 (X_1 - X_1) + a_2 (X_2 - X_2) + a_3 (X_3 - X_3) + y$$

Dengan:

$$x_1 = \frac{\sum x_1}{N}, \quad x_2 = \frac{\sum x_2}{N}, \quad x_3 = \frac{\sum x_3}{N} \quad \text{serta} \quad y = \frac{\sum y}{N}$$

II. Koefisien korelasi antara kriterium y dengan prediktor x_1 , prediktor x_2 dan prediktor x_3 dapat diperoleh melalui rumus sebagai berikut:

$$R_{y_{(1,2,3)}} = \sqrt{1 - \left[1 - \left(1 - r_{y_{1-2}}^2 \right) \left(1 - r_{y_{2-3}}^2 \right) \left(1 - r_{y_{3-1}}^2 \right) \right]}$$

Keterangan:

$R_{y_{(1,2,3)}}$ = Koefisien korelasi y dan x_1 , x_2 dan x_3

$r_{y_{1-2}}$ = Koefisien korelasi antara y dan x_1 dengan dikontrol variabel x_2

$r_{y_{2-3}}$ = Koefisien korelasi antara y dan x_2 dengan dikontrol variabel x_1

$r_{y_{3-1}}$ = Koefisien korelasi antara y dan x_3 dengan dikontrol variabel x_3

- III. Untuk mencapai apakah $r_{y_{(1,2,3)}}$ tersebut signifikan atau tidak dilakukan analisis regresi. Dari analisis regresi akan ditemukan harga F garis regresi yang kemudian dapat diuji apakah harga F regresi adalah sebagai berikut:

$$F_{reg} = \frac{R^2(N - m - 1)}{M(1 - R^2)}$$

Keterangan:

F_{reg} = Harga F garis regresi

N = Cacah kasus

M = Cacah prediktor

R = Koefisien korelasi antara kriterium dengan prediktor

Selanjutnya untuk menentukan derajat kebebasan (db) untuk menguji signifikansi harga F regresi adalah m lawan $(N - m - 1)$ dengan taraf signifikansi 5%:

- Jika $F_{reg} > F_{tab}$ 5 %, maka korelasi antara kriterium dengan prediktor-prediktor adalah signifikan
- Jika $F_{reg} < F_{tab}$ 5 %, maka korelasi antara kriterium dengan prediktor-prediktor adalah tidak signifikan.

Tabel I.9
Rangkuman Analisis Regresi / Anova

Sumber Variasi	Db	Sum Of Square	Mean Square	F
Regresi (Reg)	M	$R^2 (\sum y^2)$	$\frac{R^2 (\sum y^2)}{m}$	$\frac{RK_{reg}}{RK_{res}}$
Residu (Res)	$N - m - 1$	$\frac{(1 - R^2) (\sum y^2)}{N - m - 1}$	$\frac{(1 - R^2) (\sum y^2)}{N - m - 1}$	
Total	$N - 1$	$\sum y^2$		

Keterangan:

F_{reg} = Harga F garis regresi

N = Cacah Khusus

M = Cacah prediktor

R = Koefisien korelasi antara kriterium dan prediktor

Db = Derajat Kebebasan

JK = Jumlah kuadrat

RK = Rerata Kuadrat

IV. Kemudian dari tabel anova diatas, berikutnya untuk melihat sumbangan variabel-variabel bebas terhadap kriterium lihat pada *coefficients* (beta). Pada uji regresi ganda ini juga dibantu dengan komputer program SPSS versi 10.0.

BAB II

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

II.1. Gambaran Umum Kondisi Pengelolaan Loan IBRD-3726

Berdasarkan *Loan Agreement* Nomor : 3726-IND tanggal 14 Mei 1994 antara Pemerintah Republik Indonesia dengan *International Bank of Reconstruction And Development (IBRD)* telah disetujui pemberian pinjaman untuk membantu Pemerintah dalam rangka membiayai *Surabaya Urban Development Project*. Dengan *Loan Agreement* tersebut Pemerintah dan Pemerintah Kota Surabaya sepakat mengadakan Perjanjian Penerusan Pinjaman antara Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Surabaya Nomor SLA-764/DP3/1994 tanggal 14 September 1994. Sesuai dengan pasal-pasal yang ada dalam perjanjian penerusan pinjaman, beberapa klausula kesepakatan adalah sebagai berikut:

- *Plafond Loan Agreement* : US\$ 175.000.000,-
- *Plafond Sud Loan Agreement* : US\$ 68.300.000,-
- *Jangka Waktu (Grass Period)* : 21 tahun per 6 tahun
- *Tanggal Pembayaran* : 30 X angsuran setiap 15 Maret dan 15 September
- *Tanggal Jatuh Tempo I dan Terakhir* : 15 Maret 2000 dan 15 September 2014
- *Total Realisasi Penarikan Pinjaman (Pokok Pinjaman)* : US\$ 33.932.949.60 equivalen Rp 161.292.866.426,30
- *Suku Bunga* : SBI tidak lebih dari 14%, tergantung rata-rata tingkat suku bunga SBI jangka 3 bulanan selama 6 bulan
- *Commitment Charge* : 0,75 % per tahun

- Jasa Perbankan : 0,25 % per tahun
- Denda : 2 % per tahun diatas tingkat bunga

Sampai dengan jatuh tempo tanggal 15 Maret 2006 pembayaran kewajiban yang telah dilakukan Pemerintah Kota Surabaya untuk Loan IBRD-3726 tergambar dalam tabel dibawah ini.

Tabel II.1
Pembayaran Kewajiban Loan IBRD-3726 (Dalam Miliar Rupiah)

Kewajiban	Jumlah	Telah Dibayar s/d Maret 2006	Prediksi Sisa Kewajiban s/d Tahun 2014
Hutang Pokok	161.292.866.425,23	68.126.505.660,01	93.166.360.765,22
Bunga*	185.925.413.307,90	126.344.003.272,12	59.581.410.035,78
Jasa Bank	3.677.096.126,83	2.613.142.377,53	1.063.953.749,30
Biaya Komitmen	2.882.058.863,66	2.882.058.863,66	0,00
Jumlah	363.777.434.723,62	199.965.710.173,32	153.811.724.550,30

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Surabaya

Prediksi sisa kewajiban bunga sampai dengan tahun 2014 perhitungannya menggunakan tingkat bunga maksimal sesuai perjanjian pinjaman sebesar 14 % per tahun.

II.2. Deskripsi Surabaya Urban Development Project (SUDP)

SUDP adalah proyek yang ditujukan untuk mengintegrasikan pembangunan infrastruktur perkotaan dan perbaikan kondisi lingkungan di Surabaya. Berdasarkan dokumen *World Bank* SUDP tersebut meliputi:

- (a) *Urban transport and traffic management;*
- (b) *Water distribution system improvements and expansion;*
- (c) *Storm drainage;*
- (d) *Human waste collection and disposal;*

- (e) *Solid waste*;
- (f) *Kampung improvement*;
- (g) *Serviced, securely-tenured plots for resettlement*;
- (h) *Institutional development and capacity-building support*.

Komponen-komponennya, yaitu:

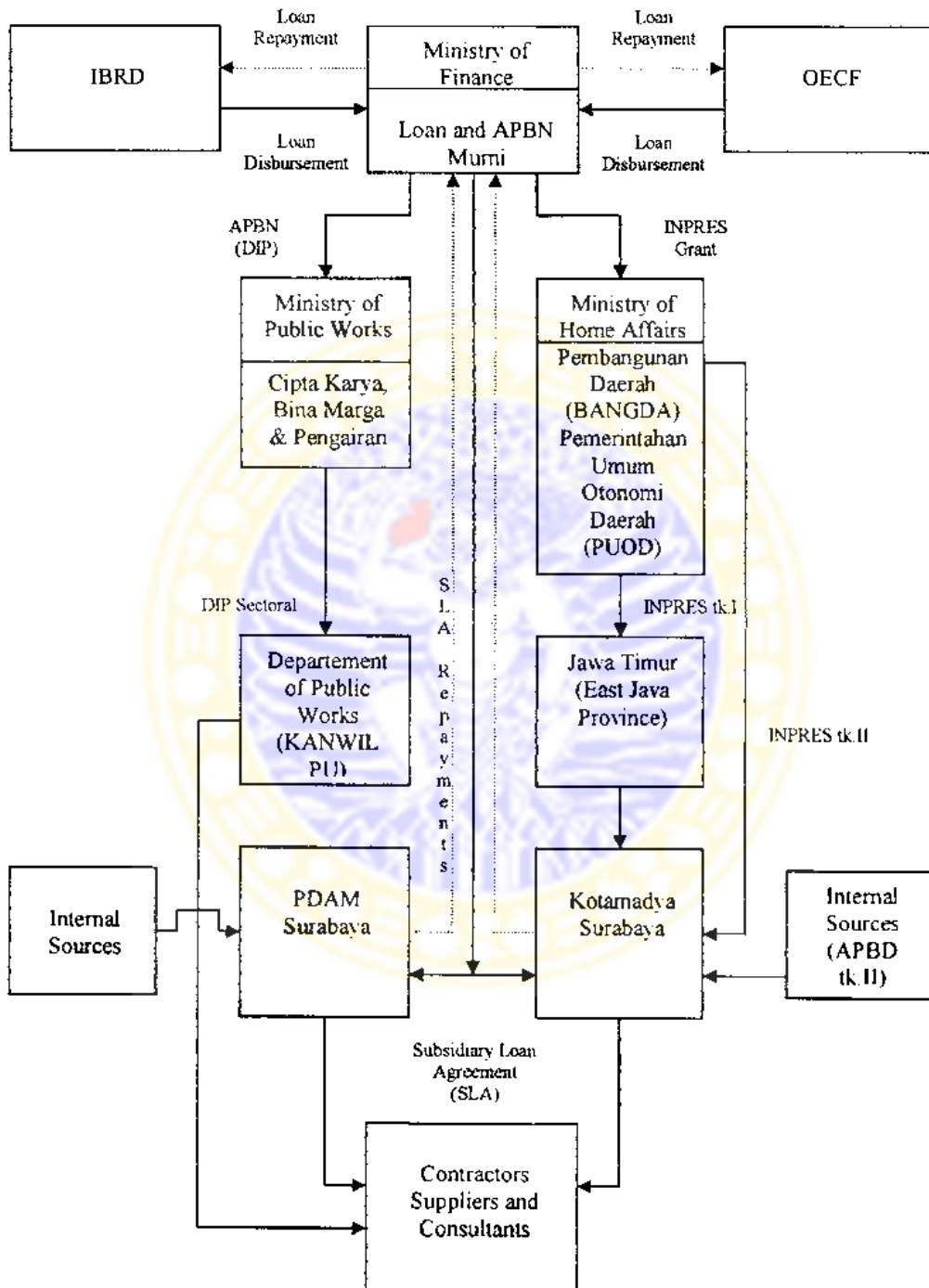
- perbaikan dan pembangunan jalan raya sepanjang 200 km;
- 5 buah skema pengelolaan lalu lintas;
- rehabilitasi jalur pipa pengairan sepanjang 92 km;
- penyediaan pipa air untuk irigasi sepanjang 1020 km;
- 146.000 buah saluran air;
- penyediaan transmisi dan pipa air primer;
- 2 pangkalan pompa air dan bendungan;
- peningkatan sistem komputer dan program pencegahan kebocoran air;
- penyediaan saluran air yang telah diperbaharui sepanjang 143 km;
- pembangunan dan perbaikan sarana pembuangan sampah (TPA atau TPS) di 197 tempat;
- 27 truk kontainer beserta 336 buah kontainer;
- 14 truk pemadat sampah dan 1033 tempat sampah;
- 350 gerobak pengangkut sampah;
- 11 new or overhauled-landfill equipment;
- pembangunan saluran got sepanjang 47 km;
- 6200 rumah penghubung;
- 2 buah stasiun pompa air;
- satu buah pabrik penyaringan(pemurnian) air;
- satu buah pabrik daur ulang dan pengelolaan sampah serta 4 buah kendaraan pengangkut sampah;

- perbaikan kampung seluas 1200 ha;
- 30000 tangki septik;
- perbaikan dapur dan kamar mandi sebanyak 1500 buah;
- penyempurnaan sertifikasi tanah dan/atau bangunan sebanyak 110000 rumah/tanah;
- 200000 IMB di daerah perkampungan;
- program pengembangan masyarakat pada sekurang-kurangnya 72 kampung dalam upaya membangkitkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, pengembangan peran wanita dan UKM serta meningkatkan kepedulian terhadap urusan kesehatan dan kesejahteraan;
- pengembangan dan pemeliharaan jalan, drainase, pengairan, pembuangan sampah dan sanitasi;
- pengembangan kualitas SDM untuk memperkuat RMS dan PDAM;
- pelatihan untuk 3000 petugas pemerintahan dan masyarakat serta warga kota;
- bantuan teknis bagi pengelolaan penduduk, disain dan pengawasan, masterplan, pengembangan dan pelatihan SDM dan pengelolaan transportasi;
- pengawasan dan pengelolaan manajemen dalam rangka memastikan kemudahan proyek tercapai terutama penyediaan tempat tinggal bagi tunawisma, serta pengawasan kawasan rawan banjir dan rawan kekurangan air;

Berdasarkan *Loan Agreement* Nomor : 3726-IND tanggal 14 Mei 1994 antara Pemerintah Indonesia dengan IBRD yang kemudian diteruskan berdasarkan SLA-764/DP3/1994 tanggal 14 September 1994 kepada Pemerintah Kota Surabaya, maka realisasi proses penyaluran dana pinjaman dapat tergambarkan berdasarkan bagan berikut.

Bagan II.1

Aliran Dana SUDP



II.3. Prosedur Pinjaman Daerah

Setiap pinjaman daerah dilakukan dengan persetujuan DPRD. Berdasarkan persetujuan DPRD, daerah mengajukan pinjaman kepada pihak calon pemberi pinjaman. Setiap pinjaman daerah dituangkan dalam surat perjanjian antara daerah dengan pemberi pinjaman. Perjanjian pinjaman tersebut ditandatangani atas nama daerah oleh Kepala Daerah dan pemberi pinjaman. Agar setiap orang dapat mengetahuinya setiap perjanjian pinjaman dilakukan oleh daerah diumumkan dalam Lembaran Daerah. Pinjaman jangka pendek untuk membantu kelancaran arus kas dikecualikan dari ketentuan di atas. Persetujuan DPRD terhadap usulan Pemerintah Daerah untuk mendapatkan pinjaman dilakukan secara seksama dengan mempertimbangkan antara lain kemampuan daerah untuk membayar batas maksimum pinjaman, penggunaan dana pinjaman, angsuran pokok pinjaman, jangka waktu pinjaman, masa tenggang pengembalian dan tingkat bunga.

Untuk memperoleh pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Daerah mengajukan usulan kepada Menteri Keuangan disertai surat persetujuan DPRD, studi kelayakan dan dokumen-dokumen yang lain diperlukan untuk dilakukan evaluasi. Perjanjian pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Pusat ditandatangani oleh Menteri Keuangan dan Kepala Daerah.

Pinjaman daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui pemerintah pusat. Untuk memperoleh Pinjaman Daerah bersumber dari luar negeri, daerah mengajukan usulan pinjaman kepada Pemerintah Pusat disertai persetujuan DPRD, studi kelayakan dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan. Tahapan usulan pinjaman daerah bersumber dari luar negeri, Pemerintah Pusat

melakukan evaluasi dari berbagai aspek untuk dapat tidaknya menyetujui usulan tersebut.

Apabila Pemerintah Pusat telah memberikan persetujuannya, maka Pemerintah Daerah mengadakan perundingan-perundingan dengan calon pemberi pinjaman yang hasilnya dilaporkan untuk mendapatkan persetujuan Pemerintah Pusat. Daerah dapat melakukan Pinjaman Daerah yang bersumber dari luar negeri setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat. Perjanjian Pinjaman Daerah yang bersumber dari luar negeri ditandatangani oleh Kepala Daerah dengan pemberi pinjaman luar negeri. Dokumen-dokumen lain adalah dokumen-dokumen yang antara lain mencantumkan perhitungan tentang kemampuan daerah dalam memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman. Pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dan instansi terkait melakukan evaluasi atas usul tiap-tiap pinjaman yang diajukan oleh daerah. Evaluasi tersebut antara lain meliputi kesesuaian jenis proyek yang akan dibiayai dengan dana pinjaman dan kemampuan keuangan daerah dalam melakukan pinjaman serta kemampuan keuangan daerah untuk membayar kembali pinjaman tersebut. Selanjutnya Menteri Keuangan menyampaikan hasil evaluasi mengenai pengajuan tiap-tiap pinjaman luar negeri kepada daerah yang bersangkutan.

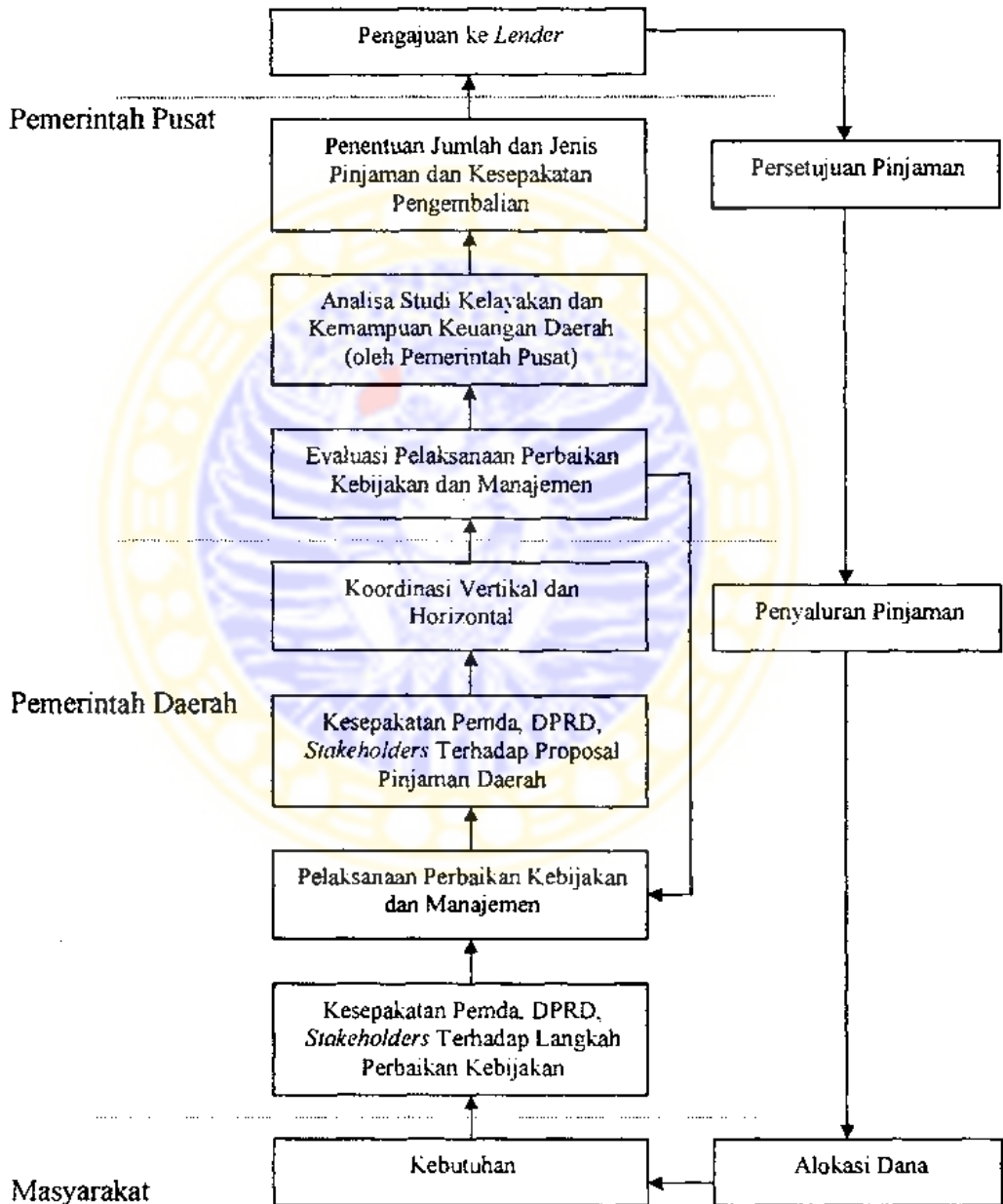
Penyampaian hasil evaluasi tersebut dapat berisi pemberian persetujuan atau tidak memberi persetujuan terhadap usul pinjaman tersebut. dengan ketentuan ini maka daerah tidak dapat melakukan pinjaman yang bersumber dari luar negeri,

apabila tidak memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah Pusat.

Berikut akan disajikan bagan prosedur pinjaman luar negeri Pemerintah Daerah.

Bagan II.2

Prosedur Pinjaman Luar Negeri Pemerintah Daerah



II.4. Pembayaran Kembali Pinjaman

Dalam hal pembayaran kembali Pinjaman Daerah ini, maka tanggung jawab pengembalian itu ada pada daerah sesuai dengan perjanjian pinjaman yang akan dibayar melalui APBD. Pinjaman daerah yang bersumber dari luar negeri oleh daerah dilakukan dalam mata uang sesuai yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman luar negeri.

Dalam hal daerah tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran atas pinjaman daerah dari Pemerintah Pusat, maka Pemerintah Pusat memperhitungkan kewajiban tersebut dengan Dana Alokasi Umum kepada Daerah. Dalam hal daerah tidak memenuhi kewajiban pembayaran Pinjaman Daerah yang bersumber dari luar negeri, maka kewajiban tersebut diselesaikan sesuai perjanjian pinjaman.

Kewajiban atas pinjaman yang jatuh tempo meliputi seluruh angsuran pokok pinjaman ditambah dengan biaya pinjaman seperti bunga pinjaman, biaya bank, dan biaya komitmen Dengan menempatkan kewajiban daerah atas pinjaman daerah sebagai salah satu prioritas dan dianggarkan dalam pengeluaran APBD, maka pemenuhan kewajiban tersebut dimaksudkan mempunyai kedudukan yang sejajar dengan pengeluaran lain yang harus diprioritaskan daerah, misalnya pengeluaran yang apabila tidak dilakukan dapat menimbulkan kerawanan sosial.

Dengan demikian pemenuhan kewajiban atas pinjaman daerah tidak dapat dikesampingkan apabila target penerimaan APBD tidak tercapai. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran dan pembayaran kembali pinjaman daerah yang bersumber dari luar negeri ditetapkan oleh Menteri Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tidak memenuhi kewajiban pembayaran atas pinjaman daerah adalah tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran angsuran pokok dan biaya pinjaman seperti pinjaman bunga, biaya bank dan biaya komitmen sesuai dengan jadwal waktu dan jumlah yang telah ditetapkan dalam perjanjian pinjaman. Maka sesuai dengan ketentuan, semua kewajiban pembayaran kembali pinjaman daerah menjadi tanggung jawab daerah. Pemerintah Pusat tidak menanggung pembayaran kembali pinjaman daerah yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab daerah. Semua penerimaan dan kewajiban dalam rangka Pinjaman Daerah dicantumkan dalam APBD dan dibekukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintah daerah (SAKPD). Keterangan tentang semua pinjaman jangka panjang dituangkan dalam lampiran dari dokumen APBD. Kepala Daerah melaporkan kepada DPRD secara berkala dengan tembusan kepada Menteri Keuangan tentang perkembangan jumlah kewajiban pinjaman daerah dan tentang pelaksanaan dalam rangka memenuhi kewajiban pinjaman yang telah jatuh tempo.

Bila belum ada Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, maka pemerintah daerah dapat melakukan pembukuan dalam rangka pinjaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lampiran tersebut merupakan bagian dari dokumen APBD sehingga menjadi dokumen yang dapat diperoleh masyarakat. Laporan Kepala Daerah kepada DPRD yang dimaksud dalam ayat ini dilakukan dalam rangka laporan pertanggung jawaban keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II.5. Deskripsi Badan Pengelolaan Keuangan

II.5.1. Visi dan Misi

Visi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah **“Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Profesional, Transparan dan Akuntabel”** menunjang Visi Kota Surabaya yang ingin mewujudkan Surabaya menjadi kota yang cerdas dalam merespon peluang dan tuntutan global dengan mengedepankan unsur profesionalitas di semua lini serta transparansi dan akuntabilitas untuk memenuhi tuntutan masyarakat global.

Misi Badan Pengelolaan Keuangan **“Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Efisien Dan Efektif”** berkontribusi menunjang penyelesaian permasalahan di Kota Surabaya **“Penyelesaian Pemerintahan Yang Kurang Efisien”** serta membantu mewujudkan misi Kota Surabaya yaitu **“Mewujudkan Pemerintahan Yang Demokratis, Berkeadilan, Transparan Dan Akuntabel”** yang menuntut adanya Sumber Daya Manusia yang kompeten, manajemen pemerintahan dan administrasi yang baik.

II.5.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya No.5 Tahun 2006 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Surabaya, maka Badan Pengelolaan Keuangan mempunyai tugas untuk melaksanakan kewenangan Daerah serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah
- b. Penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan
- d. Pengelolaan ketatausahaan Badan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan terbagi atas Bidang Pengelolaan Anggaran, Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi serta Bidang Kas dan Akuntansi.

II.5.2.1. Bidang Pengelolaan Anggaran

Bidang Pengelolaan Anggaran terbagi dalam Sub Bidang Pengelolaan Penerimaan dan Sub Bidang Pengelolaan Pembelanjaan. Bidang Pengelolaan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang pengelolaan anggaran. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Pengelolaan Anggaran mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengelolaan anggaran
- b. Pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang pengelolaan anggaran
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pengelolaan anggaran
- d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pengelolaan anggaran
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan anggaran
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya

II.5.2.2. Bidang Perbendaharaan Dan Verifikasi

Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi terbagi dalam Sub Bidang Perbendaharaan dan Sub Bidang Verifikasi. Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang perbendaharaan dan verifikasi. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perbendaharaan dan verifikasi
- b. Pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perbendaharaan dan verifikasi
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang perbendaharaan dan verifikasi
- d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang perbendaharaan dan verifikasi
- e. Pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya

II.5.2.3. Bidang Kas Dan Akuntansi

Bidang Kas dan Akuntansi terbagi dalam Sub Bidang Akuntansi dan Sub Bidang Kas. Bidang Kas dan Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang kas dan akuntansi. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Kas dan Akuntansi mempunyai fungsi:

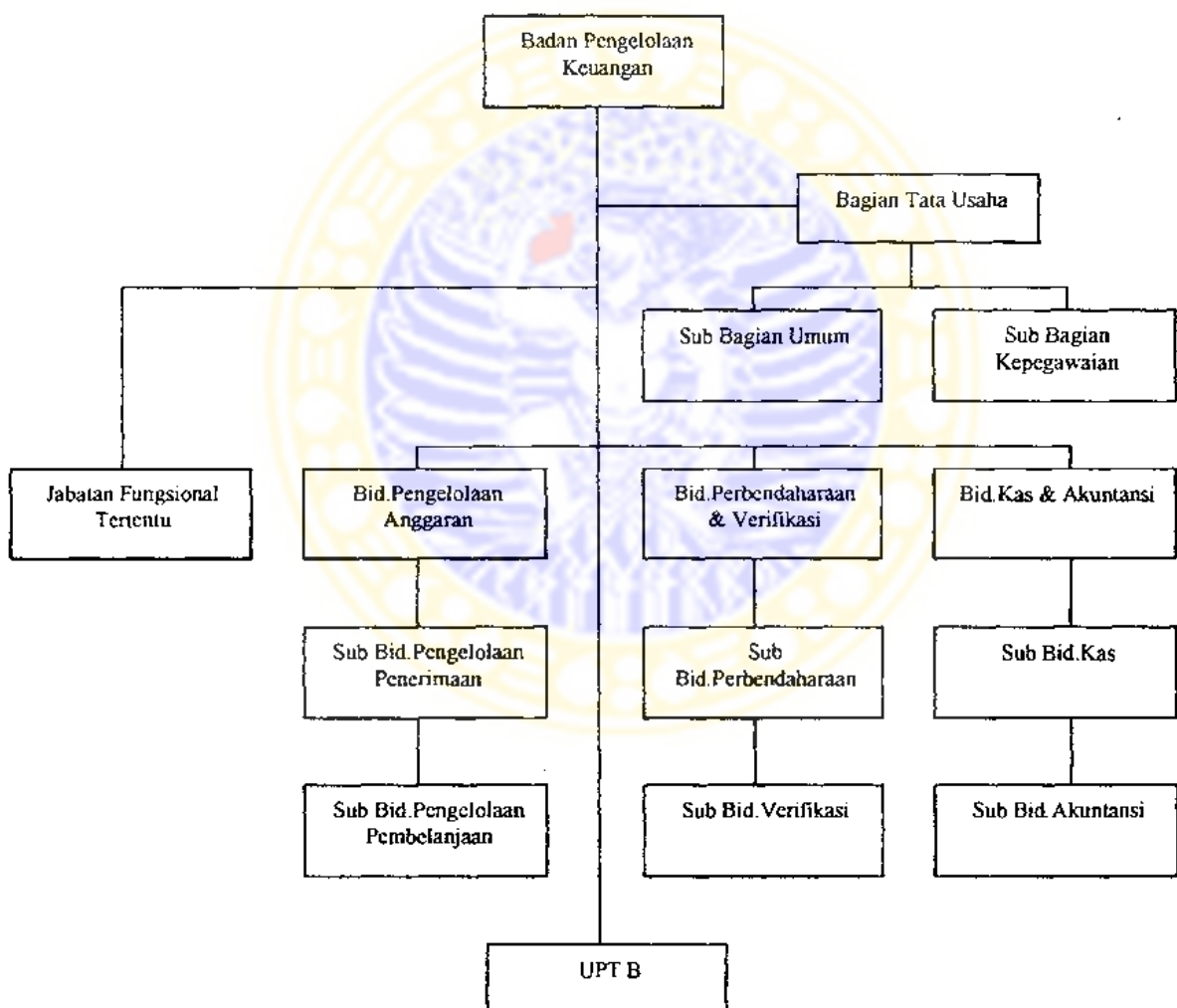
- a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kas dan akuntansi
- b. Pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kas dan akuntansi
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang kas dan akuntansi

- d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang kas dan akuntansi
- e. Pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya

II.5.3. Struktur Organisasi

Bagan II.3

Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya



II.5.4. Susunan Kepegawaian Dan Perlengkapan

Badan Pengelolaan Keuangan memiliki 1 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, 1 Kepala Bagian, 3 Kepala Bidang, 2 Kepala Sub Bagian dan 6 Kepala Sub Bidang. Adapun secara rinci jumlah personil terlihat dalam daftar tabel berikut:

Tabel II.2
Komposisi Dan Jumlah Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan
(per 15 Mei 2006)

No	Status Kepegawaian / Pendidikan Akhir	KA BPK	UNIT KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN								Total
			Bid. Pengelolaan Anggaran		Bid. Perbendaharaan & Verifikasi		Bid. Kas & Akuntansi		Bag. Tata Usaha		
			Sub. Bidang. Penyerahan	Sub. Bidang. Pembela njaan	Sub. Bidang. Pembendaharaan	Sub. Bidang. Verifikasi	Sub. Bidang. Kas	Sub. Bidang. Akuntansi	Sub. Bidang. Umum	Sub. Bidang. Kepegawaian	
A	PNS										
1	S2	1	1	1	1	-	2	-	1	1	8
2	S1		3	3	16	6	6	6	5	1	46
3	D3		-	-	2	-	-	-	-	-	2
4	SLTA		-	2	22	4	2	4	1	1	36
5	SLTP		-	-	1	-	4	-	1	-	6
B	HONDA										
1	S2		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	S1		-	3	5	1	1	1	1	1	13
3	D3		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	SLTA		-	-	5	2	1	3	2	-	13
5	SLTP		-	-	-	1	-	-	2	-	3
	Jumlah A+B	1	4	9	52	14	16	14	13	4	127

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Badan Pengelolaan Keuangan Surabaya

BAB III

PENYAJIAN DATA

Pada bab ini akan disajikan data yang diperoleh dari lapangan. Data tersebut diperoleh melalui penyebaran kuisisioner kepada 30 responden. Secara fungsional, penyajian data ini digunakan untuk melihat gejala masing-masing variabel sekaligus sebagai dasar untuk mengkorelasikan variabel penelitian. Seperti yang telah dijelaskan dalam bab terdahulu bahwa penelitian ini terdiri dari tiga variabel pengaruh yakni kemampuan aparat (variabel x_1), sistem informasi keuangan daerah (variabel x_2) dan kemampuan keuangan daerah (variabel x_3) serta satu variabel terpengaruh yakni efektivitas manajemen pinjaman daerah (variabel y). Adapun uraian-uraian dari masing-masing variabel tersebut akan disajikan dalam bentuk tabel berdasarkan indikator dari masing-masing variabel yang bersangkutan.

III.1. Variabel Pengaruh (X)

III.1.1. Variabel Kemampuan Aparat (Variabel X1)

III.1.1.1. Tingkat Kesesuaian Pendidikan Dengan Pekerjaan

Tabel III.1

Kesesuaian Pendidikan Dengan Pekerjaan/Jabatan

Jawaban Item	Frekuensi	Persentase
Tidak Sesuai	-	-
Kurang Sesuai	5	16,7 %
Cukup Sesuai	16	53,3 %
Sangat Sesuai	9	30 %
Total	30	100 %

Sumber data : Kuisisioner no.1

Dari tabel III.1 diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 53,3 % responden menyatakan pekerjaan yang dijalankannya selama ini dinilai cukup sesuai dengan pendidikan yang dimiliki. Sebanyak 30 % responden menyatakan tingkat pendidikan yang ditempuh sangat sesuai dengan pekerjaan saat ini. Selain itu sebanyak 16,7 % responden menyatakan tingkat pendidikan yang ditempuh kurang sesuai dengan pekerjaan. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa hampir sebagian besar aparat menganggap pekerjaan yang dijalani saat ini dirasa cukup sesuai dengan tingkat pendidikan yang dimilikinya.

III.1.1.2. Tingkat Pendidikan Non Formal Aparat

Tabel III.2
Frekuensi Pendidikan Non Formal Yang Pernah Diikuti Per Tahun

Jawaban Item	Frekuensi	Persentase
Tidak Pernah	5	16,7 %
1-4 kali	18	60 %
5-8 kali	6	20 %
≥ 9 kali	1	3,3 %
Total	30	100 %

Sumber data : Kuisisioner no.2

Dari tabel III.2 diatas dapat dilihat bahwa 60 % responden mengikuti pendidikan non formal dalam rangka pembinaan dan pengembangan sebanyak 1-4 kali dalam setahun. Sebanyak 20 % responden mengikuti pendidikan non formal sebanyak 5-8 kali dalam setahun. Selanjutnya 16,7 % responden tidak pernah mengikuti pendidikan non formal. Selain itu sebanyak 3,3 % menyatakan mengikuti pendidikan non formal sebanyak lebih dari 9 kali dalam setahun. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hampir sebagian besar aparat mengikuti pendidikan non formal sebanyak 1-4 kali dalam setahun.

Tabel III.3
Tingkat Kesesuaian Pendidikan Non Formal Dengan Pekerjaan

Jawaban Item	Frekuensi	Persentase
Tidak Sesuai	2	6,7 %
Kurang Sesuai	6	20 %
Cukup Sesuai	15	50 %
Sangat Sesuai	7	23,3 %
Total	30	100 %

Sumber data : Kuisisioner no.3

Berdasarkan tabel III.3 diatas dapat dilihat bahwa 50 % responden menyatakan materi yang diberikan dalam pendidikan non formal tersebut cukup sesuai dengan bidang tugas pekerjaan yang dijalani. Sebanyak 23,3 % responden menyatakan materi yang diberikan dalam pendidikan non formal tersebut sangat sesuai dengan bidang tugas pekerjaan yang dijalani. Sebanyak 20 % responden menyatakan materi yang diberikan dalam pendidikan non formal kurang sesuai dengan bidang tugas yang dijalani. Selain itu, sebanyak 6,7 % responden menyatakan materi pendidikan non formal tidak sesuai. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar aparat menyatakan materi yang diberikan dalam pendidikan non formal tersebut cukup sesuai dengan bidang tugas pekerjaan yang dijalani.

III.1.1.3. Tingkat Kesesuaian Melaksanakan Tugas Dengan Peraturan

Tabel III.4
Tingkat Kesesuaian Melaksanakan Pekerjaan Dengan Standar Operasional Prosedur Yang Berlaku

Jawaban Item	Frekuensi	Persentase
Tidak Pernah	-	-
Kadang-kadang	7	23,3 %

Hampir Selalu	14	46,7 %
Selalu	9	30 %
Total	30	100 %

Sumber data : Kuisisioner no.4

Berdasarkan tabel III.4 diatas dapat diketahui bahwa sebanyak 46,7 % responden menyatakan aparat dalam melaksanakan tugasnya hampir selalu bekerja sesuai dengan *Standar Operasional Prosedur* (SOP). Sebanyak 30 % responden menyatakan aparat selalu bekerja sesuai dengan SOP. Selain itu, sebanyak 23,3 % responden menyatakan kadang-kadang bekerja sesuai dengan SOP. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian aparat menyatakan dalam melaksanakan tugasnya hampir selalu bekerja sesuai dengan *Standar Operasional Prosedur* (SOP) yang berlaku.

III.1.1.4. Tingkat Pemahaman Pada Standar Kerja Yang Ditetapkan

Tabel III.5

Tingkat Pemahaman Pada Standar Operasional Prosedur Yang Ditetapkan

Jawaban Item	Frekuensi	Persentase
Tidak Memahami	-	-
Kurang Memahami	7	23,3 %
Cukup Memahami	16	53,3 %
Sangat Memahami	7	23,3 %
Total	30	100 %

Sumber data : Kuisisioner no.5

Berdasarkan tabel III.5 diatas dapat diketahui bahwa sebanyak 53,3 % responden menyatakan cukup memahami *Standar Operasional Prosedur* (SOP) yang ditetapkan. Sebanyak 23,3 % responden menyatakan sangat memahami SOP yang berlaku. Selain itu, sebanyak 23,3 % responden menyatakan kurang

memahami SOP yang berlaku. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hampir sebagian besar aparat menyatakan cukup memahami *Standar Operasional Prosedur* (SOP) yang berlaku tersebut.

Tabel III.6
Tingkat Kesesuaian Pekerjaan Dengan SOP

Jawaban Item	Frekuensi	Persentase
Tidak Sesuai	-	-
Kurang Sesuai	7	23,3 %
Cukup Sesuai	17	56,7 %
Sangat Sesuai	6	20 %
Total	30	100 %

Sumber data : Kuisisioner no.6

Berdasarkan tabel III.6 diatas dapat diketahui bahwa sebanyak 56,7 % responden menyatakan sangat sesuai dengan *Standar Operasional Prosedur* (SOP) yang berlaku. Sebanyak 23,3 % responden menyatakan kurang sesuai dengan SOP yang berlaku. Selain itu, sebanyak 20 % responden menyatakan sangat sesuai dengan SOP yang berlaku. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar aparat cukup sesuai dengan pekerjaan dengan *Standar Operasional Prosedur* (SOP) yang berlaku.

III.1.2. Variabel Sistem Informasi Keuangan Daerah (Variabel X2)

III.1.2.1. Tingkat Evaluasi Kegunaan Sistem Yang Dirasakan

Tabel III.7
Frekuensi Penggunaan Sistem Informasi Dalam Mendukung Kinerja

Jawaban Item	Frekuensi	Persentase
Tidak Pemah	-	-
Jarang	5	16,7 %
Cukup Sering	14	46,7 %

Selalu	11	36,7 %
Total	30	100 %

Sumber data : Kuisisioner no.7

Berdasarkan tabel III.7 diatas dapat diketahui bahwa sebanyak 46,7 % responden menyatakan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) cukup sering digunakan dalam mendukung kinerja sehari-hari. Sebanyak 36,7 % responden menyatakan SIKD selalu digunakan dalam mendukung kinerja sehari-hari. Selain itu, sebanyak 16,7 % responden menyatakan SIKD jarang digunakan dalam mendukung kinerja sehari-hari. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) cukup sering digunakan dalam mendukung kinerja sehari-hari.

Tabel III.8
Penyediaan Informasi Sesuai dengan Kebutuhan Kerja

Jawaban Item	Frekuensi	Persentase
Tidak Sesuai	-	-
Kurang Sesuai	4	13,3 %
Cukup Sesuai	19	63,3 %
Sangat Sesuai	7	23,3 %
Total	30	100 %

Sumber data : Kuisisioner no.8

Berdasarkan tabel III.8 diatas dapat diketahui bahwa sebanyak 63,3 % responden menyatakan penyediaan informasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) cukup sesuai dengan kebutuhan kerja. Sebanyak 23,3 % responden lainnya menyatakan penyediaan informasi SIKD sangat sesuai dengan kebutuhan kerja. Selain itu, sebanyak 13,3 % responden lainnya menyatakan penyediaan informasi SIKD kurang sesuai dengan kebutuhan kerja. Dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa sebagian besar aparat menyatakan penyediaan informasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) cukup sesuai dengan kebutuhan kerja.

Tabel III.9
Penyediaan Sistem Informasi Membantu Penyelesaian Kinerja Secara Lebih Cepat

Jawaban Item	Frekuensi	Persentase
Tidak Membantu	-	-
Kurang Membantu	7	23,3 %
Cukup Membantu	12	40 %
Sangat Membantu	11	36,7 %
Total	30	100 %

Sumber data : Kuisisioner no.9

Berdasarkan tabel III.9 diatas dapat diketahui bahwa sebanyak 40 % responden menyatakan bahwa penyediaan informasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) cukup membantu aparat dalam penyelesaian kinerja secara lebih cepat. Sebanyak 36,7 % responden menyatakan penyediaan informasi SIKD sangat membantu aparat dalam penyelesaian kinerja secara lebih cepat. Selain itu, sebanyak 23,3 % responden menyatakan penyediaan informasi SIKD kurang membantu aparat dalam penyelesaian kinerja secara lebih cepat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar aparat menyatakan penyediaan informasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) tersebut cukup membantu penyelesaian kinerja secara lebih cepat.

Tabel III.10
Penyediaan Sistem Informasi Membantu Peningkatan Prestasi Kerja

Jawaban Item	Frekuensi	Persentase
Tidak Berpengaruh	-	-
Kurang Berpengaruh	7	23,3 %

Cukup Berpengaruh	12	40 %
Sangat Berpengaruh	11	36,7 %
Total	30	100 %

Sumber data : Kuisioner no.10

Berdasarkan tabel III.10 diatas dapat diketahui bahwa sebanyak 40 % responden menyatakan penyediaan sistem informasi (SIKD) cukup berpengaruh membantu peningkatan prestasi kerja aparat. Sebanyak 36,7 % responden menyatakan penyediaan sistem informasi sangat berpengaruh. Selain itu sebanyak 23,3 % responden menyatakan penyediaan informasi kurang berpengaruh membantu peningkatan prestasi kerja. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa penyediaan sistem informasi (SIKD) tersebut cukup berpengaruh membantu peningkatan prestasi kerja.

Tabel III.11
Penyediaan Sistem Informasi dalam Memberi Kemampuan Bekerja Lebih Efektif

Jawaban Item	Frekuensi	Persentase
Tidak Berpengaruh	-	-
Kurang Berpengaruh	3	10 %
Cukup Berpengaruh	22	73,3 %
Sangat Berpengaruh	5	16,7 %
Total	30	100 %

Sumber data : Kuisioner no.11

Berdasarkan tabel III.11 diatas dapat diketahui bahwa sebanyak 73,3 % responden menyatakan penyediaan sistem informasi (SIKD) cukup berpengaruh dalam memberi kemampuan bekerja secara lebih efektif. Sebanyak 16,7 % responden menyatakan penyediaan sistem informasi (SIKD) sangat berpengaruh dalam memberi kemampuan bekerja secara lebih efektif. Selain itu sebanyak 10 %

menyatakan penyediaan sistem informasi (SIKD) kurang berpengaruh dalam memberi kemampuan bekerja secara lebih efektif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa penyediaan sistem informasi (SIKD) tersebut cukup berpengaruh dalam memberi kemampuan bekerja secara lebih efektif.

III.1.2.2. Tingkat Evaluasi Kualitas Informasi

III.1.2.2.1. Tingkat Akurasi Informasi

Tabel III.12
Tingkat Akurasi Informasi

Jawaban Item	Frekuensi	Persentase
Tidak Akurat	-	-
Kurang Akurat	5	16,7 %
Cukup Akurat	13	43,3 %
Sangat Akurat	12	40 %
Total	30	100 %

Sumber data : Kuisisioner no.12

Berdasarkan tabel III.12 diatas dapat diketahui bahwa sebanyak 43,3 % responden menyatakan tingkat akurasi informasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) cukup akurat. Sebanyak 40 % responden menyatakan tingkat akurasi informasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) sangat akurat. Selain itu, sebanyak 16,7 % responden menyatakan tingkat akurasi informasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) kurang akurat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menyatakan tingkat akurasi informasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) tersebut cukup akurat.

III.1.2.2.2. Tingkat Ketepatan Waktu Informasi

Tabel III.13
Tingkat Ketepatan Waktu Penyediaan Informasi

Jawaban Item	Frekuensi	Persentase
Tidak Tepat Waktu	-	-
Kurang Tepat Waktu	6	20 %
Cukup Tepat Waktu	18	60 %
Sangat Tepat Waktu	6	20 %
Total	30	100 %

Sumber data : Kuisisioner no.13

Berdasarkan tabel III.13 diatas dapat diketahui bahwa sebanyak 60 % responden menyatakan bahwa tingkat ketepatan waktu penyediaan informasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) cukup tepat waktu pada saat dibutuhkan. Sebanyak 20 % responden menyatakan tingkat ketepatan waktu penyediaan informasi SIKD sangat tepat waktu pada saat dibutuhkan. Selain itu, sebanyak 20 % responden lainnya menyatakan tingkat ketepatan waktu penyediaan informasi SIKD sangat tepat waktu pada saat dibutuhkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa tingkat ketepatan waktu penyediaan informasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) tersebut cukup tepat waktu pada saat dibutuhkan.

III.1.2.2.3. Tingkat Kesesuaian Fungsi Sistem Informasi

Tabel III.14
Tingkat Kesesuaian Fungsi Sistem Informasi Dengan Kebutuhan Manajemen

Jawaban Item	Frekuensi	Persentase
Tidak Sesuai	-	-
Kurang Sesuai	4	13,3 %

Cukup Sesuai	12	40 %
Sangat Sesuai	14	46,7 %
Total	30	100 %

Sumber data : Kuisisioner no.14

Berdasarkan tabel III.14 diatas dapat diketahui bahwa sebanyak 46,7 % responden menyatakan bahwa sistem informasi yang diterapkan sangat sesuai dengan kebutuhan manajemen. Sebanyak 40 % responden menyatakan bahwa sistem informasi yang diterapkan cukup sesuai dengan kebutuhan manajemen. Selain itu, sebanyak 13,3 % responden menyatakan bahwa sistem informasi yang diterapkan kurang sesuai dengan kebutuhan manajemen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menyatakan tingkat kesesuaian fungsi sistem informasi tersebut sangat sesuai dengan kebutuhan manajemen.

III.1.2.2.3. Tingkat Komprehensibilitas Informasi

Tabel III.15
Tingkat Komprehensibilitas Informasi

Jawaban Item	Frekuensi	Persentase
Tidak Dapat Dimengerti	-	-
Kurang Dapat Dimengerti	4	13,3 %
Cukup Dapat Dimengerti	17	56,7 %
Sangat Dapat Dimengerti	9	30 %
Total	30	100 %

Sumber data : Kuisisioner no.15

Berdasarkan tabel III.15 diatas dapat diketahui bahwa sebanyak 56,7 % responden menyatakan tingkat komprehensibilitas informasi yang dihasilkan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) cukup dapat dimengerti. Sebanyak 30 % responden menyatakan tingkat komprehensibilitas informasi yang dihasilkan

SIKD sangat dapat dimengerti. Selain itu, sebanyak 13,3 % responden menyatakan tingkat komprehensibilitas informasi yang dihasilkan SIKD kurang dapat dimengerti. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menyatakan tingkat komprehensibilitas informasi yang dihasilkan cukup dapat dimengerti.

III.1.2.3. Tingkat Evaluasi Kemudahan Penggunaan Sistem Yang Dirasakan

Tabel III.16
Tingkat Kemudahan Mempelajari Cara Mengoperasionalkan Sistem Informasi

Jawaban Item	Frekuensi	Persentase
Tidak Mudah	-	-
Kurang Mudah	4	13,3 %
Cukup Mudah	18	60 %
Sangat Mudah	8	26,7 %
Total	30	100 %

Sumber data : Kuisioner no.16

Berdasarkan tabel III.16 diatas dapat diketahui bahwa sebanyak 60 % responden menyatakan bahwa tingkat kemudahan dalam mempelajari cara mengoperasionalkan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) cukup mudah. Sebanyak 26,7 % responden menyatakan tingkat kemudahan mempelajari cara mengoperasionalkan SIKD sangat mudah. Selain itu, sebanyak 13,3 % responden juga menyatakan tingkat kemudahan mempelajari cara mengoperasionalkan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) kurang mudah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa cukup mudah mempelajari cara mengoperasionalkan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).

Tabel III.17
Tingkat Kemudahan Memerintahkan Sistem Informasi Sesuai Keinginan

Jawaban Item	Frekuensi	Persentase
Tidak Mudah	-	-
Kurang Mudah	5	16,7 %
Cukup Mudah	16	53,3 %
Sangat Mudah	9	30 %
Total	30	100 %

Sumber data : Kuisisioner no.17

Berdasarkan tabel III.17 diatas dapat diketahui bahwa sebanyak 53,3 % reponden menyatakan cukup mudah untuk memerintahkan sistem informasi tersebut sesuai dengan keinginan. Sebanyak 30 % responden menyatakan sangat mudah untuk memerintahkan sistem informasi tersebut sesuai dengan keinginan. Selain itu, sebanyak 16,7 % responden menyatakan kurang mudah memerintahkan sistem informasi sesuai dengan keinginan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menyatakan tingkat kemudahan dalam memerintahkan sistem informasi tersebut sesuai dengan keinginan tergolong cukup mudah.

Tabel III.18
Tingkat Keterampilan Users Dalam Menggunakan Sistem Informasi

Jawaban Item	Frekuensi	Persentase
Tidak Terampil	-	-
Kurang Terampil	6	20 %
Cukup Terampil	19	63,3 %
Sangat Terampil	5	16,7 %
Total	30	100 %

Sumber data : Kuisisioner no.18

Berdasarkan tabel III.18 diatas dapat diketahui bahwa sebanyak 63,3 % responden menyatakan merasa cukup terampil dengan menggunakan sistem informasi tersebut. Sebanyak 20 % responden menyatakan bahwa kurang terampil dalam menggunakan sitem informasi tersebut. Selain itu, sebanyak 16,7 % responden menyatakan bahwa sangat terampil dalam menggunakan sistem informasi tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa tingkat keterampilan responden cukup terampil dalam menggunakan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).

III.1.2.4. Tingkat Evaluasi Kemampuan Menggunakan Komputer

Tabel III.19
Users Terbantu Menyelesaikan Tugas Dengan Adanya Implementasi Sistem Informasi

Jawaban Item	Frekuensi	Persentase
Tidak Membantu	-	-
Kurang Membantu	2	6,7 %
Cukup Membantu	18	60 %
Sangat Membantu	10	33,3 %
Total	30	100 %

Sumber data : Kuisisioner no.19

Berdasarkan tabel III.19 diatas dapat diketahui bahwa sebanyak 60 % responden menyatakan bahwa penerapan sistem informasi tersebut cukup membantu dalam menyelesaikan tugas secara lebih baik. Sebanyak 33,3 % responden menyatakan bahwa penerapan sistem informasi tersebut sangat membantu dalam menyelesaikan tugas secara lebih baik. Selain itu, sebanyak 6,7 % responden menyatakan bahwa penerapan sistem informasi tersebut kurang membantu dalam menyelesaikan tugas secara lebih baik. Dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa cukup terbantu dengan adanya penerapan sistem informasi tersebut dalam menyelesaikan tugas secara lebih baik.

III.1.3. Variabel Kemampuan Keuangan Daerah (Variabel X3)

III.1.3.1. Derajat Desentralisasi Fiskal

III.1.3.1.1. Kontribusi PAD Dengan Total Penerimaan Daerah

Tabel III.20
Kontribusi PAD Dengan Total Penerimaan Daerah

Jawaban Item	Frekuensi	Persentase
Tidak Berpengaruh	-	-
Kurang Berpengaruh	4	13,3 %
Cukup Berpengaruh	8	26,7 %
Sangat Berpengaruh	18	60 %
Total	30	100 %

Sumber data : Kuisisioner no.20

Berdasarkan tabel III.20 diatas dapat diketahui bahwa sebanyak 60 % responden menyatakan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat berpengaruh terhadap total penerimaan daerah. Sebanyak 26,7 % responden menyatakan jumlah penerimaan PAD cukup berpengaruh terhadap total penerimaan daerah. Selain itu, sebanyak 13,3 % responden menyatakan jumlah penerimaan PAD kurang berpengaruh terhadap total penerimaan daerah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian responden menyatakan bahwa kontribusi PAD dengan total penerimaan daerah sangat berpengaruh.

Tabel III.21
Persentase Kontribusi PAD Dengan Total Penerimaan Daerah

Jawaban Item	Frekuensi	Persentase
< 25 %	-	-

25-50 %	7	23,3 %
50-75 %	18	60 %
> 75 %	5	16,7 %
Total	30	100 %

Sumber data : Kuisisioner no.21

Berdasarkan tabel III.21 diatas dapat diketahui bahwa sebanyak 60 % responden menyatakan persentase kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah berkisar antara 50-75 %. Sebanyak 23,3 % responden menyatakan persentase kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah berkisar antara 25-50 %. Selain itu sebanyak 16,7 % responden menyatakan persentase kontribusi PAD terhadap total penerimaan lebih dari 75 %. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian responden menyatakan persentase kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah berkisar antara 50-75 %.

Berdasarkan data sekunder, kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah dari tahun 2001 sampai 2005 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel III.22
Kontribusi PAD Terhadap Total Penerimaan Daerah Surabaya (Dalam Miliar Rupiah)

Uraian	Realisasi				
	2001	2002	2003	2004	2005
Pendapatan Asli Daerah	207.993,33	277.863,17	348.310,01	417.377,01	469.056,14
Total Penerimaan Daerah	764.477,492	920.265.816	1.150.976.096	1.330.350.743	1.361.422.950
Persentase	27,21%	30,19%	30,26%	31,37%	34,45%

Sumber : Bapeko Surabaya (2006)

Berdasarkan tabel III.22 diatas dapat diketahui bahwa persentase kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah terus mengalami peningkatan, yaitu dari 27,21 % (2001), 30,19 % (2002), 30,26 % (2003), 31,37 % (2004) serta

34,45 % (2005). Peningkatan peranan PAD tidak begitu besar namun peningkatan peranan itu tampaknya memperlihatkan adanya kecenderungan yang konsisten dari tahun ke tahun. Jika dibandingkan dengan tabel 1.3 kontribusi PAD terhadap penerimaan daerah berada dibawah Dana Perimbangan sebagai sumber penerimaan daerah yang paling besar. Namun dalam lima tahun belakang ini persentase kontribusi Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat bagi pemasukan daerah perlahan terus mengalami penurunan, yaitu dari 72,78 % (2001), 69,80 % (2002), 66,48 % (2003), 65,95 % (2004) serta 62,48 % (2005). Dilihat dari persentase peningkatan PAD serta penurunan persentase Dana Perimbangan tersebut memperlihatkan kedepan adanya peningkatan peranan PAD akan sangat berpengaruh terhadap total penerimaan daerah.

III.1.3.1.2. Rasio BHPBP Terhadap Total Penerimaan Daerah

Tabel III.23

Rasio Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Terhadap Penerimaan Daerah

Jawaban Item	Frekuensi	Persentase
Tidak Sesuai	-	-
Kurang Sesuai	6	20 %
Cukup Sesuai	9	30 %
Sangat Sesuai	15	50 %
Total	30	100 %

Sumber data : Kuisisioner no.22

Berdasarkan tabel III.23 diatas dapat diketahui bahwa sebanyak 50 % responden menyatakan rasio penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP) sangat sesuai dengan total penerimaan daerah. Sebanyak 30 % responden menyatakan rasio penerimaan BHPBP cukup sesuai dengan total penerimaan daerah. Selain itu, sebanyak 20 % responden menyatakan rasio

penerimaan BHPBP kurang sesuai dengan total penerimaan daerah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa rasio penerimaan BHPBP terhadap total penerimaan daerah sangat sesuai.

Tabel III.24
Persentase Rasio Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Terhadap Penerimaan Daerah

Jawaban Item	Frekuensi	Persentase
< 25 %	2	6,7 %
25-50 %	12	40 %
50-75 %	12	40 %
> 75 %	4	13,3 %
Total	30	100 %

Sumber data : Kuisisioner no.23

Berdasarkan tabel III.24 diatas dapat diketahui bahwa sebanyak 40 % responden menyatakan persentase rasio penerimaan BHPBP terhadap total penerimaan daerah berkisar antara 50-75 %. Sebanyak 40 % responden menyatakan bahwa persentase rasio penerimaan BHPBP terhadap total penerimaan daerah berkisar 25-50 %. Sebanyak 13,3 % responden menyatakan bahwa persentase rasio penerimaan BHPBP terhadap total penerimaan daerah berkisar antara lebih dari 75 %. Sebanyak 6,7 % responden menyatakan bahwa persentase rasio penerimaan BHPBP terhadap total penerimaan daerah kurang dari 25 %. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa persentase rasio penerimaan BHPBP terhadap total penerimaan daerah berkisar antara 50-75 %.

Berdasarkan data sekunder, kontribusi BHPBP terhadap total penerimaan daerah dari tahun 2001 sampai 2005 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel III.25
Kontribusi BHPBP Terhadap Total Penerimaan Daerah Surabaya (Dalam Miliar Rupiah)

Uraian	Realisasi				
	2001	2002	2003	2004	2005
Bagi Hasil Pajak	173.357,27	201.665,65	280.933,04	350.413,85	320.000,00
Bagi Hasil Bukan Pajak	5.592,55	5.612,33	1.391,91	748,21	1.267,09
Total Penerimaan Daerah	764.477,492	920.265,816	1.150.976,096	1.330.350,743	1.361.422,950
Persentase	23,41 %	22,52 %	24,53 %	26,4 %	23,59 %

Sumber : Bapeko Surabaya (2006)

Berdasarkan tabel III.25 diatas dapat diketahui bahwa persentase rasio peranan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak terhadap penerimaan terjadi penurunan dari 0,73 % (2001) menjadi 0,09 % (2005) sedangkan untuk peranan Dana Bagi Hasil Pajak terhadap penerimaan cenderung meningkat dari 22,68 % (2001) menjadi 23,50 % (2005). Dengan demikian BHPBP telah sangat sesuai berkontribusi dalam membentuk total penerimaan daerah.

III.1.3.1.3. Rasio Sumbangan Dan Bantuan Terhadap Total Penerimaan Daerah

Tabel III.26

Rasio Sumbangan Dan Bantuan Terhadap Total Penerimaan Daerah

Jawaban Item	Frekuensi	Persentase
Tidak Berpengaruh	1	3,3 %
Kurang Berpengaruh	6	20 %
Cukup Berpengaruh	21	70 %
Sangat Berpengaruh	2	6,7 %
Total	30	100 %

Sumber data : Kuisioner no.24

Berdasarkan tabel III.26 diatas dapat diketahui bahwa sebanyak 70 % responden menyatakan total dana perimbangan (sumbangan dan bantuan) cukup

berpengaruh terhadap total penerimaan daerah. Sebanyak 20 % responden menyatakan total dana perimbangan (sumbangan dan bantuan) kurang berpengaruh terhadap total penerimaan daerah. Sebanyak 6,7 % responden menyatakan total dana perimbangan (sumbangan dan bantuan) sangat berpengaruh terhadap total penerimaan daerah. Selain itu, sebanyak 3,3 % responden menyatakan bahwa total dana perimbangan (sumbangan dan bantuan) tidak berpengaruh terhadap total penerimaan daerah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menyatakan rasio sumbangan dan bantuan terhadap total penerimaan daerah cukup berpengaruh terhadap total penerimaan daerah.

Tabel III.27
Persentase Rasio Sumbangan Dan Bantuan Terhadap Total Penerimaan Daerah

Jawaban Item	Frekuensi	Persentase
< 25 %	1	3,3 %
25-50 %	10	33,3 %
50-75 %	12	40 %
> 75 %	7	23,3 %
Total	30	100 %

Sumber data : Kuisioner no.25

Berdasarkan tabel III.27 diatas dapat diketahui bahwa sebanyak 40 % responden menyatakan persentase rasio sumbangan dan bantuan terhadap total penerimaan daerah berkisar antara 50-75 %. Sebanyak 33,3 % responden menyatakan persentase rasio sumbangan dan bantuan terhadap total penerimaan daerah berkisar antara 25-50 %. Sebanyak 23,3 % responden menyatakan persentase rasio sumbangan dan bantuan terhadap total penerimaan daerah lebih

dari 75 %. Selain itu sebanyak 3,3 % responden menyatakan persentase rasio sumbangan dan bantuan terhadap total penerimaan daerah kurang dari 25 %. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa persentase rasio sumbangan dan bantuan terhadap total penerimaan daerah berkisar antara 50-75 %.

Berdasarkan data sekunder, jumlah transfer fiskal Pemerintah kepada Pemerintah Kota Surabaya dari tahun 2001 sampai 2005 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel III.28
Transfer Fiskal dari Pemerintah Pusat (Dalam Miliar Rupiah)

Uraian	Realisasi				
	2001	2002	2003	2004	2005
Dana Alokasi Umum	331.374,60	334.343,35	331.570,00	342.168,00	358.520,00
Bagi Hasil Pajak & Bantuan Keuangan Provinsi	46.081,89	100.706,31	151.280,35	184.102,53	169.889,31
Persentase	49,38 %	47,27 %	41,35 %	39,56 %	38,89 %

Sumber : Bapeko Surabaya (2006)

Berdasarkan tabel III.28 diatas dapat diketahui bahwa persentase DAU terhadap total penerimaan daerah mengalami penurunan yaitu 43,35 % (2001), 36,33 % (2002), 28,21 % (2003), 25,72 % (2004) dan 26,41 % (2005). Sedangkan peranan Bagi Hasil Pajak & Bantuan Keuangan Provinsi cenderung mengalami peningkatan 6,03 % (2001), 10,94 % (2002), 13,14 % (2003), 13,84 % (2004) dan 12,48 % (2005). Jika dibandingkan dengan tabel I.4 dapat diketahui bahwa DAU bersama-sama Bagi Hasil Pajak & Bantuan Keuangan Provinsi memiliki peranan yang besar dalam memberikan kontribusi bagi Dana Perimbangan sebagai penyumbang pendapatan terbesar. Hal ini menunjukkan bahwa transfer fiskal dari Pemerintah cukup berpengaruh berkontribusi terhadap total penerimaan.

III.1.3.2. Posisi Fiskal

III.1.3.2.1. Kebutuhan Fiskal

Tabel III.29
Rasio Jumlah Pengeluaran Dengan Kebutuhan Fiskal Daerah

Jawaban Item	Frekuensi	Persentase
Tidak Sesuai	-	-
Kurang Sesuai	8	26,7 %
Cukup Sesuai	17	56,7 %
Sangat Sesuai	5	16,7 %
Total	30	100 %

Sumber data : Kuisisioner no.26

Berdasarkan tabel III.29 diatas dapat diketahui bahwa sebanyak 56,7 % responden menyatakan rasio jumlah pengeluaran daerah cukup sesuai dengan kebutuhan fiskal daerah. Sebanyak 26,7 % responden menyatakan rasio jumlah pengeluaran daerah kurang sesuai dengan kebutuhan fiskal daerah. Selain itu sebanyak 16,7 % responden menyatakan rasio jumlah pengeluaran daerah sangat sesuai dengan kebutuhan fiskal daerah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa jumlah pengeluaran daerah cukup sesuai dengan kebutuhan fiskal daerah.

Tabel III.30
Persentase Rasio Jumlah Pengeluaran Dengan Kebutuhan Fiskal Daerah

Jawaban Item	Frekuensi	Persentase
< 25 %	1	3,3 %
25-50 %	5	16,7 %
50-75 %	17	56,7 %
> 75 %	7	23,3 %
Total	30	100 %

Sumber data : Kuisisioner no.27

Berdasarkan tabel III.30 diatas dapat diketahui bahwa sebanyak 56,7 % responden menyatakan persentase rasio jumlah pengeluaran daerah dengan kebutuhan fiskal daerah berkisar antara 50-75 %. Sebanyak 23,3 % responden menyatakan persentase rasio jumlah pengeluaran daerah dengan kebutuhan fiskal daerah lebih dari 75 %. Sebanyak 16,7 % responden menyatakan persentase rasio jumlah pengeluaran daerah dengan kebutuhan fiskal daerah berkisar antara 25-50 %. Selain itu, sebanyak 3,3 % responden menyatakan persentase rasio jumlah pengeluaran daerah dengan kebutuhan fiskal daerah kurang dari 25 %. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa persentase rasio jumlah pengeluaran daerah dengan kebutuhan fiskal daerah berkisar antara 50-75 %.

Berdasarkan data sekunder total belanja Pemerintah Kota Surabaya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel III.31
Realisasi Total Belanja Pemerintah Kota Surabaya (Dalam Miliar Rupiah)

Jenis	2004	2005
Belanja Pegawai	505.449,80	580.646,28
Belanja Barang & Jasa	261.656,20	397.023,38
Belanja Perjalanan Dinas	8.174,43	14.177,76
Belanja Pemeliharaan	160.401,03	317.815,44
Belanja Modal	177.506,41	239.694,71
Belanja Bagi Hasil & Bantuan Keuangan	48.801,49	43.162,63
Belanja Tidak Tersangka	3.489,81	34.883,02
Total Belanja	1.165.479,17	1.627.403,21

Sumber : Bapeko Surabaya (2006)

Berdasarkan tabel III.31 dapat diketahui bahwa total belanja Pemerintah Kota Surabaya sebesar Rp 1,165 triliun (2004) serta Rp 1,627 triliun (2005). Jika melihat tabel I.4 total pendapatan Rp 1,330 triliun (2004) serta Rp 1,361 triliun (2005). Dengan demikian jumlah pengeluaran daerah telah cukup sesuai dengan total pendapatan yang diterima daerah.

III.1.3.2.2. Kapasitas Fiskal

Tabel III.32
Rasio PDRB Dengan Jumlah Penduduk

Jawaban Item	Frekuensi	Persentase
Tidak Sesuai	6	20 %
Kurang Sesuai	11	36,7 %
Cukup Sesuai	13	43,3 %
Sangat Sesuai	-	-
Total	30	100 %

Sumber data : Kuisisioner no.28

Berdasarkan tabel III.32 diatas dapat diketahui bahwa sebanyak 43,3 % responden menyatakan rasio PDRB cukup sesuai dengan jumlah penduduk. Sebanyak 36,7 % responden menyatakan rasio PDRB kurang sesuai dengan jumlah penduduk. Selain itu, sebanyak 20 % responden menyatakan rasio PDRB tidak sesuai dengan jumlah penduduk. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa rasio PDRB cukup sesuai dengan jumlah penduduk.

Tabel III.33
Persentase Rasio PDRB Dengan Jumlah Penduduk

Jawaban Item	Frekuensi	Persentase
< 25 %	3	10 %

25-50 %	9	30 %
50-75 %	15	50 %
> 75 %	3	10 %
Total	30	100 %

Sumber data : Kuisisioner no.29

Berdasarkan tabel III.33 diatas dapat diketahui bahwa sebanyak 50 % responden menyatakan persentase rasio PDRB dengan jumlah penduduk berkisar antara 50-75 %. Sebanyak 10 % responden menyatakan persentase rasio PDRB dengan jumlah penduduk lebih dari 75 %. Sebanyak 30 % responden menyatakan persentase rasio PDRB dengan jumlah penduduk berkisar antara 25-50 %. Sebanyak 10 % responden menyatakan persentase rasio PDRB dengan jumlah penduduk kurang dari 25 %. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian responden menyatakan persentase rasio PDRB terhadap jumlah penduduk berkisar antara 50-75%.

Berdasarkan data sekunder, rasio PDRB terhadap jumlah penduduk dari tahun 2001 sampai 2004 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel III.34
PDRB dan Nilai PDRB Perkapita ADHB Kota Surabaya (Dalam Miliar Rupiah)

Uraian	Tahun			
	2001	2002	2003	2004
PDRB (Rp.Juta)	46.751.760	53.047.330	59.533.880	67.304.420
Jumlah Penduduk (Jiwa)	2.633.067	2.647.283	2.660.381	2.681.092
Nilai PDRB Per Kapita (Rp.Juta)	17,75	20,04	22,38	25,10

Sumber : BPS Surabaya (2004)

Besaran nilai *Produk Domestik Regional Bruto* (PDRB) ini secara nyata mampu memberikan gambaran mengenai nilai tambah bruto yang dihasilkan unit-

unit produksi pada suatu daerah dalam periode tertentu. Lebih jauh, perkembangan besaran nilai PDRB merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat tercermin melalui pertumbuhan nilai PDRB. Adapun perkembangan sektor ekonomi berdampak langsung terhadap peningkatan PDRB dan PDRB perkapita di Kota Surabaya selama tiga periode terakhir. Berdasarkan tabel III.34 dapat diketahui bahwa nilai PDRB perkapita yaitu 17,75 (2001), 20,04 (2002), 22,38 (2003) serta 25,10 (2004). Dengan demikian kecendrungan perkembangan nilai PDRB perkapita tersebut cukup sesuai dengan terjadinya pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya yang terus meningkat.

III.1.3.2.3. Kapasitas Pemerintah Daerah Untuk Meminjam

Tabel III.35
Batas Jumlah Pokok Pinjaman Sesuai Dengan Penerimaan Umum APBD

Jawaban Item	Frekuensi	Persentase
Tidak Sesuai	-	-
Kurang Sesuai	6	20 %
Cukup Sesuai	18	60 %
Sangat Sesuai	6	20 %
Total	30	100 %

Sumber data : Kuisioner no.30

Berdasarkan tabel III.35 diatas dapat diketahui bahwa sebanyak 60 % responden menyatakan batas jumlah pokok pinjaman cukup sesuai dengan penerimaan APBD. Sebanyak 20 % responden menyatakan bahwa batas jumlah pokok pinjaman kurang sesuai dengan penerimaan APBD. Selain itu sebanyak 20

% responden menyatakan batas jumlah pokok pinjaman sangat sesuai dengan penerimaan APBD. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menyatakan batas jumlah pokok pinjaman cukup sesuai dengan total penerimaan APBD.

Tabel III.36
Persentase Batas Jumlah Pokok Pinjaman Sesuai Dengan Penerimaan Umum APBD

Jawaban Item	Frekuensi	Persentase
< 25 %	7	23,3 %
25-50 %	13	43,3 %
50-75 %	8	26,7 %
> 75 %	2	6,7 %
Total	30	100 %

Sumber data : Kuisisioner no.31

Berdasarkan tabel III.36 diatas dapat diketahui bahwa sebanyak 43,3 % responden menyatakan persentase jumlah pokok pinjaman sesuai dengan batas total penerimaan berkisar antara 25-50 %. Sebanyak 26,7 % responden menyatakan persentase jumlah pokok pinjaman sesuai dengan batas total penerimaan berkisar anatar 50-75 %. Sebanyak 23,3 % responden menyatakan persentase jumlah pokok pinjaman sesuai dengan batas total penerimaan kurang dari 25 %. Selain itu, sebanyak 6,7 % responden menyatakan persentase jumlah pokok pinjaman sesuai dengan batas total penerimaan lebih dari 75 %. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menyatakan persentase batas jumlah pokok pinjaman dengan total penerimaan daerah berkisar antara 25-50 %.

Berdasarkan data sekunder, rasio PDRB terhadap jumlah penduduk dari tahun 2001 sampai 2004 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel III.37
Kapasitas Meminjam Pemerintah Kota Surabaya (Dalam Miliar Rupiah)

Uraian	Realisasi				
	2001	2002	2003	2004	2005
Total Pendapatan Daerah	764.477.492	920.265.816	1.150.976.096	1.330.350.743	1.361.422.950
Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-	-
Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
Penerimaan Umum	764.477.492	920.265.816	1.150.976.096	1.330.350.743	1.361.422.950
Kapasitas Meminjam	573.358.119	690.199.362	863.232.072	997.763.057,3	1.021.067.213

Sumber : Bapeko Surabaya (2005)

Berdasarkan tabel III.37 diatas dapat diketahui bahwa total pendapatan daerah cenderung mengalami perkembangan yang cukup stabil yaitu Rp 764,48 miliar (2001) menjadi Rp 1,36 triliun (2005) atau rata-rata setiap tahunnya mengalami peningkatan sekitar 15,76 %. Kapasitas meminjam Pemerintah Kota Surabaya dari Rp 573,36 miliar (2001) dapat menjadi Rp 1,02 triliun (2005). Kondisi PAD Pemerintah Kota Surabaya yang terus mengalami penguatan sejalan dengan adanya kemampuan meminjam yang juga naik.

III.1.3.2.4. Rasio Kemampuan Membayar Pinjaman (DSCR)

Tabel III.38
Kesesuaian Rasio Kemampuan Membayar Pinjaman Dengan Pendapatan Daerah

Jawaban Item	Frekuensi	Persentase
Tidak Sesuai	-	-
Kurang Sesuai	7	23,3 %
Cukup Sesuai	17	56,7 %
Sangat Sesuai	6	20 %
Total	30	100 %

Sumber data : Kuisisioner no.32

Berdasarkan tabel III.38 diatas dapat diketahui bahwa sebanyak 56,7 % responden menyatakan rasio kemampuan membayar pinjaman cukup sesuai dengan pendapatan daerah. Sebanyak 23,3 % responden menyatakan rasio kemampuan membayar pinjaman kurang sesuai dengan pendapatan daerah. Selain itu, sebanyak 20 % responden menyatakan rasio kemampuan membayar pinjaman sangat sesuai dengan pendapatan daerah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menyatakan rasio kemampuan membayar pinjaman cukup sesuai dengan total pendapatan daerah.

Tabel III.39
Persentase Kesesuaian Rasio Kemampuan Membayar Pinjaman Dengan Pendapatan Daerah

Jawaban Item	Frekuensi	Persentase
< 25 %	5	16,7 %
25-50 %	11	36,7 %
50-75 %	10	33,3 %
> 75 %	4	13,3 %
Total	30	100 %

Sumber data : Kuisisioner no.33

Berdasarkan tabel III.39 diatas dapat diketahui bahwa sebanyak 36,3 % responden menyatakan persentase kesesuaian rasio kemampuan membayar pinjaman dengan pendapatan daerah berkisar antara 25-50 %. Sebanyak 33,3 % responden menyatakan persentase kesesuaian rasio kemampuan membayar pinjaman dengan pendapatan daerah berkisar antara 50-75 %. Sebanyak 16,7 % responden menyatakan persentase kesesuaian rasio kemampuan membayar pinjaman dengan pendapatan daerah kurang dari 25 %. Selain itu, sebanyak 13,3 % responden menyatakan persentase kesesuaian rasio kemampuan membayar

pinjaman dengan pendapatan daerah lebih dari 75 %. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persentase kesesuaian rasio kemampuan membayar pinjaman daerah dengan pendapatan daerah berkisar antara 25-50 %.

Berdasarkan data sekunder, rasio kemampuan membayar pinjaman dari tahun 2001 sampai 2005 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel III.40
Simulasi Perhitungan Debt Service Coverage Ratio (DSCR)

Uraian	Realisasi				
	2001	2002	2003	2004	2005
Pendapatan Daerah	764.477.492	920.265.816	1.150.976.096	1.330.350.743	1.361.422.950
- PAD	207.993.372	277.863.171	348.310.014	417.377.015	469.056.135
- Bagian Daerah	225.109.561	308.059.295	471.096.082	570.805.728	532.846.815
- DAU	331.374.604	334.343.350	331.570.000	342.168.000	359.520.000
Belanja Wajib (Rp.000)	502.384.701	627.936.251	699.292.160	538.015.005	648.810.292
Tabungan Pemkot (Rp.000)	262.092.792	292.329.565	451.683.936	792.335.738	712.612.658
Kewajiban Pinjaman (Rp.000)	43.544.346	40.422.201	34.511.165	30.570.512	27.263.766
DSCR	6,02	7,23	13,09	25,92	26,14

Sumber : Bapeko Surabaya (2006)

Untuk komponen pinjaman daerah perhitungan dapat dilakukan dengan metode *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) yang dilakukan secara regresif (ke belakang) dengan mengambil periode pengamatan antara tahun anggaran 2001 hingga tahun anggaran 2005 berdasarkan tabel III.40 dapat diketahui bahwa kondisi kapasitas kemampuan keuangan daerah (APBD) dalam memenuhi kewajiban terhadap pinjaman yang dilakukan masih diatas batas yang dipersyaratkan ($\geq 2,5$) atau memiliki tingkat rata-rata sekitar 15,25. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rasio kemampuan membayar pinjaman cukup sesuai dengan total pendapatan daerah.

III.2. Variabel Terpengaruh (Variabel Y)

Variabel terpengaruh dalam penelitian ini adalah efektivitas manajemen pinjaman daerah yang selanjutnya akan disajikan dalam bentuk tabel.

III.2.1. Koordinasi

III.2.1.1. Ada Tidaknya Integrasi

III.2.1.1.1. Dukungan Dari Instansi-Instansi Yang Terlibat

Sebelumnya perlu dijelaskan bahwa berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan pada beberapa responden menyimpulkan bahwa koordinasi dalam penelitian ini, sebagaimana yang telah diuraikan oleh Dann Suganda, koordinasi yang dimaksud menurut lingkupnya adalah koordinasi ekstern yaitu koordinasi yang terjadi antar pejabat dari berbagai organisasi atau antar organisasi dan menurut arahnya adalah koordinasi fungsional, yaitu koordinasi antar pejabat, antar unit atau antar organisasi yang didasarkan atas kesamaan fungsi atau koordinasinya mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Hal ini menjelaskan bahwa beragamnya pendapat responden dalam memperoleh dukungan dari berbagai instansi yang terlibat disebabkan adanya perbedaan level manajemen yang melakukan koordinasi. Selanjutnya berdasarkan jawaban responden dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.41
Dukungan Dari Instansi-Instansi Yang Terlibat

Jawaban Item	Frekuensi	Persentase
1-3 instansi	4	13,3 %
4-6 instansi	9	30 %
7-9 instansi	12	40 %
> 9 instansi	5	16,7 %

Total	30	100 %
--------------	-----------	--------------

Sumber data : Kuisisioner no.34

Berdasarkan tabel III.41 diatas dapat diketahui bahwa sebanyak 40 % responden menyatakan banyaknya instansi yang terkait dalam manajemen pinjaman daerah berjumlah 7-9 instansi. Sebanyak 30 % responden menyatakan banyaknya instansi yang terkait dalam manajemen pinjaman daerah berjumlah 4-6 instansi. Sebanyak 16,7 % responden menyatakan banyaknya instansi yang terkait dalam manajemen pinjaman daerah lebih dari 9 instansi. Sebanyak 13,3 % responden menyatakan banyaknya instansi yang terkait dalam manajemen pinjaman daerah berjumlah 1-3 instansi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menyatakan banyaknya instansi yang terkait dalam manajemen pinjaman daerah 7-9 instansi.

III.2.1.1.2. Frekuensi Rapat Koordinasi Antar Instansi

Tabel III.42
Frekuensi Rapat Koordinasi Antar Instansi

Jawaban Item	Frekuensi	Persentase
Tidak Pernah	-	-
Kadang-kadang	8	26,7 %
Hampir Selalu	12	40 %
Selalu	10	33,3 %
Total	30	100 %

Sumber data : Kuisisioner no.35

Berdasarkan tabel III.42 diatas dapat diketahui bahwa sebanyak 40 % responden menyatakan hampir selalu dilakukan koordinasi dalam rangka serangkaian manajemen pinjaman daerah. Sebanyak 33,3 % responden

menyatakan selalu dilakukan koordinasi dalam rangka serangkaian aktivitas manajemen pinjaman daerah. Selain itu, sebanyak 26,7 % responden menyatakan koordinasi yang dilakukan hanya kadang-kadang saja. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menyatakan koordinasi yang dilakukan hampir selalu dalam rangka serangkaian aktivitas manajemen pinjaman daerah.

Tabel III.43
Frekuensi Rapat Koordinasi Perbulan

Jawaban Item	Frekuensi	Persentase
1-3 kali	11	36,7 %
4-6 kali	13	43,3 %
7-9 kali	6	20 %
10-12 kali	-	-
Total	30	100 %

Sumber data : Kuisisioner no.36

Berdasarkan tabel III.43 diatas dapat diketahui bahwa sebanyak 43,3 % responden menyatakan frekuensi rapat koordinasi yang dilakukan sebanyak 4-6 kali per bulan. Sebanyak 36,7 % responden menyatakan frekuensi rapat koordinasi yang dilakukan sebanyak 1-3 kali perbulan. Selain itu, sebanyak 20 % responden lainnya menyatakan frekuensi rapat koordinasi yang dilakukan sebanyak 7-9 kali per bulan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menyatakan frekuensi rapat koordinasi yang dilakukan dalam rangka serangkaian aktivitas manajemen pinjaman daerah sebanyak 4-6 kali per bulan.

Tabel III.44
Frekuensi Rapat Koordinasi dalam Mempengaruhi Kelancaran Tugas

Jawaban Item	Frekuensi	Persentase
Tidak Mempengaruhi	8	26,7 %
Kurang Mempengaruhi	7	23,3 %
Cukup Mempengaruhi	14	46,7 %
Sangat Mempengaruhi	1	3,3 %
Total	30	100 %

Sumber data : Kuisisioner no.37

Berdasarkan tabel III.44 diatas dapat diketahui bahwa sebanyak 46,7 % responden menyatakan banyaknya frekuensi rapat koordinasi yang dilakukan cukup mempengaruhi kelancaran tugas. Sebanyak 26,7 % responden menyatakan banyaknya frekuensi rapat koordinasi yang dilakukan tidak mempengaruhi kelancaran tugas. Sebanyak 23,3 % responden menyatakan banyaknya frekuensi rapat koordinasi yang dilakukan kurang mempengaruhi kelancaran tugas. Selain itu, sebanyak 3,3 % responden menyatakan banyaknya frekuensi rapat koordinasi yang dilakukan sangat mempengaruhi kelancaran tugas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menyatakan banyaknya frekuensi rapat koordinasi yang dilakukan cukup mempengaruhi kelancaran tugas.

III.2.1.2. Wewenang

III.2.1.2.1. Tingkat Kejelasan Hak Yang Didukung Oleh Peraturan

Tabel III.45
Kejelasan Tugas Dan Fungsi Masing-Masing Instansi Yang Terlibat

Jawaban Item	Frekuensi	Persentase
Tidak Jelas	-	-
Kurang Jelas	6	20 %
Cukup Jelas	16	53,3 %

Sangat Jelas	8	26,7 %
Total	30	100 %

Sumber data : Kuisisioner no.38

Berdasarkan tabel III.45 diatas dapat diketahui bahwa sebanyak 53,3 % responden menyatakan dalam pelaksanaan koordinasi manajemen pinjaman daerah tersebut tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi yang terlibat cukup jelas. Sebanyak 26,7 % responden menyatakan dalam pelaksanaan koordinasi manajemen pinjaman daerah tersebut tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi yang terlibat sangat jelas. Selain itu sebanyak 20 % responden menyatakan dalam pelaksanaan koordinasi manajemen pinjaman daerah tersebut tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi yang terlibat kurang jelas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menyatakan dalam pelaksanaan koordinasi manajemen pinjaman daerah tersebut tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi yang terlibat cukup jelas.

III.2.1.2.2. Tingkat Kesesuaian Antara Tanggung Jawab Dengan Wewenang

Tabel III.46
Penyelesaian Beban Kerja Yang Menjadi Tanggung Jawab Masing-Masing Instansi

Jawaban Item	Frekuensi	Persentase
Tidak Mampu	-	-
Kurang Mampu	5	16,7 %
Cukup Mampu	15	50 %
Sangat Mampu	10	33,3 %
Total	30	100 %

Sumber data : Kuisisioner no.39

Berdasarkan tabel III.46 diatas dapat diketahui bahwa sebanyak 50 % responden menyatakan instansi yang terlibat dalam koordinasi cukup mampu menyelesaikan beban kerja yang menjadi tanggung jawab masing-masing. Sebanyak 33,3 % responden menyatakan instansi yang terlibat dalam koordinasi sangat mampu menyelesaikan beban kerja yang menjadi tanggung jawab masing-masing. Selain itu, sebanyak 16,7 % responden menyatakan instansi yang terlibat dalam koordinasi kurang mampu menyelesaikan beban kerja yang menjadi tanggung jawab masing-masing. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menyatakan instansi yang terlibat dalam koordinasi cukup mampu menyelesaikan beban kerja yang menjadi tanggung jawab masing-masing instansi.

III.2.1.3. Tingkat Sinkronisasi

III.2.1.3.1. Ada Tidaknya Urutan Pekerjaan Yang Tersusun Secara Sistematis

Tabel III.47

Pelaksanaan Koordinasi Telah Menjelaskan Pekerjaan Secara Sistematis

Jawaban Item	Frekuensi	Persentase
Tidak Sistematis	-	-
Kurang Sistematis	7	23,3 %
Cukup Sistematis	16	53,3 %
Sangat Sistematis	7	23,3 %
Total	30	100 %

Sumber data : Kuisisioner no.40

Berdasarkan tabel III.47 diatas dapat diketahui bahwa sebanyak 53,3 % responden menyatakan dalam pelaksanaan koordinasi tersebut menjelaskan urutan pekerjaan secara cukup sistematis. Sebanyak 23,3 % responden menyatakan

urutan pekerjaan secara sangat sistematis. Selain itu, sebanyak 23,3 % responden lainnya menyatakan dalam pelaksanaan koordinasi tersebut menjelaskan urutan pekerjaan secara kurang sistematis. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menyatakan dalam pelaksanaan koordinasi tersebut telah menjelaskan urutan pekerjaan secara cukup sistematis.

Tabel III.48
Instansi Yang Terlibat Bekerja Sesuai Dengan Urutan Pekerjaan

Jawaban Item	Frekuensi	Persentase
Tidak Sesuai	-	-
Kurang Sesuai	7	23,3 %
Cukup Sesuai	18	60 %
Sangat Sesuai	5	16,7 %
Total	30	100 %

Sumber data : Kuisisioner no.11

Berdasarkan tabel III.48 diatas dapat diketahui bahwa sebanyak 60 % responden menyatakan instansi yang terlibat dalam pelaksanaan koordinasi tersebut bekerja cukup sesuai dengan urutan pekerjaan yang ada. Sebanyak 23,3 % responden menyatakan instansi yang terlibat dalam pelaksanaan koordinasi tersebut bekerja kurang sesuai dengan urutan pekerjaan yang ada. Selain itu, sebanyak 16,7 % responden lainnya menyatakan instansi yang terlibat dalam pelaksanaan koordinasi tersebut bekerja sangat sesuai dengan urutan pekerjaan yang ada. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menyatakan instansi yang terlibat dalam pelaksanaan koordinasi tersebut bekerja cukup sesuai dengan urutan pekerjaan yang ada.

III.2.1.3.2. Tingkat Kesesuaian Antara Tujuan Dan Sasaran

Tabel III.49
Masing-Masing Instansi Memahami Tujuan Pelaksanaan Koordinasi

Jawaban Item	Frekuensi	Persentase
Tidak Memahami	-	-
Kurang Memahami	5	16,7 %
Cukup Memahami	12	40 %
Sangat Memahami	13	43,3 %
Total	30	100 %

Sumber data : Kuisisioner no.42

Berdasarkan tabel III.49 diatas dapat diketahui bahwa sebanyak 43,3 % responden menyatakan masing-masing instansi yang terlibat sangat memahami tujuan pelaksanaan koordinasi tersebut. Sebanyak 40 % responden menyatakan masing-masing instansi yang terlibat cukup memahami tujuan pelaksanaan koordinasi tersebut. Selain itu, sebanyak 16,7 % responden lainnya menyatakan masing-masing instansi yang terlibat kurang memahami tujuan pelaksanaan koordinasi tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menyatakan masing-masing instansi yang terlibat sangat memahami tujuan pelaksanaan koordinasi tersebut.

Tabel III.50
Masing-Masing Instansi Memahami Sasaran Aktivitas Yang Dilakukan

Jawaban Item	Frekuensi	Persentase
Tidak Memahami	-	-
Kurang Memahami	6	20 %
Cukup Memahami	13	43,3 %
Sangat Memahami	11	36,7 %
Total	30	100 %

Sumber data : Kuisisioner no.43

Berdasarkan tabel III.50 diatas dapat diketahui bahwa sebanyak 43,3 % responden menyatakan instansi-instansi yang terlibat dalam manajemen pinjaman daerah tersebut cukup memahami sasaran aktivitas yang dilakukan. Sebanyak 36,7 % responden menyatakan instansi-instansi yang terlibat dalam manajemen pinjaman daerah tersebut sangat memahami sasaran aktivitas yang dilakukan. Selain itu, sebanyak 20 % responden lainnya menyatakan instansi-instansi yang terlibat dalam manajemen pinjaman daerah tersebut kurang memahami sasaran aktivitas yang dilakukan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menyatakan instansi-instansi yang terlibat dalam manajemen pinjaman daerah tersebut cukup memahami sasaran aktivitas yang dilakukan.

Tabel III.51
Tujuan Yang Ditetapkan Sesuai Dengan Arah/Sasaran

Jawaban Item	Frekuensi	Persentase
Tidak Sesuai	-	-
Kurang Sesuai	4	13,3 %
Cukup Sesuai	13	43,3 %
Sangat Sesuai	13	43,3 %
Total	30	100 %

Sumber data : Kuisisioner no.44

Berdasarkan tabel III.51 diatas dapat diketahui bahwa sebanyak 43,3 % responden menyatakan tujuan yang ditetapkan dalam koordinasi manajemen pinjaman daerah tersebut sangat sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Sebanyak 43,3 % juga responden menyatakan tujuan yang ditetapkan cukup sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu, sebanyak 13,3 % responden menyatakan tujuan yang ditetapkan kurang sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar

responden menyatakan tujuan yang ditetapkan dalam koordinasi manajemen pinjaman daerah tersebut sangat sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

III.2.2. Transparansi

III.2.2.1. Ketersediaan Informasi Publik

Tabel III.52
Tingkat Akurasi Informasi Yang Disampaikan Kepada Publik

Jawaban Item	Frekuensi	Persentase
Tidak Akurat	-	-
Kurang Akurat	4	13,3 %
Cukup Akurat	19	63,3 %
Sangat Akurat	7	23,3 %
Total	30	100 %

Sumber data : Kuisisioner no.46

Berdasarkan tabel III.52 diatas dapat diketahui bahwa sebanyak 63,3 % responden menyatakan informasi yang disampaikan kepada publik berkenaan dengan manajemen pinjaman daerah cukup akurat. Sebanyak 23,3 % responden menyatakan informasi yang disampaikan sangat akurat. Selain itu, sebanyak 13,3 % responden menyatakan informasi yang disampaikan kurang akurat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menyatakan informasi yang disampaikan kepada publik berkenaan dengan manajemen pinjaman daerah cukup akurat.

III.2.2.2. Keterbukaan Proses Kebijakan

Tabel III.53
Tingkat Kemudahan Masyarakat Dalam Mengakses Informasi

Jawaban Item	Frekuensi	Persentase
Tidak Mudah	-	-

Kurang Mudah	4	13,3 %
Cukup Mudah	14	46,7 %
Sangat Mudah	12	40 %
Total	30	100 %

Sumber data : Kuisisioner no.47

Berdasarkan tabel III.53 diatas dapat diketahui bahwa sebanyak 46,7 % responden menyatakan masyarakat dalam mengakses informasi tentang manajemen pinjaman daerah cukup mudah. Sebanyak 40 % responden menyatakan masyarakat dalam mengakses informasi tentang manajemen pinjaman daerah sangat mudah. Selain itu sebanyak 13,3 % responden menyatakan masyarakat dalam mengakses informasi tentang manajemen pinjaman daerah kurang mudah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menyatakan masyarakat dalam mengakses informasi tentang manajemen pinjaman daerah cukup mudah.

Berdasarkan jawaban responden terhadap kuisisioner no.45 maka aparat dalam menyampaikan informasi tentang manajemen pinjaman daerah menggunakan tiga media yaitu surat kabar (50 %), internet (40 %) serta radio (10 %).

III.2.3. Akuntabilitas

III.2.3.1. Tahap Pembuatan Kebijakan

Tabel III.54
Keterlibatan Stakeholders Dalam Pembuatan Kebijakan

Jawaban Item	Frekuensi	Persentase
Tidak Pernah	-	-
Jarang	8	26,7 %
Cukup sering	17	56,7 %

Selalu	5	16,7 %
Total	30	100 %

Sumber data : Kuisisioner no.48

Berdasarkan tabel III.54 diatas dapat diketahui bahwa sebanyak 56,7 % responden menyatakan dalam pembuatan kebijakan pinjaman daerah cukup sering melibatkan *stakeholders*. Sebanyak 26,7 % responden menyatakan jarang melibatkan *stakeholders*. Selain itu, sebanyak 16,7 % responden menyatakan selalu melibatkan *stakeholders*. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menyatakan dalam pembuatan kebijakan pinjaman daerah cukup sering melibatkan *stakeholders* yang ada.

Tabel III.55
Kesesuaian Sasaran Kebijakan Dengan Misi

Jawaban Item	Frekuensi	Persentase
Tidak Sesuai	-	-
Kurang Sesuai	10	33,3 %
Cukup Sesuai	12	40 %
Sangat Sesuai	8	26,7 %
Total	30	100 %

Sumber data : Kuisisioner no.49

Berdasarkan tabel III.55 diatas dapat diketahui bahwa sebanyak 40 % responden menyatakan sasaran kebijakan yang diambil cukup sesuai dengan misi organisasi. Sebanyak 26,7 % responden menyatakan sasaran kebijakan yang diambil sangat sesuai dengan misi organisasi. Selain itu, sebanyak 33,3 % responden menyatakan sasaran kebijakan yang diambil kurang sesuai dengan misi organisasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden

menyatakan sasaran kebijakan yang diambil telah cukup sesuai dengan misi (Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang) organisasi.

Tabel III.56
Kelayakan Target Operasional Dengan Target Yang Ingin Dicapai

Jawaban Item	Frekuensi	Persentase
Tidak Konsisten	-	-
Kurang Konsisten	7	23,3 %
Cukup Konsisten	17	56,7 %
Sangat Konsisten	6	20 %
Total	30	100 %

Sumber data : Kuisisioner no.50

Berdasarkan tabel III.56 diatas dapat diketahui bahwa sebanyak 56,7 % responden menyatakan kelayakan target operasional dengan target yang ingin dicapai cukup konsisten. Sebanyak 23,3 % responden menyatakan kelayakan target operasional dengan target yang ingin dicapai kurang konsisten. Selain itu, sebanyak 20 % responden lainnya menyatakan kelayakan target operasional dengan target yang ingin dicapai sangat konsisten. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menyatakan target operasional dengan target yang ingin dicapai cukup konsisten.

III.2.3.2. Tahap Sosialisasi Kebijakan

Tabel III.57
Sosialisasi Penyampaian Kelengkapan Informasi Sasaran

Jawaban Item	Frekuensi	Persentase
Tidak Lengkap	-	-
Kurang Lengkap	3	10 %
Cukup Lengkap	18	60 %
Sangat Lengkap	9	30 %

Total	30	100 %
--------------	-----------	--------------

Sumber data : Kuisisioner no.51

Berdasarkan tabel III.57 diatas dapat diketahui bahwa sebanyak 60 % responden menyatakan informasi pencapaian sasaran suatu program disosialisasikan kepada publik secara cukup lengkap. Sebanyak 30 % responden menyatakan informasi pencapaian sasaran suatu program disosialisasikan kepada publik secara sangat lengkap. Selain itu, sebanyak 10 % responden menyatakan informasi pencapaian sasaran suatu program disosialisasikan kepada publik secara kurang lengkap. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menyatakan penyampaian kelengkapan informasi pencapaian sasaran suatu program disosialisasikan kepada publik disajikan secara cukup lengkap.

BAB IV

ANALISA DAN INTERPRETASI DATA

Pada bab ini akan disajikan analisa dan interpretasi data sebagai kelanjutan dari bab-bab sebelumnya. Tujuan dilakukan analisa dan interpretasi data adalah untuk membuktikan apakah hipotesis yang disebutkan ditolak atau diterima. Asumsi utama yang mendasari penelitian ini adalah bahwa kemampuan aparat, sistem informasi keuangan daerah dan kemampuan keuangan daerah mempunyai hubungan dengan efektivitas manajemen pinjaman daerah.

IV.1. Analisa Data

Seperti yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya bahwa di dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas (*independent*) yang terdiri dari kemampuan aparat (x_1), sistem informasi keuangan daerah (x_2) dan kemampuan keuangan daerah (x_3) serta satu variabel terikat (*dependent*) yaitu efektivitas manajemen pinjaman daerah (y). Untuk mengetahui hubungan antara variabel-variabel tersebut dalam analisa ini akan digunakan dua cara, yang pertama adalah dengan menggunakan tabulasi silang untuk dapat melakukan analisa kuantitatif dan menguraikan hubungan antar variabel-variabel bebas (*independent*) dan terikat (*dependent*). Kedua dengan menggunakan uji statistik agar diperoleh kajian ilmiah yang lebih cermat terhadap hubungan antar variabel-variabel bebas (*independent*) dan terikat (*dependent*). Uji statistik yang akan digunakan adalah analisa regresi ganda (majemuk) yang bertujuan untuk mengetahui:

1. Korelasi antara kriterium (variabel y) dengan prediktor-prediktornya (variabel x_1 , x_2 dan x_3). Apakah korelasi tersebut signifikan atau tidak.
2. Persamaan garis regresi.
3. Sumbangan variabel-variabel bebas terhadap variabel tergantung sesuai dengan hasil pengujian yang dilakukan.
4. Berapa sumbangan dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat, sehingga akan dapat diketahui variabel bebas mana yang dominan.

Sebelum dilakukan analisa tabulasi silang, terlebih dahulu akan dilakukan deskripsi dari masing-masing indikator yang terdapat dari masing-masing variabel. Deskripsi ini menampilkan perolehan nilai yang didapat dari pengolahan data primer. Untuk deskripsi dari masing-masing indikator akan dikelompokkan berdasarkan hasil dari jawaban yang diberikan responden dan dikategorikan menjadi empat kategori, untuk variabel x_1 , x_2 dan x_3 yaitu:

Kategori Buruk	:	Skor dengan nilai "1"
Kategori Kurang Baik	:	Skor dengan nilai "2"
Kategori Cukup Baik	:	Skor dengan nilai "3"
Kategori Baik	:	Skor dengan nilai "4"

Sementara untuk variabel y dari jawaban yang diberikan responden juga akan dikategorikan menjadi empat kategori yaitu:

Kategori Rendah	:	Skor dengan nilai "1"
Kategori Kurang Tinggi	:	Skor dengan nilai "2"
Kategori Cukup Tinggi	:	Skor dengan nilai "3"
Kategori Tinggi	:	Skor dengan nilai "4"

Selanjutnya adalah menentukan pembagian kelas interval dan seperti yang diungkapkan oleh Soetrisno Hadi untuk menghindari adanya bilangan pecahan maka nilai skor yang paling tinggi dan paling rendah dilakukan pembulatan ke atas atau ke bawah.¹¹⁷ Adapun rumus yang digunakan dalam pembagian kelas interval adalah sebagai berikut:

$\text{Interval} = \frac{NT-NR}{\text{Jumlah Kelas}}$ <p>Keterangan : <i>NT</i> : Batas nyata atas <i>NR</i> : Batas nyata bawah</p>

Untuk tabulasi silang dari masing-masing jawaban responden pada variabel efektivitas manajemen pinjaman daerah (*y*) diperoleh nilai (skor total) paling tinggi 62 dan paling rendah 35. Selanjutnya dari skor paling tinggi dan paling rendah tersebut ditetapkan batas nyata atas dari nilai tertinggi dikurangi dengan batas nyata bawah dari nilai terendah dan dibagi dengan jumlah interval sehingga diperoleh hasil sebagai berikut:

$$\frac{62,5-34,5}{4} = 7$$

Dari hasil perhitungan diatas kemudian ditentukan kategori skor jawaban pada variabel terikat (*y*), antara lain:

- Skor 35-41 untuk kategori "Rendah"
- Skor 42-48 untuk kategori "Kurang tinggi"
- Skor 49-55 untuk kategori "Cukup tinggi"
- Skor 56-62 untuk kategori "Tinggi"

¹¹⁷ Soetrisno Hadi, *Statistik 2*, Yogyakarta : Andi Offset, 1996, hal. 20.

Untuk variabel bebas pertama yaitu kemampuan aparat (x_1) diperoleh nilai atau skor total tertinggi 22 dan terendah 12. Dari skor tersebut ditetapkan batas nyata atas dari nilai tertinggi dikurangi batas nyata bawah dari nilai terendah kemudian dibagi jumlah interval sehingga diperoleh lebar interval sebagai berikut:

$$\frac{22,5-11,5}{4} = 2,75 \rightarrow \text{dibulatkan menjadi } 3$$

Dari hasil perhitungan diatas, kemudian ditentukan kategori skor jawaban pada variabel bebas pertama, yaitu:

- Skor 12-14 untuk kategori "Buruk"
- Skor 15-17 untuk kategori "Kurang baik"
- Skor 18-20 untuk kategori "Cukup baik"
- Skor 21-22 untuk kategori "Baik"

Untuk variabel bebas kedua yaitu sistem informasi keuangan daerah (x_2) diperoleh skor total tertinggi 52 dan terendah 30. Dari skor tersebut ditetapkan batas nyata atas dari nilai tertinggi dikurangi batas nyata bawah dari nilai terendah kemudian dibagi jumlah interval sehingga diperoleh lebar interval sebagai berikut

$$\frac{52,5-29,5}{4} = 5,75 \rightarrow \text{dibulatkan menjadi } 6$$

Dari hasil perhitungan diatas, kemudian ditentukan kategori skor jawaban pada variabel bebas kedua, yaitu:

- Skor 30-35 untuk kategori "Buruk"
- Skor 36-41 untuk kategori "Kurang baik"
- Skor 42-47 untuk kategori "Cukup baik"
- Skor 48-52 untuk kategori "Baik"

Sedangkan untuk variabel bebas ketiga yaitu kemampuan keuangan daerah (x_3) diperoleh skor total tertinggi 54 dan terendah 27. Dari skor tersebut ditetapkan batas nyata atas dari nilai tertinggi dikurangi batas nyata bawah dari nilai terendah kemudian dibagi jumlah interval sehingga diperoleh lebar interval sebagai berikut

$$\frac{54,5-26,5}{4} = 7$$

Dari hasil perhitungan diatas, kemudian ditentukan kategori skor jawaban pada variabel bebas ketiga, yaitu:

- Skor 27-33 untuk kategori “Buruk”
- Skor 34-40 untuk kategori “Kurang baik”
- Skor 41-47 untuk kategori “Cukup baik”
- Skor 48-54 untuk kategori “Baik”

Setelah diketahui lebar interval dari masing-masing variabel, terlebih dahulu akan disajikan gambaran jawaban responden terhadap masing-masing variabel berdasarkan kategori melalui tabel frekuensi.

IV.1.1. Efektivitas Manajemen Pinjaman Daerah

Pengertian dasar efektivitas selalu melekat pada keberadaan organisasi. Terdapat banyak indikator dari efektivitas itu sendiri yang dapat dijadikan tolak ukur atau parameter bagi suatu organisasi. Efektivitas dalam manajemen pinjaman daerah itu sendiri dipengaruhi oleh beberapa komponen seperti yang diungkapkan *World Bank* yang dalam penelitian ini adalah koordinasi, transparansi serta akuntabilitas. Selanjutnya indikator tersebut digunakan dalam mengukur

efektivitas manajemen pinjaman daerah yang penyelenggaraannya dijalankan oleh Badan Pengelolaan Keuangan. Berdasarkan hasil dari jawaban yang diberikan responden, tabel berikut akan menggambarkan efektivitas manajemen pinjaman daerah.

Tabel IV.1
Rekapitulasi Variabel Y (Efektivitas Manajemen Pinjaman Daerah)

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Rendah	6	20 %
Kurang Tinggi	5	16,7 %
Cukup Tinggi	10	33,3 %
Tinggi	9	30 %
Total	30	100 %

Sumber: Pengolahan data primer.

Berdasarkan tabel IV.1 dapat diketahui bahwa 20 % responden menyatakan termasuk dalam kategori rendah, sedangkan untuk kategori kurang tinggi sebesar 16,7 %. Selanjutnya untuk kategori cukup tinggi sebesar 33,3 % dan sisanya sebesar 30 % termasuk dalam kategori tinggi. Dilihat dari selisih jumlah responden yang menyatakan bahwa tingkat keefektifan manajemen pinjaman daerah kurang tinggi dan yang menyatakan bahwa tingkat keefektifan manajemen pinjaman daerah cukup tinggi serta sedikitnya responden yang menyatakan bahwa tingkat keefektifan manajemen pinjaman daerah rendah, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat keefektifan manajemen pinjaman daerah di Badan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya tergolong cukup tinggi.

IV.1.2. Kemampuan Aparat

Pinjaman daerah perlu disesuaikan dengan kemampuan daerah karena itu keterampilan perangkat daerah dalam mengelolanya sangat diperlukan. Telah dijelaskan diawal bahwa konsep kemampuan aparat itu sendiri adalah potensi dan keahlian aparatur negara, baik secara fisik maupun mental berkaitan dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperolehnya dari pendidikan, latihan dan pengalaman untuk melakukan tugas dan pekerjaannya serta memanfaatkan dan mengolah sumber-sumber yang ada. Dalam hal kemampuan aparat dalam mengelola dana yang berasal dari pinjaman daerah maka digunakan beberapa indikator yaitu tingkat pendidikan aparat pelaksana, tingkat pendidikan non formal aparat pelaksana, tingkat kesesuaian melakukan pekerjaan dengan peraturan dan kebijaksanaan serta tingkat pemahaman pada standar kerja yang ditetapkan serta tugas yang harus diselesaikan. Berdasarkan hasil dari jawaban yang diberikan responden, tabel dibawah ini akan memberikan gambaran indikator-indikator dari variabel bebas pertama.

Tabel IV.2
Rekapitulasi Variabel X1 (Kemampuan Aparat)

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Buruk	6	20 %
Kurang Baik	10	33,3 %
Cukup Baik	9	30 %
Baik	5	16,7 %
Total	30	100 %

Sumber: Pengolahan data primer.

Berdasarkan tabel IV.2 diatas dapat diketahui dari keseluruhan 30 responden aparat dalam hal ini pegawai Badan Pengelolaan Keuangan menunjukkan bahwa 30 % responden menyatakan bahwa tingkat kemampuan aparat termasuk dalam kategori cukup baik. Selanjutnya sebanyak 16,7 % responden menyatakan bahwa tingkat kemampuan aparat termasuk dalam kategori baik. Disamping itu 33,3 % responden menyatakan tingkat kemampuan aparat termasuk dalam kategori kurang baik. Sisanya sebesar 20 % responden menyatakan bahwa tingkat kemampuan aparat termasuk dalam kategori buruk. Dilihat dari selisih jumlah responden yang menyatakan bahwa tingkat kemampuan aparat daerah kurang baik dan yang menyatakan bahwa tingkat kemampuan aparat daerah cukup baik serta sedikitnya responden yang menyatakan bahwa tingkat kemampuan aparat daerah baik, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kemampuan aparat di Badan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya tergolong kurang baik.

IV.1.3. Sistem Informasi Keuangan Daerah

Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan serta pertanggungjawaban Pemerintah Daerah. Dalam hal implementasi SIKD tersebut di Badan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Surabaya, digunakan beberapa indikator yaitu tingkat evaluasi kegunaan sistem yang dirasakan, tingkat evaluasi kualitas informasi, tingkat evaluasi kemudahan penggunaan sistem yang dirasakan serta tingkat evaluasi kemampuan

menggunakan komputer. Berdasarkan jawaban yang diberikan oleh responden maka berikut akan disajikan dalam bentuk tabel yang memberikan gambaran indikator-indikator dari variabel SIKD tersebut.

Tabel IV.3
Rekapitulasi Variabel X2 (Sistem Informasi Keuangan Daerah)

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Buruk	6	20 %
Kurang Baik	9	30 %
Cukup Baik	13	43,3 %
Baik	2	6,7 %
Total	30	100 %

Sumber: Pengolahan data primer.

Tabel IV.3 memberikan gambaran bahwa sebanyak 43,3 % responden menyatakan bahwa penerapan SIKD termasuk dalam kategori cukup baik. Sedangkan sebanyak 30 % responden menyatakan penerapan SIKD termasuk dalam kategori kurang baik. Selain itu, sebanyak 6,7 % responden menyatakan penerapan SIKD baik dan sisanya sebanyak 20 % menyatakan bahwa penerapan SIKD pada kategori buruk. Dilihat dari selisih jumlah responden yang menyatakan bahwa penerapan SIKD kurang baik dan yang menyatakan bahwa penerapan SIKD cukup baik serta sedikitnya responden yang menyatakan bahwa penerapan SIKD baik, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan SIKD tergolong cukup baik.

IV.1.4. Kemampuan Keuangan Daerah

Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan *self*

supporting dalam bidang keuangan. Pemerintah Daerah tidak dapat melaksanakan fungsinya secara efektif dan efisien tanpa adanya biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan. Konsep kemampuan keuangan daerah disini adalah kemampuan dan kewenangan yang dimiliki daerah untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Sebelum pengambilan kebijakan pinjaman daerah maupun dalam hal pengelolaannya perlu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu dalam penelitian ini digunakan beberapa indikator kemampuan keuangan daerah yaitu derajat desentralisasi, posisi fiskal daerah, kapasitas Pemerintah Daerah untuk meminjam serta rasio kemampuan membayar pinjaman daerah. Berdasarkan jawaban yang diberikan oleh responden maka berikut akan disajikan dalam bentuk tabel yang memberikan gambaran indikator-indikator dari variabel kemampuan keuangan daerah.

Tabel IV.4
Rekapitulasi Variabel X3 (Kemampuan Keuangan Daerah)

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Buruk	6	20 %
Kurang Baik	8	26,6 %
Cukup Baik	14	46,6 %
Baik	2	6,7 %
Total	30	100 %

Sumber: Pengolahan data primer.

Berdasarkan tabel IV.4 tersebut jumlah 30 responden yang diteliti maka dapat diketahui sebanyak 46,6 % responden menyatakan bahwa kemampuan keuangan daerah termasuk dalam kategori cukup baik. Sedangkan sebanyak 26,7 %

responden menyatakan kemampuan keuangan daerah termasuk dalam kategori kurang baik. Selain itu, sebanyak 6,7 % responden menyatakan kemampuan keuangan daerah baik dan sisanya sebanyak 20 % menyatakan bahwa kemampuan keuangan daerah pada kategori buruk. Dilihat dari selisih jumlah responden yang menyatakan bahwa kemampuan keuangan daerah kurang baik dan yang menyatakan bahwa kemampuan keuangan daerah cukup baik serta sedikitnya responden yang menyatakan bahwa kemampuan keuangan daerah baik, maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kota Surabaya tergolong cukup baik.

IV.1.5. Korelasi Variabel Kemampuan Aparat dengan Efektivitas Manajemen Pinjaman Daerah

Pada Bab I telah dijelaskan mengenai hubungan antara kemampuan aparat dengan efektivitas manajemen pinjaman daerah. Perangkat daerah yakni dalam hal ini aparat daerah harus mempunyai keterampilan dalam mengelola program-program pembangunan yang dibiayai oleh pinjaman daerah mengingat dampaknya yang cukup besar. Tingkat kemampuan aparat akan membantu aparat dalam menyelesaikan tugas dan kewajibannya yang dalam hal ini mengelola pinjaman daerah untuk pencapaian tujuan organisasi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Steers bahwa tanpa prestasi yang baik ditingkat organisasi, pencapaian tujuan dan keberhasilan organisasi menjadi sesuatu yang sulit atau bahkan mustahil. Untuk mengetahui bagaimana korelasi antara variabel kemampuan aparat dengan efektivitas manajemen pinjaman daerah dijelaskan pada tabulasi silang dibawah ini:

Tabel IV. 5
Korelasi Variabel Kemampuan Aparat dengan Efektivitas Manajemen
Pinjaman Daerah

Efektivitas Manajemen Pinjaman Daerah (Y)	Kemampuan Aparat (X1)				Total
	Buruk	Kurang baik	Cukup baik	Baik	
Rendah	4 13,3 %	2 6,7 %	-	-	6 20 %
Kurang Tinggi	1 3,3 %	4 13,3 %	-	-	5 16,7 %
Cukup Tinggi	1 3,3 %	2 6,7 %	4 13,3 %	3 10 %	10 33,3 %
Tinggi	-	2 6,7 %	5 16,7 %	2 6,7 %	9 30 %
Total	6 20 %	10 33,3 %	9 30 %	5 16,7 %	30 100 %

Sumber: Pengolahan data primer

Dari tabel IV.5 dapat diketahui dari 30 responden, dari 6 responden yang menyatakan efektivitas manajemen pinjaman daerah rendah, 13,3 % responden menyatakan bahwa tingkat kemampuan aparat buruk, 6,7 % responden menyatakan bahwa tingkat kemampuan aparat kurang baik. Dari 5 responden yang menyatakan efektivitas manajemen pinjaman daerah kurang tinggi, 3,3 % responden menyatakan bahwa tingkat kemampuan aparat buruk, 13,3 % responden menyatakan bahwa tingkat kemampuan aparat kurang baik. Dari 10 responden yang menyatakan efektivitas manajemen pinjaman daerah cukup tinggi, 3,3 % responden menyatakan bahwa tingkat kemampuan aparat buruk, 6,7 % responden menyatakan bahwa tingkat kemampuan aparat kurang baik, 13,3 % responden menyatakan bahwa tingkat kemampuan aparat cukup baik serta 10 % responden menyatakan bahwa tingkat kemampuan aparat baik. Dari 9 responden yang menyatakan efektivitas manajemen pinjaman daerah tinggi, 6,7 % responden

menyatakan bahwa tingkat kemampuan aparat kurang baik, 16,7 % responden menyatakan bahwa tingkat kemampuan aparat cukup baik serta 6,7 % responden menyatakan bahwa tingkat kemampuan aparat baik.

Langkah berikutnya adalah mencari hubungan antara kemampuan aparat dan efektivitas manajemen pinjaman daerah. Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antar variabel dilakukan dengan mencari rata-rata hasil pengurangan dari sel a,b,c,d. Apabila hasil yang diperoleh lebih dari 10 % maka dapat dikatakan ada hubungan antara kedua variabel. Penentuan sel a,b,c dan d ditetapkan berdasar persentase terbesar di margin bebas sehingga diperoleh hasil sebagai berikut:

$$\begin{array}{rcl}
 \text{Sel a - sel b} & = & 20 - 33,3 \% = 13,3 \% \\
 \text{Sel a - sel c} & = & 20 - 30 \% = 10 \% \\
 \text{Sel a - sel d} & = & 20 - 16,7 \% = 6,7 \% \\
 \text{Sel b - sel c} & = & 33,3 - 30 \% = 3,3 \% \\
 \text{Sel b - sel d} & = & 33,3 - 16,7 \% = 16,6 \% \\
 \text{Sel c - sel d} & = & 30 - 16,7 \% = 13,3 \% + \\
 & & \hline
 & & 63,2 \%
 \end{array}$$

Kemudian dari hasil penjumlahan tersebut dicari rata-rata dari keempat sel dan diperoleh hasil 15,8 %. Karena 15,8 % > 10 %, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara variabel kemampuan aparat dengan tingkat keefektifan manajemen pinjaman daerah.

IV.1.6. Korelasi Variabel Sistem Informasi Keuangan Daerah dengan Efektivitas Manajemen Pinjaman Daerah

Seperti yang telah dijelaskan pada Bab I sebelumnya bahwa untuk mencapai tujuan organisasi memerlukan manajemen yang tepat dan dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. Untuk itu, kegiatan manajemen memerlukan dukungan informasi. Tanpa dukungan informasi manajemen suatu organisasi tidak akan mencapai tujuan yang direncanakan apalagi untuk mencapai sasaran secara efisien dan efektif. Sebagaimana yang diungkapkan Terry bahwa melalui pengumpulan sistemik, pengolahan dan penyebaran data akan menyediakan informasi bagi organisasi dalam pencapaian tujuan. Untuk mengetahui bagaimana korelasi antara variabel sistem informasi keuangan daerah dengan efektivitas manajemen pinjaman daerah dijelaskan pada tabulasi silang dibawah ini:

Tabel IV. 6
Korelasi Variabel Sistem Informasi Keuangan Daerah dengan Efektivitas Manajemen Pinjaman Daerah

Efektivitas Manajemen Pinjaman Daerah (Y)	Sistem Informasi Keuangan Daerah (X2)				Total
	Buruk	Kurang baik	Cukup baik	Baik	
Rendah	3 10 %	3 10 %	-	-	6 20 %
Kurang Tinggi	2 6,7%	-	3 10 %	-	5 16,7 %
Cukup Tinggi	-	2 6,7 %	7 23,3 %	1 3,3 %	10 33,3 %
Tinggi	1 3,3 %	4 13,3 %	3 10 %	1 3,3 %	9 30 %
Total	6 20 %	9 30 %	13 43,3 %	2 6,7 %	30 100 %

Sumber: Pengolahan data primer

Dari tabel IV.6 dapat diketahui dari 30 responden, dari 6 responden yang menyatakan efektivitas manajemen pinjaman daerah rendah, 10 % responden menyatakan bahwa sistem informasi keuangan daerah buruk serta 10 % responden menyatakan bahwa sistem informasi keuangan daerah kurang baik. Dari 5 responden yang menyatakan efektivitas manajemen pinjaman daerah kurang tinggi, 6,7 % responden menyatakan bahwa sistem informasi keuangan daerah kurang baik, 23,3 % responden menyatakan bahwa sistem informasi keuangan daerah cukup baik serta 3,3 % responden menyatakan bahwa sistem informasi keuangan daerah baik. Dari 10 responden yang menyatakan efektivitas manajemen pinjaman daerah cukup tinggi, 6,7 % responden menyatakan bahwa sistem informasi keuangan daerah kurang baik, 23,3 % responden menyatakan bahwa sistem informasi keuangan daerah cukup baik serta 3,3 % responden menyatakan bahwa sistem informasi keuangan daerah baik. Dari 9 responden yang menyatakan efektivitas manajemen pinjaman daerah tinggi, 3,3 % responden menyatakan bahwa sistem informasi keuangan daerah buruk, 13,3 % responden menyatakan bahwa sistem informasi keuangan daerah kurang baik, 10 % responden menyatakan bahwa sistem informasi keuangan daerah cukup baik serta 3,3 % responden menyatakan bahwa sistem informasi keuangan daerah baik.

Langkah berikutnya adalah mencari hubungan antara sistem informasi keuangan daerah dan tingkat keefektifan manajemen pinjaman daerah. Penentuan sel a,b,c dan d ditetapkan berdasar persentase terbesar di margin bebas sehingga diperoleh hasil sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Sel a - sel b} &= 20-30 \% &= 10 \% \\
 \text{Sel a - sel c} &= 20-43,3 \% &= 23,3 \% \\
 \text{Sel a - sel d} &= 20-6,7 \% &= 13,3 \% \\
 \text{Sel b - sel c} &= 30-43,3 \% &= 13,3 \% \\
 \text{Sel b - sel d} &= 30-6,7 \% &= 23,3 \% \\
 \text{Sel c - sel d} &= 43,3-6,7 \% &= \frac{36,6 \% +}{119,8 \%}
 \end{aligned}$$

Kemudian dari hasil penjumlahan tersebut dicari rata-rata dari keempat sel dan diperoleh hasil 29,95 %. Karena $29,95 \% > 10 \%$, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara variabel sistem informasi keuangan daerah dengan tingkat keefektifan manajemen pinjaman daerah.

IV.1.7. Korelasi Variabel Kemampuan Keuangan Daerah dengan Efektivitas Manajemen Pinjaman Daerah

Pada Bab I telah dijelaskan mengenai hubungan antara kemampuan keuangan daerah dengan efektivitas manajemen pinjaman daerah. Pinjaman daerah sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan pembangunan daerah diharapkan dapat mengurangi ketergantungan daerah dalam hal penyediaan sejumlah dana pembangunan dari Pemerintah Pusat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Halim bahwa ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi dapat dilihat dari (1) kemampuan keuangan daerahnya serta (2) ketergantungan daerah kepada bantuan Pemerintah Pusat harus seminimal mungkin.

Pinjaman daerah dapat terealisasi bila pihak debitor maupun kreditor telah mencapai kesepakatan yang tertuang dalam sebuah perjanjian. Klausula-klausula dalam perjanjian tersebut tentunya mengatur hak maupun kewajiban para pihak. Dari sisi debitor dalam hal ini Pemerintah Kota Surabaya mempunyai hak atas penerimaan sejumlah dana pinjaman sekaligus adanya pemenuhan kewajiban yang telah disepakati sebelumnya. Mengingat pemenuhan kewajiban pinjaman daerah tersebut membutuhkan jangka waktu yang cukup panjang maka posisi keuangan daerah menjadi sangat sentral. Sebagaimana yang diungkapkan Jones dan Pendlebury bahwa salah satu fungsi anggaran daerah sebagai otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang yang dalam hal ini adanya tuntutan akan pemenuhan kewajiban Pemerintah Kota Surabaya kepada pihak kreditor. Korelasi antara variabel kemampuan keuangan daerah dengan efektivitas manajemen pinjaman daerah dijelaskan pada tabulasi silang dibawah ini:

Tabel IV. 7
Korelasi Variabel Kemampuan Keuangan Daerah dengan Efektivitas
Manajemen Pinjaman Daerah

Efektivitas Manajemen Pinjaman Daerah (Y)	Kemampuan Keuangan Daerah (X3)				Total
	Buruk	Kurang baik	Cukup baik	Baik	
Rendah	2 6,7 %	3 10 %	1 3,3 %	-	6 20 %
Kurang Tinggi	1 3,3 %	1 3,3 %	2 6,7 %	1 3,3 %	5 16,7 %
Cukup Tinggi	3 10 %	3 10 %	4 13,3 %	-	10 33,3 %
Tinggi	-	1 3,3 %	7 23,3 %	1 3,3 %	9 30 %
Total	6 20 %	8 26,6 %	14 46,6 %	2 6,7 %	30 100 %

Sumber: Pengolahan data primer

Dari tabel IV.7 dapat diketahui dari 30 responden, dari 6 responden yang menyatakan efektivitas manajemen pinjaman daerah rendah, 6,7 % responden menyatakan kemampuan keuangan daerah buruk, 10 % responden menyatakan kemampuan keuangan daerah kurang baik serta 3,3 % responden menyatakan kemampuan keuangan daerah cukup baik. Dari 5 responden yang menyatakan efektivitas manajemen pinjaman daerah kurang tinggi, 3,3 % responden menyatakan kemampuan keuangan daerah buruk, 3,3 % responden menyatakan kemampuan keuangan daerah kurang baik, 6,7 % responden menyatakan bahwa kemampuan keuangan daerah cukup baik serta 3,3 % responden menyatakan kemampuan keuangan daerah baik. Dari 10 responden yang menyatakan efektivitas manajemen pinjaman daerah cukup tinggi, 10 % responden menyatakan kemampuan keuangan daerah buruk, 10 % responden menyatakan kemampuan keuangan daerah kurang baik serta 13,3 % responden menyatakan kemampuan keuangan daerah cukup baik. Dari 9 responden yang menyatakan efektivitas manajemen pinjaman daerah tinggi, 3,3 % responden menyatakan kemampuan keuangan daerah kurang baik, 23,3 % responden menyatakan kemampuan keuangan daerah cukup baik serta 3,3 % responden menyatakan kemampuan keuangan daerah baik.

Langkah berikutnya adalah mencari hubungan antara kemampuan keuangan daerah dan tingkat keefektifan manajemen pinjaman daerah. Penentuan sel a,b,c dan d ditetapkan berdasar persentase terbesar di margin bebas sehingga diperoleh hasil sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Sel a - sel b} &= 20-26,6 \% &= 6,6 \% \\
 \text{Sel a - sel c} &= 20-46,6 \% &= 26,6 \% \\
 \text{Sel a - sel d} &= 20-6,7 \% &= 13,4 \% \\
 \text{Sel b - sel c} &= 26,6-46,6 \% &= 20 \% \\
 \text{Sel b - sel d} &= 26,6-6,7 \% &= 19,9 \% \\
 \text{Sel c - sel d} &= 46,6-6,7 \% &= 39,9 \% + \\
 && \underline{\hspace{1.5cm}} \\
 && 126,4 \%
 \end{aligned}$$

Kemudian dari hasil penjumlahan tersebut dicari rata-rata dari keempat sel dan diperoleh hasil 31,6 %. Karena 31,6 % > 10 %, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara variabel kemampuan keuangan daerah dengan tingkat keefektifan manajemen pinjaman daerah.

IV.1.8. Uji Statistik Korelasi antara Kemampuan Aparat, Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Kemampuan Keuangan Daerah dengan Efektivitas Manajemen Pinjaman Daerah

IV.1.8.1. Uji Analisis Korelasi Parsial

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa uji korelasi parsial bermaksud untuk mengetahui murni atau tidaknya hubungan x_1 (kemampuan aparat) terhadap y (efektivitas manajemen pinjaman daerah) dengan dikontrol prediktor x_2 (sistem informasi keuangan daerah), untuk mengetahui murni tidaknya hubungan prediktor x_2 terhadap y dengan dikontrol x_3 (kemampuan keuangan daerah) dan yang ketiga adalah untuk mengetahui murni tidaknya hubungan prediktor x_3 terhadap y dengan dikontrol prediktor x_1 . Tujuan

pengontrolan ini adalah agar kita dapat menemukan harga korelasi murni dari pengaruh ubahan yang lain. Pengontrolan tersebut merupakan suatu metode terbaik untuk memperoleh koefisien korelasi murni. Adapun rumus korelasi antara prediktor x_1 dan kriterium y , jika prediktor x_2 dikontrol:

$$r_{y_1-2} = \frac{r_{y_1} - (r_{y_2})(r_{12})}{\sqrt{(1-r_{y_2}^2)(1-r_{12}^2)}}$$

Keterangan:

r_{y_1-2} : Koefisien korelasi parsial antara variabel kriterium (y) dan variabel prediktor x_1 dengan dikontrol variabel prediktor x_2

r_{1-2} : Koefisien korelasi *product moment* antara variabel kriterium (y) dan variabel prediktor x_1 dengan dikontrol oleh variabel prediktor x_2

r_{y_1} : Koefisien korelasi *product moment* antara variabel y dan variabel x_1

r_{y_2} : Koefisien korelasi *product moment* antara variabel y dan variabel x_2

Uji statistik korelasi parsial dalam penelitian ini dibantu dengan komputer menggunakan program SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*) versi 10.

Dari perhitungan komputer diperoleh hasil :

$$r_{y_1} = 0,668$$

$$r_{y_2} = 0,473$$

$$r_{12} = 0,460$$

$$r_{y_1-2} = \frac{0,668 - (0,473)(0,460)}{\sqrt{(1-0,473^2)(1-0,460^2)}} = 0,836$$

Selanjutnya untuk menguji signifikan tidaknya korelasi diatas, maka dicari harga t nya dengan rumus :

$$t = \frac{r_{y_1 y_2}}{(1-r_{y_1 y_2}^2):(N-3)}$$

$$r_{y_1 y_2}^2 = 0,699$$

$$N = 30$$

$$t = \frac{0,836}{(1-0,699):(30-3)} = 76$$

Kemudian setelah diperoleh nilai $t_{analisis}$, maka langkah selanjutnya adalah membandingkan $t_{analisis}$ dengan t_{tabel} , dengan db = N-3, dan taraf signifikansi 5 % pada pengujian satu ekor. Apabila nilai $t_{analisis} > t_{tabel}$ maka dapat dikatakan bahwa ada hubungan yang positif dan signifikan antara variabel kemampuan aparat dan efektivitas manajemen pinjaman daerah jika variabel sistem informasi keuangan daerah dikontrol. Dari tabel nilai t dengan db = 27 pada taraf signifikansi 5 % diperoleh angka:

	0,05
26	1,66
27	2,04

dari perhitungan diatas dapat dilihat bahwa $t_{analisis} > t_{tabel}$ ($76 > 2,04$), maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang positif dan signifikan antara variabel kemampuan aparat dan efektivitas manajemen pinjaman daerah jika variabel sistem informasi keuangan daerah dikontrol.

Untuk korelasi antara x_2 dan y jika variabel x_3 dikontrol adalah sebagai berikut:

$$r_{y_{2-3}} = \frac{r_{y_2} - (r_{y_3})(r_{23})}{\sqrt{(1-r_{y_3}^2)(1-r_{23}^2)}}$$

Dari perhitungan komputer diperoleh hasil :

$$\begin{aligned} r_{y_2} &= 0,473 \\ r_{y_3} &= 0,349 \\ r_{23} &= 0,158 \\ r_{y_{2-3}} &= \frac{0,473 - (0,349)(0,158)}{\sqrt{(1-0,349^2)(1-0,158^2)}} = 0,452 \end{aligned}$$

Selanjutnya untuk menguji signifikan tidaknya korelasi diatas, maka dicari harga

t nya dengan rumus :

$$t = \frac{r_{y_{23}}}{\sqrt{(1-r_{y_{23}}^2):(N-3)}}$$

$$\begin{aligned} r_{y_{2-3}}^2 &= 0,204 \\ N &= 30 \\ t &= \frac{0,452}{\sqrt{(1-0,204):(30-3)}} = 15,586 \end{aligned}$$

Karena $t_{analisis} > t_{tabel}$ ($15,586 > 2,04$), maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang positif dan signifikan antara variabel sistem informasi keuangan daerah dan efektivitas manajemen pinjaman daerah jika variabel kemampuan keuangan daerah dikontrol.

Selanjutnya untuk korelasi antara x_3 dan y jika variabel x_1 dikontrol adalah sebagai berikut:

$$r_{y_{3-1}} = \frac{r_{y_3} - (r_{y_1})(r_{31})}{\sqrt{(1-r_{y_1}^2)(1-r_{31}^2)}}$$

Dari perhitungan komputer diperoleh hasil :

$$\begin{aligned}
 r_{y_3} &= 0,349 \\
 r_{y_1} &= 0,668 \\
 r_{31} &= 0,336 \\
 r_{y_{3-1}} &= \frac{0,349 - (0,668)(0,336)}{\sqrt{(1-0,668^2)(1-0,336^2)}} = 0,178
 \end{aligned}$$

Selanjutnya untuk menguji signifikan tidaknya korelasi diatas, maka dicari harga t nya dengan rumus :

$$t = \frac{r_{y_{31}}}{\sqrt{(1-r_{y_{31}}^2):(N-3)}}$$

$$\begin{aligned}
 r_{y_{31}}^2 &= 0,032 \\
 N &= 30 \\
 t &= \frac{0,178}{\sqrt{(1-0,032):(30-3)}} = 4,944
 \end{aligned}$$

Karena $t_{analisis} > t_{tabel}$ ($4,944 > 2,04$), maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang positif dan signifikan antara variabel kemampuan keuangan daerah dan efektivitas manajemen pinjaman daerah jika variabel kemampuan aparat dikontrol.

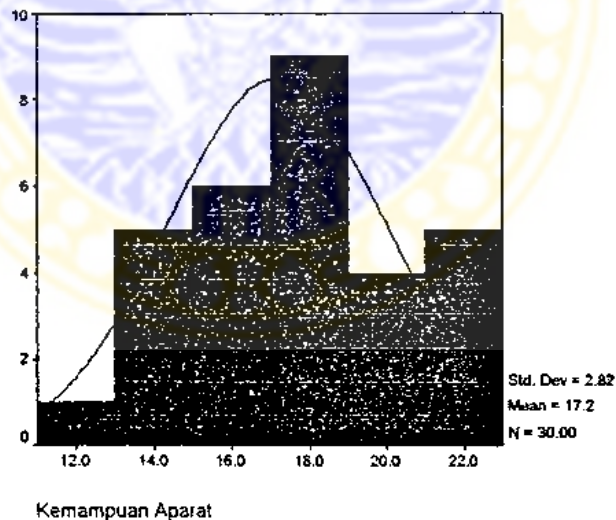
IV.1.8.2. Uji Analisis Regresi Ganda

Analisis regresi digunakan untuk membuktikan apakah hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya ditolak atau diterima. Namun dalam melakukan analisis regresi ganda terdapat beberapa asumsi yang harus dipenuhi. Asumsi-asumsi yang harus dipenuhi adalah:

1. Asumsi bahwa sampel diambil secara acak atau secara universal, dalam penelitian ini sampel diambil secara universal

2. Asumsi *normal distribution of dependent variables* yakni bahwa ubahan taut y mengikuti sebaran normal. Uji normalitas sebaran berfungsi untuk melihat apakah sebaran data variabel dependen normal atau tidak. Asumsi ini diperlukan karena populasi yang luas variabel yang sedang dianalisis mengikuti hubungan sebaran normal baku dari Gauss. Sebaran itu digambarkan dengan grafik poligon akan menyerupai bentuk bel/genta.¹¹⁸ Dalam penelitian ini melalui uji normalitas menggunakan *kolmogorof smirnov test* pada variabel kemampuan aparat diperoleh hasil Kolmogorof Smirnov Z sebesar 0,616 dengan p (*probability of error*) = 0,843. Berikut ini akan disajikan histogram dari uji normalitas pada variabel kemampuan aparat.

Grafik IV.1
Histogram Variabel Kemampuan Aparat



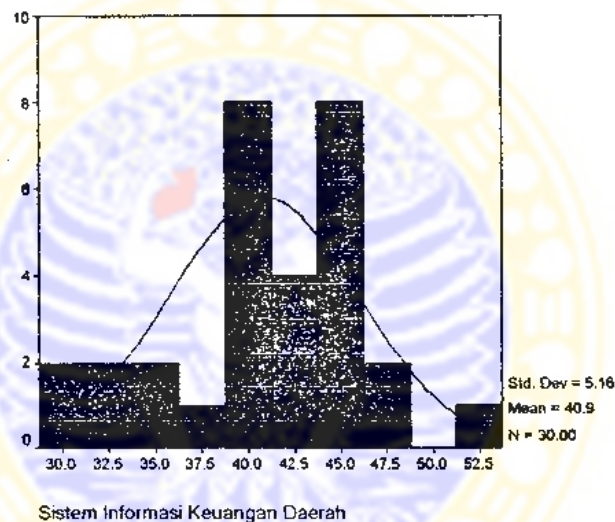
Dari histogram diatas dapat dilihat bahwa sebaran data variabel kemampuan aparat adalah normal. Hal ini dibuktikan dengan bentuk

¹¹⁸ Sutrisno Hadi. *Op Cit*, hal.80.

poligon sebaran datanya yang mengikuti garis normal dan menyerupai genta/bel.

Pada variabel sistem informasi keuangan daerah didapatkan nilai Kolmogorof Smirnov Z sebesar 0,730 dan $p = 0,661$. Sedangkan berdasar histogram dari uji normalitas pada variabel sistem informasi keuangan daerah diperoleh gambaran sebagai berikut:

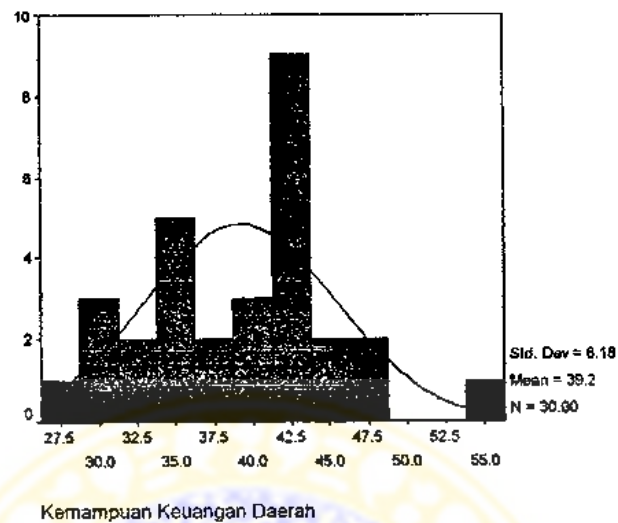
Grafik IV.2
Histogram Variabel Sistem Informasi Keuangan Daerah



Dari histogram diatas dapat dilihat bahwa sebaran data variabel sistem informasi keuangan daerah adalah normal. Hal ini dibuktikan dengan bentuk poligon sebaran datanya yang mengikuti garis normal dan menyerupai genta/bel.

Pada variabel kemampuan keuangan daerah didapatkan nilai Kolmogorof Smirnov Z sebesar 0,799 dan $p = 0,546$. Sedangkan berdasar histogram dari uji normalitas pada variabel kemampuan keuangan daerah diperoleh gambaran sebagai berikut:

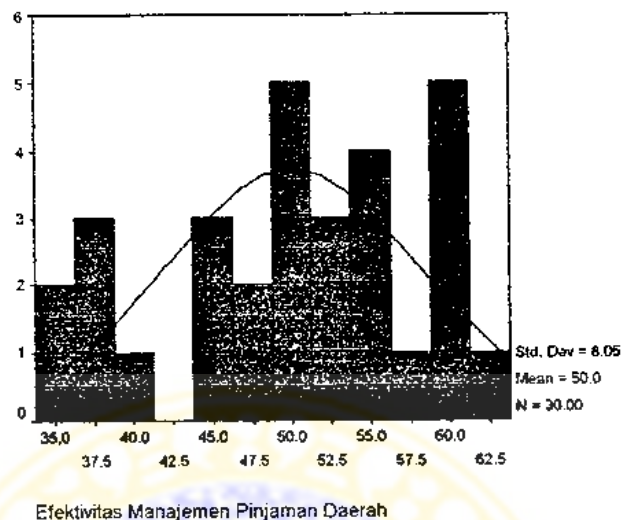
Grafik IV.3
Histogram Variabel Kemampuan Keuangan Daerah



Dari histogram diatas dapat dilihat bahwa sebaran data variabel kemampuan keuangan daerah adalah normal. Hal ini dibuktikan dengan bentuk poligon sebaran datanya yang mengikuti garis normal dan menyerupai genta/bel.

Sedangkan pada variabel efektivitas manajemen pinjaman daerah didapatkan nilai Kolmogorof Smirnov Z sebesar 0,544 dan $p = 0,929$. Sedangkan berdasar histogram dari uji normalitas pada variabel efektivitas manajemen pinjaman daerah diperoleh gambaran sebagai berikut:

Grafik IV.4
Histogram Variabel Efektivitas Manajemen Pinjaman Daerah



Dari histogram diatas dapat dilihat bahwa sebaran data variabel efektivitas manajemen pinjaman daerah adalah normal. Hal ini dibuktikan dengan bentuk poligon sebaran datanya yang mengikuti garis normal dan menyerupai genta/bel.

3. Asumsi *linearity of corellation* yaitu bahwa antara sama x dengan y adalah linier. Berdasarkan hasil penghitungan dengan menggunakan SPSS versi 10, pada variabel kemampuan aparat dan tingkat keefektifan manajemen pinjaman daerah diperoleh nilai F sebesar 0,869 dengan $p = 0,628$, dikarenakan nilai p lebih besar dari 0,05 maka dapat dinyatakan bahwa hubungan antara variabel kemampuan aparat dan tingkat keefektifan manajemen pinjaman daerah mengikuti garis linier. Pada variabel sistem informasi keuangan daerah diperoleh nilai F sebesar 2,058 dengan $p = 0,148$. Dikarenakan nilai p lebih besar dari 0,05 maka dapat dinyatakan bahwa hubungan antara variabel sistem informasi keuangan daerah dan

tingkat keefektifan manajemen pinjaman daerah mengikuti garis linier. Sedangkan pada variabel kemampuan keuangan daerah diperoleh nilai F sebesar 1,398 dengan $p = 0,324$. Dikarenakan nilai p lebih besar dari 0,05 maka dapat dinyatakan bahwa hubungan antara kemampuan keuangan daerah dan tingkat keefektifan manajemen pinjaman daerah mengikuti garis linier.

4. Asumsi *non colinearity of the independent variables*, yaitu bahwa antara sesama ubahan bebas x , $r > 0,080$. Berdasarkan perhitungan komputer diperoleh hasil bahwa koefisien korelasi antara variabel bebas yaitu variabel kemampuan aparat, sistem informasi keuangan daerah dan kemampuan keuangan daerah adalah sebesar 0,727. Jadi asumsi ini dapat terpenuhi karena koefisien korelasi antara variabel bebas lebih besar dari 0,080.

Setelah asumsi-asumsi tersebut dipenuhi, maka selanjutnya adalah melakukan analisa regresi ganda. Analisa regresi ganda dilakukan untuk menguji hipotesis penelitian yang telah dibuat diterima atau ditolak. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Hipotesa Kerja

- Ada pengaruh antara kemampuan aparat, sistem informasi keuangan daerah dan kemampuan keuangan daerah terhadap efektivitas manajemen pinjaman daerah.

2. Hipotesis Nol

- Tidak ada pengaruh antara kemampuan aparat, sistem informasi keuangan daerah dan kemampuan keuangan daerah terhadap efektivitas manajemen pinjaman daerah.

Pada penelitian ini taraf signifikansi yang dipakai adalah 5 % sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian memiliki tingkat kesalahan sebesar 5 % atau sebesar 0,05. Sedang keakuratan data yang digunakan adalah 95%.

Berdasarkan analisis SPSS versi 10 diperoleh hasil:

1. Persamaan garis regresi antara kriterium (variabel y) dan prediktor (variabel x_1 , x_2 dan x_3) adalah:

$$y = 1,260x_1 + 0,483x_2 + 0,325x_3 - 4,103$$

2. Koefisien korelasi antara kriterium y dan prediktor x_1 , prediktor x_2 dan prediktor x_3 (R_{y123}) adalah $R = 0,727$ dan $R \text{ Square} = 0,474$ (lihat lampiran). Dan untuk menentukan apakah koefisien korelasi tersebut signifikan atau tidak maka dicari nilai F regresi dengan rumus:

$$F_{reg} = \frac{R^2(N - m - 1)}{m(1 - R^2)}$$

Nilai F_{reg} sebesar 9,710. Untuk menentukan apakah nilai F_{reg} signifikan atau tidak maka nilai F_{reg} dibandingkan dengan F_{tabel} berdasarkan db-nya. Untuk menemukan db digunakan cara db = m lawan (N - m - 1) atau 3 lawan 26. Dari tabel F dengan taraf signifikansi 5 % diperoleh angka:

3

26	1,89
27	2,01

Kemudian F_{reg} dibandingkan dengan F_{tabel} . Karena nilai $F_{reg} > F_{tabel}$ ($9,710 > 1,89$) maka dapat disimpulkan bahwa korelasi antara kriterium dan prediktor-prediktor adalah signifikan. Dengan demikian maka ada hubungan yang positif dan signifikan antara variabel kemampuan aparat, sistem informasi keuangan daerah dan kemampuan keuangan daerah terhadap tingkat keefektifan manajemen pinjaman daerah.

3. Besarnya sumbangan variabel bebas terhadap variabel terikat adalah sebesar 47,4 % (*Adjusted R_{Square}*). Hal ini dapat berarti bahwa secara bersama-sama variabel kemampuan aparat, sistem informasi keuangan daerah dan kemampuan keuangan daerah memberikan sumbangan atau pengaruh sebesar 47,4 % terhadap variabel tingkat keefektifan manajemen pinjaman daerah. Sedangkan untuk mengetahui besarnya sumbangan masing-masing variabel dapat dilihat melalui melalui *standardized coefficient* (beta) pada tabel *coefficients*. Dari pengujian komputer dapat dilihat bahwa sumbangan variabel kemampuan aparat terhadap tingkat keefektifan manajemen pinjaman daerah sebesar 44,1 %. Sumbangan variabel sistem informasi keuangan daerah sebesar 31 %. Sedangkan sumbangan variabel kemampuan keuangan daerah sebesar 25 %. Berdasarkan hasil diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh variabel kemampuan aparat, sistem informasi keuangan daerah dan

kemampuan keuangan daerah adalah sebesar 47,4 % dan sisanya 52,6 % dipengaruhi oleh variabel lain.

4. Untuk mengetahui kecermatan prediksi regresi ganda yang dilakukan dapat dilihat dengan cara membandingkan Standar deviasi y (S_y) dengan Standar Error (SEst). Dari hasil analisis regresi ganda yang dilakukan diketahui bahwa $S_y > SEst$ ($8,05 > 5,834$). Karena nilai S_y lebih besar dibandingkan SEst maka prediksi regresi ganda dilakukan dengan cermat.

IV.2. Interpretasi Data

Sebelum diberlakukannya UU No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pemerintah Daerah telah dapat memanfaatkan sumber penerimaan yang berasal dari luar negeri (pinjaman daerah) sebagai salah satu sumber penerimaannya. Perkembangan kebijakan selanjutnya dengan diberlakukannya UU No.25 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.33 Tahun 2004, pengaturan pelaksanaan pinjaman daerah semakin tegas sebagai upaya dari Pemerintah untuk mengendalikan perolehan jumlah pinjaman daerah mengingat naiknya jumlah tunggakan.

Berdasarkan pengaturan kerangka hukum tersebut, Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan beberapa pinjaman sebagaimana yang tercantum dalam tabel I.5. Salah pinjaman yang dilakukan yang menjadi fokus dalam penelitian ini berasal dari *International Bank of Reconstruction And Development* (IBRD) yang dituangkan dalam *Loan Agreement* No.3726-IND tanggal 14 Mei 1994 dengan Pemerintah kemudian diteruskanpinjamkan berdasarkan *Subsidiary Loan Agreement* No.764/DP3/1994 tanggal 14 September 1994 kepada Pemerintah Kota Surabaya

dengan jangka waktu penenuhan kewajiban selama 21 tahun yang diperkirakan akan berakhir pada tahun 2014. Mengingat masih beberapa tahun kedepan lagi Pemerintah Kota Surabaya harus memenuhi kewajibannya tentu saja banyak hal yang mempengaruhi efektivitas manajemen pinjaman daerah tersebut. Adapun dalam penelitian ini penulis menekankan pada tiga hal utama yakni kemampuan aparat daerah, penerapan sistem informasi keuangan daerah serta kemampuan keuangan daerah.

Dalam penelitian ini setelah dilakukan analisa dan pengujian statistik dapat diketahui bahwa variabel tingkat kemampuan aparat menyumbang kontribusi terbesar bagi terciptanya efektivitas manajemen pinjaman daerah dengan signifikansi sebesar 44,1 % diikuti kemudian sistem informasi keuangan daerah sebesar 31 % dan kemampuan keuangan daerah sebesar 25 %.

Dalam analisa tabulasi silang dapat diketahui bahwa semakin baik kemampuan aparat, semakin baik sistem informasi keuangan daerah dan semakin baik kemampuan keuangan daerah akan menghasilkan efektivitas manajemen pinjaman daerah yang tinggi. Adapun mayoritas jawaban yang diberikan responden untuk variabel kemampuan aparat, sistem informasi keuangan daerah dan kemampuan keuangan daerah serta efektivitas manajemen pinjaman daerah termasuk dalam kategori cukup dan memiliki kecenderungan kearah tinggi.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa efektivitas manajemen pinjaman daerah dipengaruhi antara lain oleh kemampuan aparat, sistem informasi keuangan daerah dan kemampuan keuangan daerah. Sondang mengemukakan bahwa keberhasilan pelaksanaan tugas, pada akhirnya tidak

terletak pada sistematika pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab, juga tidak pula pada tersedianya anggaran, juga tidak terletak pada lengkapnya aturan permainan, dalam bentuk prosedur dan hubungan kerja, kesemuanya itu penting tetapi tidak cukup. Hal ini akan menjadi hidup dan bermakna operasional bila manusianya mempunyai pandangan yang tepat dan mempunyai kemampuan serta keunggulan kerja untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang diletakkan di atas pundaknya. Ini menunjukkan bahwa kemampuan aparat dapat mempengaruhi efektivitas manajemen pinjaman daerah. Selanjutnya Terry menyatakan bahwa dengan melalui pengumpulan sistematik, pengolahan dan penyebaran data akan menyediakan semua informasi yang perlu kepada organisasi, agar supaya dapat memberikan bantuan maksimum dalam pencapaian tujuan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem informasi keuangan daerah dapat mempengaruhi efektivitas manajemen pinjaman daerah. Sedangkan Jones dan Pendlebury mengatakan bahwa anggaran daerah harus mampu secara optimal difungsikan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja. Sebagai otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, tentunya efektivitas manajemen pinjaman daerah dipengaruhi oleh kemampuan keuangan daerah.

IV.2.1. Kemampuan Aparat

Dalam penelitian ini kemampuan aparat merupakan potensi dan keahlian aparaturnegara, baik secara fisik maupun mental berkaitan dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperolehnya dari pendidikan, latihan dan pengalaman untuk melakukan tugas dan pekerjaannya serta memanfaatkan dan mengolah sumber-sumber yang ada.

Menurut Miftah Toha kemampuan merupakan salah satu unsur kematangan, berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan yang dapat diperoleh dari pendidikan, latihan atau pengalaman. Selanjutnya James H. Donnely mengartikan kemampuan adalah sifat bawaan (bawaan sejak lahir atau dipelajari) yang memungkinkan seseorang melakukan sesuatu yang bersifat mental dan fisik. Sedangkan Moenir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kemampuan dalam hubungan dengan pekerjaan ialah suatu keadaan pada seseorang yang secara penuh kesungguhan, berdaya guna dan berhasil guna melaksanakan pekerjaan sehingga menghasilkan sesuatu yang optimal.

Dengan demikian kemampuan aparat dapat dilihat melalui kesesuaian antara pendidikan aparat dengan spesifikasi pekerjaan yang dijalankannya sebagaimana yang ditunjukkan oleh tabel III.1 bahwa sebanyak 53,3 % responden menyatakan cukup sesuai. Disamping itu, kemampuan aparat juga menyangkut tingkat pendidikan non formal aparat sebagaimana yang ditunjukkan oleh tabel III.2 bahwa sebanyak 60 % responden menyatakan frekuensi pendidikan non formal berkisar antara 1 sampai 4 kali dalam setahun dan sebanyak 50 % responden menyatakan pendidikan non formal yang ditempuh tersebut cukup

sesuai dengan pekerjaan yang dijalani. Tingkat kesesuaian pelaksanaan tugas dengan peraturan juga akan membentuk kemampuan aparat sebagaimana yang ditunjukkan oleh tabel III.4 bahwa sebanyak 46,7 % responden menyatakan hampir selalu. Selain itu, hasil pelaksanaan tugas yang dibebankan juga tergantung pada pemahaman aparat terhadap standar kerja yang ditetapkan sebagaimana yang ditunjukkan oleh tabel III.5 bahwa sebanyak 53,3 % responden menyatakan cukup memahami serta berdasarkan tabel III.6 sebanyak 56,7 % responden menyatakan cukup sesuai antara pekerjaan dengan standar kerja yang ditetapkan.

IV.2.2. Sistem Informasi Keuangan Daerah

Sistem Informasi Keuangan Daerah adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah.

Menurut Mcleod sistem diartikan sebagai: *A system is a group of element that are integrated with the common purpose of achieving objective.* Selanjutnya Burch dan Strater mendefinisikan sistem sebagai suatu sistem dapat dirumuskan sebagai setiap kumpulan bagian-bagian atau sub-sub sistem yang disatukan, yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan informasi menurut Murdick adalah terdiri dari data yang telah diambil kembali, diolah atau sebaliknya digunakan untuk tujuan informatif atau kesimpulan, argumentasi atau sebagai dasar untuk peramalan atau pengambilan keputusan. Menurut Mcleod informasi

akan berguna bila memenuhi dimensi dasar atas informasi yaitu (a) relevan, (b) akurat, (c) tepat waktu serta (d) lengkap.

Menurut Anthony dan Scott sistem informasi yang efektif adalah sistem informasi organisasi yang dapat memberikan berbagai jenis informasi yang dibutuhkan oleh para pengambil keputusan yang mempunyai tingkat tanggung jawab yang berlainan; pengendalian informasi, pengendalian manajemen dan perencanaan strategis. Sedangkan menurut Davis dapat dilihat dari (1) informasi dan nilai informasi, (2) manusia sebagai pengelola informasi, dan (3) mesin atau peralatan yang dipakai dalam sistem.

Dengan demikian yang dipakai tolak ukur bagi penerapan sistem informasi keuangan daerah ini yaitu tingkat evaluasi kegunaan sistem yang dirasakan, sebagaimana yang ditunjukkan tabel III.7 sebanyak 46,7 % responden menyatakan bahwa frekuensi penggunaan SIKD cukup sering dalam mendukung kinerja sehari-hari, tabel III.8 sebanyak 63,3 % responden menyatakan bahwa penyediaan informasi SIKD cukup sesuai dengan kebutuhan kerja, tabel III.9 sebanyak 40 % responden menyatakan bahwa penyediaan informasi dalam SIKD tersebut cukup membantu penyelesaian kinerja secara lebih cepat, tabel III.10 sebanyak 40 % responden menyatakan bahwa penyediaan sistem informasi dalam SIKD tersebut cukup berpengaruh membantu peningkatan prestasi kerja, tabel III.11 sebanyak 73,3 % responden menyatakan bahwa penyediaan sistem SIKD tersebut cukup berpengaruh dalam memberi kemampuan bekerja secara lebih efektif. Disamping itu, tingkat evaluasi kualitas informasi, sebagaimana yang ditunjukkan tabel III.12 sebanyak 43,3 % responden menyatakan bahwa tingkat akurasi informasi pada

SIKD tersebut cukup akurat, tabel III.13 sebanyak 60 % responden menyatakan bahwa tingkat ketepatan waktu penyediaan informasi pada SIKD tersebut cukup tepat waktu pada saat dibutuhkan, tabel III.14 sebanyak 46,7 % responden menyatakan bahwa tingkat kesesuaian fungsi sistem informasi tersebut sangat sesuai dengan kebutuhan manajemen, tabel III.15 sebanyak 56,7 % responden menyatakan bahwa tingkat komprehensibilitas informasi yang dihasilkan cukup dapat dimengerti. Tingkat evaluasi kemudahan penggunaan sistem yang dirasakan juga mempengaruhi efektivitas sistem informasi, sebagaimana yang ditunjukkan tabel III.16 sebanyak 60 % responden menyatakan bahwa cukup mudah mempelajari cara mengoperasionalkan SIKD, tabel III.17 sebanyak 53,3 % responden menyatakan bahwa tingkat kemudahan dalam memerintahkan sistem informasi tersebut sesuai dengan keinginan tergolong cukup mudah, tabel III.18 sebanyak 63,3 % responden menyatakan bahwa tingkat keterampilan responden cukup terampil dalam menggunakan SIKD. Tingkat evaluasi kemampuan aparat dalam menggunakan komputer juga dijadikan indikator penelitian ini dalam menilai efektivitas sistem informasi, sebagaimana yang ditunjukkan tabel III.19 sebanyak 60 % responden menyatakan bahwa cukup terbantu dengan adanya penerapan sistem informasi tersebut dalam menyelesaikan tugas secara lebih baik.

IV.2.3. Kemampuan Keuangan Daerah

Menurut Halim (2001), ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi adalah (1) kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan

pemerintahan; (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin.

Faktor keuangan merupakan faktor yang esensial dalam mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan kemampuan keuangan daerah adalah kemampuan dan kewenangan yang dimiliki oleh daerah untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakannya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk mengetahui kinerja keuangan daerah menurut hikmah diantaranya dapat dilihat dari desentralisasi fiskal, kebutuhan fiskal, kapasitas fiskal, upaya fiskal. Menurut Musgrave dan Musgrave dalam mengukur kinerja keuangan dapat digunakan derajat desentralisasi fiskal yaitu rasio Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak serta sumbangan dan bantuan terhadap penerimaan daerah, sebagaimana yang ditunjukkan tabel III.20 sebanyak 60 % responden menyatakan bahwa kontribusi PAD dengan total penerimaan daerah sangat berpengaruh, tabel III.23 sebanyak 50 % responden menyatakan bahwa rasio penerimaan BHPBP terhadap total penerimaan daerah sangat sesuai, tabel III.26 sebanyak 70 % responden menyatakan bahwa rasio sumbangan dan bantuan terhadap total penerimaan daerah cukup berpengaruh terhadap total penerimaan daerah.

Berkenaan dengan hubungan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan yang acuan digunakan Paul Harsey dan Kenneth Blanchard maka pola hubungan yang terbentuk adalah *partisipatif* yaitu peran Pemerintah Pusat

semakin berkurang dikarenakan tingkat kemandirian daerah mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah. Hal ini dapat dilihat berdasarkan tabel III.21 sebanyak 60 % responden menyatakan bahwa persentase kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah berkisar antara 50-75 %, tabel III.24 sebanyak 40 % responden menyatakan bahwa persentase rasio penerimaan BHPBP terhadap total penerimaan daerah berkisar antara 50-75 % sedangkan tabel III.27 sebanyak 40 % responden menyatakan bahwa persentase rasio sumbangan dan bantuan terhadap total penerimaan daerah berkisar antara 50-75 %.

Selanjutnya indikator yang digunakan yaitu posisi fiskal daerah, gambaran kebutuhan fiskal daerah sebagaimana yang ditunjukkan tabel III.29 sebanyak 56,7 % responden menyatakan bahwa jumlah pengeluaran daerah cukup sesuai dengan kebutuhan fiskal daerah sedangkan tabel III.30 sebanyak 56,7 % responden menyatakan bahwa persentase rasio jumlah pengeluaran daerah dengan kebutuhan fiskal daerah berkisar antara 50-75 %.

Sedangkan gambaran kapasitas fiskal daerah, sebagaimana yang ditunjukkan tabel III.32 sebanyak 43,3 % responden menyatakan bahwa rasio PDRB cukup sesuai dengan jumlah penduduk sedangkan tabel III.33 sebanyak 50 % responden menyatakan bahwa persentase rasio PDRB terhadap jumlah penduduk berkisar antara 50-75 %. Selanjutnya gambaran kapasitas pemerintah daerah untuk meminjam sebagaimana yang ditunjukkan tabel III.35 sebanyak 60 % responden menyatakan bahwa batas jumlah pokok pinjaman cukup sesuai dengan total penerimaan APBD sedangkan tabel III.36 sebanyak 43,3 % responden menyatakan bahwa persentase batas jumlah pokok pinjaman dengan

total penerimaan daerah berkisar antara 25-50 %. Indikator terakhir yaitu rasio kemampuan membayar pinjaman sebagaimana yang ditunjukkan tabel III.38 sebanyak 56,7 % responden menyatakan bahwa menyatakan rasio kemampuan membayar pinjaman cukup sesuai dengan total pendapatan daerah sedangkan tabel III.39 sebanyak 33,3 % responden menyatakan bahwa persentase kesesuaian rasio kemampuan membayar pinjaman daerah dengan pendapatan daerah berkisar antara 50-75 %. Sebagai perbandingan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.129/PMK.02/2005 tentang Peta Kapasitas Fiskal dalam Rangka Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah Kepada Daerah dalam Bentuk Hibah maka indeks kapasitas fiskal Pemerintah Kota Surabaya sebesar 0,7556 sehingga termasuk dalam kategori sedang.

IV.2.4. Pengaruh Kemampuan Aparat, Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Kemampuan Keuangan Daerah Terhadap Efektivitas Manajemen Pinjaman Daerah

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tingkat efektivitas manajemen pinjaman daerah antara lain disebabkan oleh kemampuan aparat, sistem informasi keuangan daerah serta kemampuan keuangan daerah.

Dalam melaksanakan tugas yang dibebankan, hasil yang diperoleh akan tergantung pada tinggi rendahnya tingkat kemampuan yang melekat pada dirinya seperti yang dikemukakan oleh Miftah Toha karena perbedaan kemampuan ini maka dapat kiranya dipergunakan untuk memprediksi pelaksanaan dari hasil kerja seseorang yang bekerja sama di dalam organisasi tertentu. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Sondang bahwa memang harus diakui bahwa pada

umumnya organisasi dihadapkan pada situasi kelangkaan sepanjang menyangkut sarana dan prasarana kerja. Akan tetapi situasi kelangkaan itu tidak boleh mengurangi tekad dan kemampuan untuk bekerja keras, malahan salah satu indikator efektifitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan yang mungkin disediakan oleh organisasi. Lebih lanjut lagi Sondang menyatakan keberhasilan pelaksanaan tugas, pada akhirnya tidak terletak pada sistematika pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab, juga tidak pula pada tersedianya anggaran, juga tidak terletak pada lengkapnya aturan permainan, dalam bentuk prosedur dan hubungan kerja, kesemuanya itu penting tetapi tidak cukup. Hal ini akan menjadi hidup dan bermakna operasional bila manusianya mempunyai pandangan yang tepat dan mempunyai kemampuan serta keunggulan kerja untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang diletakkan di atas pundaknya.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dapat dikatakan bahwa kemampuan aparat memiliki hubungan yang erat dengan efektivitas manajemen pinjaman daerah. Melalui analisis korelasi *product moment* diperoleh hasil korelasi antara kemampuan aparat dengan efektivitas manajemen pinjaman daerah sebesar 0,668 dengan taraf signifikansi sebesar 5%, oleh karena hasil r analisis $> r$ tabel, $0,668 > 0,306$ sehingga diperoleh kesimpulan terdapat hubungan yang signifikan antara kemampuan aparat dan efektivitas manajemen pinjaman daerah. Gambaran hubungannya dapat dilihat pada tabel IV.5, dari tabel tersebut menunjukkan semakin baik kemampuan aparat maka semakin tinggi efektivitas manajemen pinjaman daerah begitu juga sebaliknya.

Selain itu, menurut Zulkifli kegiatan manajemen memerlukan dukungan informasi. Tanpa dukungan informasi, manajemen suatu organisasi tidak akan mencapai tujuan yang direncanakan, apalagi untuk mencapai sasaran secara efisien dan efektif. Terry juga menyatakan bahwa sistem informasi akan meliputi semua badan usaha dan melalui pengumpulan sistematis, pengolahan dan penyebaran data akan menyediakan semua informasi yang perlu kepada semua organisasi, agar supaya dapat memberikan bantuan maksimum dalam pencapaian tujuan. Disisi lain, untuk dapat menjadi organisasi yang berkembang maka organisasi tersebut harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu perlu diciptakan suatu saluran informasi yang memungkinkan organisasi untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dapat dikatakan bahwa sistem informasi keuangan daerah memiliki hubungan yang erat dengan efektivitas manajemen pinjaman daerah. Melalui analisis korelasi *product moment* diperoleh hasil korelasi antara sistem informasi keuangan daerah dengan efektivitas manajemen pinjaman daerah sebesar 0,473 dengan taraf signifikansi sebesar 5%, oleh karena hasil r analisis $>$ r tabel, $0,473 > 0,306$ sehingga diperoleh kesimpulan terdapat hubungan yang signifikan antara sistem informasi keuangan daerah dan tingkat efektivitas manajemen pinjaman daerah. Gambaran hubungannya dapat dilihat pada tabel IV.6, dari tabel tersebut menunjukkan semakin baik sistem informasi keuangan daerah maka semakin tinggi efektivitas manajemen pinjaman daerah begitu juga sebaliknya.

Implikasi atas kondisi penerapan desentralisasi dan otonomi daerah adalah pentingnya daerah untuk dapat segera mandiri, khususnya di bidang keuangan daerah guna keperluan pembiayaan pembangunan. Pamudji menegaskan bahwa Pemerintah Daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan dan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Kemandirian daerah akan menunjang keberlangsungan fiskal dalam penyediaan sejumlah dana untuk membayar kewajiban pinjaman daerah (pembayaran hutang pokok, bunga, jasa bank maupun biaya komitmen). Sebagaimana yang diungkapkan Jones dan Pendlebury bahwa anggaran daerah harus mampu secara optimal difungsikan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dapat dikatakan bahwa kemampuan keuangan daerah memiliki hubungan yang erat dengan efektivitas manajemen pinjaman daerah. Melalui analisis korelasi *product moment* diperoleh hasil korelasi antara kemampuan keuangan daerah dengan efektivitas manajemen pinjaman daerah sebesar 0,349 dengan taraf signifikansi sebesar 5%, oleh karena hasil r analisis $>$ r tabel, $0,349 > 0,306$ sehingga diperoleh kesimpulan terdapat hubungan yang signifikan antara kemampuan keuangan daerah dan tingkat

efektivitas manajemen pinjaman daerah. Gambaran hubungannya dapat dilihat pada tabel IV.7, dari tabel tersebut menunjukkan semakin baik kemampuan keuangan daerah maka semakin tinggi efektivitas manajemen pinjaman daerah begitu juga sebaliknya.

Hubungan antara x_1 dengan y , x_2 dengan y dan x_3 dengan y merupakan hubungan yang murni. Artinya hubungan antara prediktor dengan kriterium tidak ada yang mengotori. Hal tersebut dapat diketahui dari uji korelasi parsial, dimana salah satu variabel pengaruhnya dikontrol untuk mengetahui murni tidaknya hubungan variabel pengaruh dan terpengaruh. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.8
T-Analisis dengan T-Tabel untuk Koefisien Korrelasi X1, X2 dan X3
Terhadap Y

No	Korelasi Parsial	Koefisien Korelasi	T- analisis	T-Tabel 5% (db:27)
1.	r_{y1-2}	0,836	76	2,04
2.	r_{y2-3}	0,452	15,586	2,04
3.	r_{y3-1}	0,178	4,944	2,04

Pada tabel IV.8 terlihat bahwa hubungan r_{y1-2} , r_{y2-3} dan r_{y3-1} dikatakan murni karena $t_{analisis} > t_{tabel}$ $\{(76 > 2,04) (15,586 > 2,04) \text{ dan } (4,944 > 2,04)\}$. Angka tersebut menunjukkan bahwa kemampuan aparat, sistem informasi keuangan daerah dan kemampuan keuangan daerah berpengaruh langsung terhadap efektivitas manajemen pinjaman daerah tanpa ada yang mengganggu hubungan tersebut, baik sebagai variabel antara, pengganggu dan lainnya.

Setelah dilakukan uji statistik korelasi parsial kemudian tahap selanjutnya adalah uji analisa regresi ganda. Uji analisa regresi ganda tersebut digunakan untuk mencari korelasi antara ubahan taut (kriterium) dengan ubahan bebas (prediktor) serta mencari seberapa besar pengaruh ubahan-ubahan bebas terhadap ubahan taut. dari uji statistik diketahui bahwa ada hubungan yang positif dan signifikan antara x_1, x_2 dan x_3 terhadap y . Hasil $F_{reg} = 9,710$, Nilai F_{reg} tersebut dinyatakan signifikan karena nilai $F_{reg} > F_{tabel}$ ($9,710 > 1,89$). Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa kemampuan aparat, sistem informasi keuangan daerah dan kemampuan keuangan daerah berpengaruh pada efektivitas manajemen pinjaman daerah. Sementara itu dari hasil pengujian statistik diperoleh hasil bahwa sumbangan variabel kemampuan aparat, sistem informasi keuangan daerah dan kemampuan keuangan daerah terhadap efektivitas manajemen pinjaman daerah sebesar 47,4 %. Dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Sedangkan sumbangan masing-masing prediktor dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel IV.9
Persentase Sumbangan X_1, X_2 dan X_3 Terhadap Y

No	Prediktor	Pengaruh (%)
1.	Kemampuan Aparat	44,1 %
2.	Sistem Informasi Keuangan Daerah	31 %
3.	Kemampuan Keuangan Daerah	25 %

Dari tabel IV.9 diatas dapat dilihat bahwa sumbangan variabel kemampuan aparat terhadap variabel efektivitas manajemen pinjaman daerah adalah sebesar 44,1 %. Sumbangan variabel sistem informasi keuangan daerah

terhadap variabel efektivitas manajemen pinjaman daerah adalah sebesar 31 %. Sedangkan variabel kemampuan keuangan daerah terhadap variabel efektivitas manajemen pinjaman daerah adalah sebesar 25 %. Sedangkan untuk mengetahui tingkatan sumbangan variabel kemampuan aparat, sistem informasi keuangan daerah dan kemampuan keuangan daerah terhadap efektivitas manajemen pinjaman daerah tersebut digunakan pedoman yang dikemukakan oleh Kartini Kartono¹¹⁹:

Tabel IV.10
Interpretasi Koefisien Korelasi

Koefisien Korelasi	Interpretasi
0,700 - 1,000	Tingkat Pengaruh Tinggi
0,440 - 0,699	Tingkat Pengaruh Cukup
0,200 - 0,439	Tingkat Pengaruh Rendah
0 - 0,199	Tingkat Pengaruh Sangat Rendah

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pengaruh ketiga variabel bebas (kemampuan aparat, sistem informasi keuangan daerah dan kemampuan keuangan daerah) terhadap variabel terikat (efektivitas manajemen pinjaman daerah) berada dalam interpretasi tingkat pengaruh cukup (47,4 % berada dalam *range* antara 44 % - 69,9 %).

Sumbangan variabel bebas pertama (44,1 %) lebih besar daripada variabel bebas kedua (31 %) dan ketiga (25 %). Hasil penelitian ini juga senada dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Sondang bahwa keberhasilan pelaksanaan tugas, pada akhirnya tidak terletak pada sistematika pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab, juga tidak pula pada tersedianya anggaran, juga tidak terletak

¹¹⁹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, Bandung : Alumi, 1980, hal.336.

pada lengkapnya aturan permainan, dalam bentuk prosedur dan hubungan kerja, kesemuanya itu penting tetapi tidak cukup. Hal ini akan menjadi hidup dan bermakna operasional bila manusianya mempunyai pandangan yang tepat dan mempunyai kemampuan serta keunggulan kerja untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang diletakkan di atas pundaknya. Dengan demikian, kemampuan aparat memiliki peranan yang penting dalam mencapai tujuan organisasi yang dalam hal ini keterampilan perangkat daerah tersebut diperlukan dalam mengelola dana pinjaman daerah tersebut.



BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Setelah melakukan analisa dan interpretasi data pada bab sebelumnya, peneliti akan menyajikan kesimpulan, saran-saran serta implikasi penelitian berdasarkan hasil temuan data dilapangan. Kesimpulan ini akan menjawab rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya. Dari hasil analisa dan interpretasi maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut;

- H_o yang diajukan dalam penelitian ini ditolak yang ditunjukkan dengan nilai $F_{reg} > F_{tabel}$ ($9,710 > 1,89$) sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh antara kemampuan aparat, sistem informasi keuangan daerah serta kemampuan keuangan daerah terhadap efektivitas manajemen pinjaman daerah.
- Nilai koefisien determinasi ($Adjusted R_{Square}$) menunjukkan kemampuan variabel bebas dalam menerangkan atau menjelaskan perubahan variabel terikat. Dari hasil analisis regresi diperoleh nilai koefisien determinasi ($Adjusted R_{Square}$) sebesar 0,474 artinya 47,4 % variabel efektivitas manajemen pinjaman daerah dapat dijelaskan oleh variabel kemampuan aparat, sistem informasi keuangan daerah serta kemampuan keuangan daerah sedang sisanya dipengaruhi oleh variabel lain.

- Sumbangan variabel kemampuan aparat terhadap efektivitas manajemen pinjaman daerah adalah sebesar 44,1 %. Sumbangan variabel sistem informasi keuangan daerah terhadap efektivitas manajemen pinjaman daerah adalah sebesar 31 %. Sedangkan untuk variabel kemampuan keuangan daerah adalah sebesar 25 %.
- Pada analisa tabulasi silang terbukti bahwa semakin baik kemampuan aparat, sistem informasi keuangan daerah dan kemampuan keuangan daerah maka semakin tinggi efektivitas manajemen pinjaman daerah.
- Pada uji korelasi parsial diperoleh hasil bahwa ada hubungan antara variabel kemampuan aparat dengan efektivitas manajemen pinjaman daerah, jika variabel sistem informasi keuangan daerah dikontrol dimana semakin baik kemampuan aparat maka semakin tinggi efektivitas manajemen pinjaman daerah. Untuk variabel sistem informasi keuangan daerah, jika variabel kemampuan keuangan daerah dikontrol juga terdapat hubungan dengan efektivitas manajemen pinjaman daerah, dimana semakin baik sistem informasi keuangan daerah yang dilakukan maka efektivitas manajemen pinjaman daerah semakin tinggi. Dan untuk variabel kemampuan keuangan daerah, jika variabel kemampuan aparat dikontrol juga terdapat hubungan dengan efektivitas manajemen pinjaman daerah, dimana semakin baik kemampuan keuangan daerah yang dilakukan maka efektivitas manajemen pinjaman daerah semakin tinggi.
- Melalui pedoman yang dikemukakan oleh Kartini Kartono, maka sumbangan variabel bebas (kemampuan aparat, sistem informasi keuangan

daerah serta kemampuan keuangan daerah) terhadap variabel tergantung (efektivitas manajemen pinjaman daerah) sebesar 47,4 % berada pada interpretasi pengaruh cukup. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel kemampuan aparat, sistem informasi keuangan daerah serta kemampuan keuangan daerah berpengaruh pada efektivitas manajemen pinjaman daerah pada tingkat cukup.

Kemampuan aparat menjadi variabel yang memberikan sumbangan lebih besar terhadap variabel efektivitas manajemen pinjaman daerah. Dalam hal ini kemampuan aparat mencakup tingkat pendidikan aparat pelaksana, tingkat pendidikan non formal aparat pelaksana, tingkat kesesuaian melaksanakan tugas dengan peraturan dan kebijaksanaan serta tingkat pemahaman pada standar kerja yang ditetapkan dan tugas yang harus diselesaikan.

V.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diberikan, peneliti ingin memberikan saran yang sekiranya dapat bermanfaat, beberapa saran tersebut diantaranya:

1. Kedepan perlu dipertimbangkan adanya suatu institusi yang menangani penyaluran dana untuk Pemerintah Daerah secara khusus (seperti *municipal development bank* atau *municipal development fund* yang sudah ada di negara lain). Institusi tersebut bisa dimiliki Pemerintah ataupun swasta namun pengaturannya dilakukan oleh Pemerintah. Tujuan dibentuknya institusi tersebut seperti (1) membuat level pinjaman yang dapat diperoleh daerah; (2) merencanakan kebutuhan pembiayaan pada

tiap unit Pemerintah Daerah; (3) mencari alternatif pendapatan guna membayar pokok dan bunga pinjaman daerah; (4) membuat kebijakan pinjaman yang akan membantu daerah dalam menjaga dan meningkatkan peringkat kreditnya; (5) mendukung daerah untuk mendapatkan persetujuan DPRD atas rencana pengambilan pinjaman.

2. Pemerintah Daerah diharapkan lebih berperan dalam penentuan proyek-proyek yang akan diajukan untuk mendapatkan pinjaman.
3. Proyek-proyek yang dibiayai dengan dana pinjaman mempunyai tujuan yang jelas yaitu untuk mengembangkan modal daerah.
4. Mengurangi risiko nilai tukar dengan mekanisme yang ada.

V.3. Implikasi Praktis dan Teoritik Terhadap Perkembangan Ilmu Pengetahuan.

Penyelenggaraan otonomi daerah akan berhasil apabila didukung dengan *self supporting* dalam bidang keuangan daerah. Selain memiliki kemampuan keuangan, daerah juga dituntut untuk mampu menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan yang ada. Dengan menggali dan mengelola sumber keuangan yang dimiliki, selanjutnya diharapkan daerah akan mampu mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Machfud Sidik bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal sebagai salah satu komponen penting pelaksanaan desentralisasi dapat terlaksana dengan baik apabila didukung oleh sumber-sumber pembiayaan yang memadai baik yang berasal dari PAD, Pinjaman maupun Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat.

Sumber keuangan daerah yang dapat digali dalam rangka pembiayaan keuangan daerah antara lain adalah pinjaman daerah. Dalam pengambilan pinjaman daerah tersebut Pemerintah Daerah perlu mengupayakan adanya manajemen pinjaman daerah yang efektif mengingat besarnya dampak bila pemenuhan kewajiban tidak dilakukan. Tujuan manajemen tersebut secara sederhana tentunya adalah untuk menyediakan sejumlah dana yang diperuntukkan pemenuhan kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya dalam jangka waktu tertentu.

Sebagai implikasi praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi tenaga birokrat dalam meningkatkan kemampuannya untuk merespon dan memberi pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya kajian tentang manajemen pinjaman daerah ini diharapkan dapat diketahui bagaimana sebaiknya pengelola mengelola program pembangunan yang dibiayai oleh pinjaman luar negeri.

Sedangkan implikasi teoritis dari kajian Ilmu Administrasi Negara yaitu fokus dalam penelitian ini yakni bagaimana untuk lebih mengefektifkan manajemen pinjaman daerah dengan melihat faktor kemampuan aparat, penerapan sistem informasi keuangan daerah dan kemampuan keuangan daerah. Sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan PP No.54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah dikatakan bahwa pinjaman daerah perlu disesuaikan dengan kemampuan daerah. Salah satu yang dimaksud dengan kemampuan daerah dalam penelitian ini adalah kemampuan aparat daerah dalam mengelola keuangannya. Sebagaimana yang diungkapkan Sondang bahwa salah satu indikator efektivitas

organisasi yang dapat digunakan adalah kemampuan aparat yang secara produktif dengan sarana dan prasarana yang tersedia. Sumbangan variabel kemampuan aparat terhadap efektivitas manajemen pinjaman daerah adalah sebesar 44,1 %, menunjukkan persentase terbesar dari variabel pengaruh lainnya.

Dalam proses pemenuhan kewajiban pinjaman daerah juga diperlukan adanya sarana pendukung dalam pengambilan keputusan terutama dalam menentukan besaran yang harus dibayarkan kepada pihak *lender*. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Anthony dan Scott sistem informasi harus dapat memberikan berbagai jenis informasi yang dibutuhkan oleh para pengambil keputusan yang mempunyai tingkat tanggung jawab yang berlainan; pengendalian informasi, pengendalian manajemen dan perencanaan strategis.

Kemampuan daerah lainnya adalah kemampuan keuangan daerah. Daerah harus dapat menggali potensi-potensi yang ada untuk memenuhi ketersediaan sejumlah dana bagi pembangunan. Pamudji menegaskan bahwa Pemerintah Daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan dan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Pinjaman daerah merupakan bagian dari APBD yang juga merupakan kebijakan fiskal daerah. Tujuan pinjaman daerah adalah untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana kota terutama yang menghasilkan pendapatan. Kewajiban yang timbul dari adanya kesepakatan pinjaman daerah menuntut daerah untuk terus mampu memenuhinya. Pinjaman yang dilakukan dalam jangka waktu menengah maupun

panjang membutuhkan beberapa periode pemerintahan untuk menyelesaikannya. Kemandirian daerah akan menunjang keberlangsungan fiskal dalam penyediaan sejumlah dana untuk membayar kewajiban pinjaman daerah (pembayaran hutang pokok, bunga, jasa bank maupun biaya komitmen). Sebagaimana yang diungkapkan Jones dan Pendlebury bahwa anggaran daerah harus mampu secara optimal difungsikan sebagai otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang.

Keterbuktian hipotesis bahwa ada pengaruh antara kemampuan aparat, sistem informasi keuangan daerah dan kemampuan keuangan daerah terhadap efektivitas manajemen pinjaman daerah menyumbang sebesar 47,4 % memungkinkan sisanya sebesar 52,6 % dipengaruhi oleh variabel lainnya.

Seperti yang diungkapkan oleh James dan Sri Mulyani Indrawati:

*"...bahwa sangat jelas segera diperlukan adanya justifikasi makro ekonomi jangka pendek dalam pembatasan pinjaman Pemerintah Daerah namun pembatasan yang ketat tersebut menimbulkan kesempatan yang terbatas dan bahkan akan mengurangi motivasi Pemerintah Daerah untuk mengembangkan pentingnya kemampuan dalam pinjaman daerah tersebut."*¹²⁰

Sedangkan menurut CGI (*Consultative Group on Indonesia*):

"...permasalahan utama dalam efektivitas dan efisiensi pinjaman adalah lemahnya daya serap pinjaman (slow and low disbursement) yang antara lain disebabkan oleh kurangnya dana pendamping dari pinjaman luar negeri, kurangnya alokasi dana pembebasan tanah, keterlambatan dan pengadaan dalam proses tender serta masalah back log dalam mekanisme penarikan pinjaman. Sementara itu, pencairan bantuan program sangat tergantung pada pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan dalam matriks kebijakan. Hal lain yang penting untuk diperhatikan adalah

¹²⁰ James dan Sri Mulyani Indrawati, *Decentralization and Local Government Borrowing in Indonesia*, <http://www.fiskal.depkeu.go.id/>, diakses 15 September 2005.

*masalah pengawasan dalam realisasi program yang biayai oleh pinjaman luar negeri.*¹²¹

Sebagai reaksi dengan adanya penelitian ini diharapkan berikutnya akan ada kajian lebih lanjut mengenai faktor lain yang mempengaruhi efektivitas manajemen pinjaman daerah seperti membuat kajian mulai dari proses awal perencanaan pengambilan kebijakan pinjaman sampai pada proses evaluasi pelaksanaan program pembangunan yang dibiayai pinjaman tersebut, karena dalam penelitian ini memfokuskan hanya pada pemenuhan kewajiban pembayaran pinjaman daerah dalam jangka waktu tertentu. Dengan adanya penelitian selanjutnya tersebut diharapkan akan mampu meningkatkan kajian yang lebih dalam mengenai kinerja organisasi publik khususnya mengenai manajemen pinjaman daerah.

¹²¹ Dikutip dalam Yuswar Zainul Basri dan Mulyadi Subri, *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005, hal. 205-206.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amsyah, Zulkifli., *Manajemen Sistem Informasi*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Asian Development Bank, *Governance : Sound Development Management*, 1999.
- Basri, Yuswar Zainul dan Mulyadi Subri., *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005.
- Budiardjo, Miriam., *Menggapai Kedaulatan Untuk Rakyat*, Bandung : Mizan, 1998.
- Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional & Departemen Dalam Negeri, 2002.
- Bungin, Burhan., *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta : Kencana, 2005.
- Dimack, *Administrasi Negara*, Jakarta : Erlangga, 1989.
- Ferguson, *Statistical Analysis in Psychology and Education*, Tokyo : Mc Graw Hill, 1981.
- Garis-garis Besar Haluan Negara dan Ketetapan-Ketetapan MPR*, Jakarta : Sekretariat Negara, 1978.
- Gibson, J.L. et al., *Organisasi : Perilaku, Proses*, Jakarta : Erlangga, 1985.
- Gibson, James L. et al., *Organisasi & Manajemen : Prilaku, Struktur, Proses*, Jakarta : Erlangga, 1987.
- Gie, The Liang., *Administrasi Perkantoran Modern*, Yogyakarta : Yayasan Studi Ilmu dan Teknologi, 1988.
- Gordon, Davis., *Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen*, Jakarta : Pustaka Binaan Presindo, 1983.
- Hadi, Soetrisno., *Analisis Regresi*, Yogyakarta : Andi Offset, 1994..
- Hadi, Soetrisno., *Paket SPSS Paket Midi*, Yogyakarta : UGM Press, 2000.
- Hadi, Soetrisno., *Statistik 2*, Yogyakarta : Andi Offset, 1996.
- Halim, Abdul., *Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2001.

- Hamid, Edy Suandi., *Sistem Ekonomi Utang Luar Negeri dan Isu-Isu Ekonomi Politik Indonesia*, Yogyakarta : UII Press, 2004.
- Handayaniingrat, Soewarno., *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta : Gunung Agung, 1985.
- Hettne, Bjorn., *Ironi Pembangunan di Negara Berkembang*, Jakarta : Sinar Harapan, 1985.
- Kartono, Kartini., *Pengantar Metodologi Research Sosial*, Bandung : Alumni, 1980.
- Laporan Bank Indonesia Tahun 1993-1994*, Jakarta : BI, 1994.
- Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta : Andi Offset, 2002.
- Mariun, *Azas-Azas Ilmu Pemerintahan*, Yogyakarta : Seksi Penerbitan Fakultas Sospo UGM, 1970.
- Mcleod, Raymond & Goerge Schell., *Management Information System*, New Jersey : Prentice Hall, 2001.
- Moekijat, *Pengantar Sistem Informasi Manajemen*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1991.
- Moenir, AS., *Pendekatan Manusiawi dan Organisasi Terhadap Pembinaan Kepegawaian*, Jakarta : Gunung Agung, 1983.
- Murdick, Robert G., *Sistem Informasi Untuk Manajemen*, Jakarta : Erlangga, 1986.
- Nainggolan, *Pembinaan Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta : Depdagri, 1987.
- Nazir, M., *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia, 2003.
- Nurgiyantoro, Burhan *et all.*, *Statistik Terapan : Untuk Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2002.
- O'Brien, James., *Managing Information System : Managing Information Technologi in the Internetworked Enterprise*, New York : The McGraw Hill, 1999.
- Peters, B.Guy., *The Politics of Bureaucracy*, London : Routledge, 2000.
- Pinjaman Daerah Yang Bersumber Dari Luar Negeri : Peluang dan Tantangan*, Jakarta : Direktorat Luar Negeri Bank Indonesia, 2003.

- Praktek Manajemen Pinjaman Daerah Luar Negeri : Konvensional dan Syariah*, Jakarta : Direktorat Luar Negeri Bank Indonesia, 2004.
- Purwadarminta, WJS., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1976.
- Rochman, Meuthia Ganie., *Good Governance : Prinsip, Komponen dan Penerapannya dalam HAM : Penyelenggaraan Negara Yang Baik dan Masyarakat Warga*, Jakarta : KOMNAS HAM, 2000.
- Sadler, Philip., *Mendesain Organisasi*, Jakarta : Pustaka Binaman Pressindo, 1991.
- Shafritz, Jay M. & E.W.Russell., *Introducing Public Administration*, USA : Longman, 1997.
- Siagian, Sondang P., *Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*, Jakarta : PT.Gunung Agung, 1983.
- Siagian, Sondang P., *Sistem Informasi Untuk Pengambilan Keputusan*, Jakarta : Gunung Agung, 1982.
- Simanjuntak, Robert., *Kebijakan Keuangan Daerah dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Jakarta : Prosiding Rountable Discussion YIPD/CLGI, 2003.
- Singarimbun, Masri., *Metode Penelitian Survei*, Jakarta : LP3ES, 1989.
- Steers, Richard M., *Efektivitas Organisasi Kaidah Tingkah Laku*, Jakarta : Erlangga, 1985.
- Stoner, James A. dan Charles Wonkel., *Manajemen I*, Jakarta : Intermedia, 1988.
- Stoner, James A., *Manajemen II*, Jakarta : Erlangga, 1994.
- Suganda, Dann., *Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Administrasi*, Jakarta : Intermedia, 1991.
- Sukirno, Sadono., *Ekonomi Pembangunan*, Jakarta : LPFE-UI, 1985.
- Sulistiyani, Ambar., *Memahami Good Governance dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta : Gaya Media, 2004.
- Syamsi, Ibnu., *Pokok-Pokok Organisasi & Manajemen*, Jakarta : Rineka Cipta, 1994.

- Tjokroamidjojo, Bintoro., *Pengantar Administrasi Pembangunan*, Jakarta : LP3ES, 1981.
- Tjokroamidjojo, Bintoro., *Reformasi Administrasi Publik*, Jakarta : MIA-UNKRIS, 2001, hal.45-49.
- Toha, Miftah., *Perilaku Organisasi*, Yogyakarta : Rajawali, 1983.
- Van Sant, Jerry., *Organizations and Administration of Integreted Rural Development : Supporting Capacity Building in the Indonesia PDP*, Washington DC : Research Triangle Institute, 1981.
- Weber, Ron., *Information System Control and Audit*, New Jersey : Prentice Hall, 1999.
- Wibawa, Samodra., *Beberapa Konsep Admoinistrasi Negara*, Yogyakarta : Liberty, 1992.
- Widjaja, HAW., *Otonomi Dearah Dan Daerah Otonom*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001.

INTERNET

- <http://www.fiskal.depkeu.go.id/> *Decentralization and Local Government Borrowing in Indonesia.*
- <http://www.fiskal.depkeu.go.id/> *Hutang Sebagai Salah Satu Sumber Pembiayaan Pembangunan Daerah Otonomi.*
- <http://www.fiskal.depkeu.go.id/> *Perkembangan Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2004.*
- <http://www.goodgovernance-bappenas.go.id/> *Corporate Transparency in the Fight Gainst Corruption.*
- <http://www.goodgovernance-bappenas.go.id/> *The Management of Public Change : From Old Public Administration to New Public Management.*
- <http://www.ideas.repecc.org/> *Kinerja Keuangan dan Strategi Pembangunan Kota di Era Otonomi Daerah.*
- <http://www.info.worldbank.org/> *Guidelines for Public Debt Management.*
- <http://www.pdf.dec.org/> *Problem of The Implementation of Fiscal Decentralization In Regional Autonomy.*

<http://www.goodgovernance-bappenas.go.id/> *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi.*

JURNAL, MAKALAH DAN MAJALAH

Jurnal Bisnis & Ekonomi Politik, Vol.6 (1) April 2005, INDEF.

Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan, Vol.6, No.4 Desember 2002.

Machfud Sidik dalam makalah seminar : *Perimbangan Keuangan Pusat & Daerah Sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal*, 2002.

Urgensi Penguatan Keuangan Daerah, Majalah Perencanaan Pembangunan Edisi 04/th.x/Juli-Sept 2005

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Menteri Keuangan No.3/PMK.010/2006 tentang Tata Cara Pemberian Pinjaman Daerah dari Pemerintah Yang Dananya Bersumber dari Pinjaman Luar Negeri

Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah

SURAT KABAR

Risiko Tinggi, Daerah Bisa Berbelit Bunga Utang, Jawa Pos 4 Agustus 2006.

Utang, Paskah dan Anggaran Publik, Kompas 16 Pebruari 2006.